

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

**KOMINFO next**

**CIPTA  
TALENTA  
DIGITAL**



Edisi 27  
Maret 2021



**HARY BUDIARTO**  
KEPALA BADAN LITBANG SDM

# TIM REDAKSI

**Pengarah:**  
Mira Tayyiba

**Wakil Pengarah:**  
Phillip Gobang

**Pemimpin Redaksi:**  
Ferdinandus Setu

**Wakil  
Pemimpin Redaksi:**  
Daoni Diani Hutabarat

**Redaktur Pelaksana:**  
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur  
Pelaksana:**  
Viskayanesya

**Redaktur:**  
Frans Bambang Irawan  
M. Taufiq Hidayat  
Verawati  
Annisa Bonita P.

**Reporter:**  
Yusuf  
Ahmad Irso Kubangun  
Meita Pusparini  
Emild Kadju

**Fotografer:**  
Agus Yudi Harsono  
Doni Paulus Sumule  
Sri Indrati Novinarsari  
Indra Kusuma

**Desain & Layout:**  
Adista Winda Rizka  
Rahma Aulia Indroputri  
Lamdza Rachmattunisa  
Dhenty Febrina Sahara

**Produksi:**  
Fahmi Trihatin J.

**Alamat Redaksi:**  
Biro Humas Kementerian  
Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat  
No. 9, Jakarta Pusat

## ASN Kominfo Sudah Divaksin

Selamat berjumpa kembali. Semoga Pembaca KNext dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari-hari ini semua dalam tahap pemulihan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah terus menggalakkan program vaksinasi di berbagai daerah. Bapak Presiden Jokowi hadir di beberapa kesempatan untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Keluarga besar Kementerian Kominfo pun telah menjalani vaksinasi. Diawali oleh Pak Menteri Johnny Plate, lalu berlanjut ke para pejabat eselon 1 dan 2 terus diikuti oleh vaksinasi massal kepada seluruh pegawai kantor pusat dan wilayah Jabodetabek. Atas arahan Ibu Sekjen Mira Tayyiba, pelaksanaan vaksinasi digelar di lapangan Anantakupa Kementerian Kominfo, Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat. Lapangan pun disulap menjadi tenda besar agar seluruh proses vaksinasi mulai dari pra-registrasi, registrasi, *screening*, vaksin, observasi hingga pencatatan bisa berlangsung lancar.

Kami bersyukur seluruh Tim Redaksi Knext pun telah menerima vaksinasi COVID-19. Di edisi Maret 2021 ini, kami ketengahkan topik menarik mengenai talenta digital. Mengapa topik ini penting? Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia harus bertransformasi. Harus mengakselerasi setiap perubahan dan dinamika sosial.

Kepala Negara memberikan arahan untuk melakukan 5 Langkah Percepatan Transformasi Digital Nasional.

Pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Kedua, persiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis. Ketiga, percepat integrasi Pusat Data Nasional.

Keempat, siapkan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital secepat-cepatnya. Kelima, siapkan kebutuhan SDM talenta digital.

Untuk menterjemahkan langkah kelima arahan Presiden terkait cipta talenta digital tersebut, Menteri Johnny G. Plate bersama seluruh jajaran telah menyiapkan sejumlah program unggulan, antara lain program Digital Talent Scholarship (DTS).

Melalui program ini, Kementerian Kominfo memfasilitasi para milenial kita untuk mengasah kemampuan lewat pelatihan akademi. Pada tahun 2021 terdapat 8 pelatihan, antara lain Fresh Graduate Academy (FGA), Vocational School Graduate Academy (VSGA), Thematic Academy (TA), Professional Academy (ProA), Government Transformation Academy (GTA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Digital Leadership Academy (DLA), dan Talent Scouting Academy (TSA). Dari pelatihan akademi, Kementerian Kominfo mendorong talenta digital menguasai teknologi Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Big Data, dan teknologi anyar lainnya.

Program lain dari Kementerian Kominfo yakni, beasiswa pendidikan S2 Dalam dan Luar Negeri sebagai wujud komitmen menyiapkan SDM di sektor komunikasi dan informatika. Selain itu, juga ada Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Gerakan ini memiliki moto Inisiatif bersama Membangun Literasi Digital di Indonesia. Sebuah gerakan yang mengajak publik pentingnya menjaga ruang digital dengan tidak memproduksi dan menyebarkan hoaks, mengabarkan informasi positif lewat pemahaman literasi digital, dan masih banyak program kreatif lainnya.

Kami harapkan Pembaca sekalian dapat menyampaikan kabar baik ini kepada sanak saudara, kerabat, teman bahkan tetangga untuk ikut mengambil kesempatan menjadi bagian dari talenta digital Indonesia.



**Ferdinandus Setu**  
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV

# Daftar

# Isi

---

2

Surat dari MMB 9

4

Rak Buku

6

Teknologi & Gadget

12

KominfoPedia

22

Liputan Utama

42

Portal Kominfo

50

Kata Alumni

52

Success Story DTS

56

Jurnal Foto

66

Webinar DTS  
Bersama Alumni

70

ASN Muda

112

Opini



# Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B  
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat  
08.30 s.d 15.30



Rak Buku

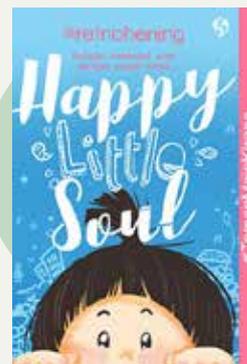
Penulis :

**Richard Carlson, Ryan Pradana,  
Siti Gretiani**

## Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar

Cara Mudah Mencegah Masalah Kecil  
Mengganggu Hidup Kita

Dengan gaya tulisan yang mudah dipahami, buku ini menyajikan cara-cara membentuk perspektif yang lebih positif sehingga kita akan belajar berdamai dengan diri sendiri dan lebih peduli. Hidup kita akan lebih terfokus pada masa kini, hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik, dan batin kita akan menjadi lebih tenang.



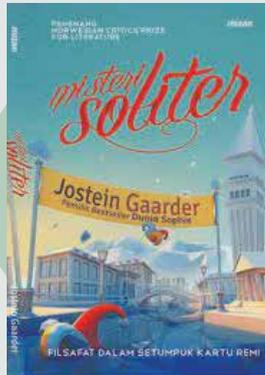
Rak Buku

Penulis :

**Retno Hening Palupi  
Tesara Rafiantika**

## *Happy Little Soul*

Cerita petualangan Ibuk dan Kirana di Happy Little Soul ini mengajak pembaca, dari kakak, adik, orang tua, calon ayah dan ibu, apapun perannya, untuk belajar hal-hal sederhana mengenai kasih sayang dan bersama mewarnai kehidupan yang lebih baik.



Penulis :  
**Jostein Gaarder**

### **Misteri Soliter**

Filsafat dalam Setumpuk Kartu Remi

Hans Thomas, 12 tahun, bersama sang ayah melakukan perjalanan ke Yunani untuk mencari sang ibu. Namun perjalanan panjang itu diwarnai kejadian-kejadian aneh. Seorang kurcaci memberi Hans sebuah kaca pembesar, seorang tukang roti memberinya sekerat roti yang di dalamnya terdapat buku mini; setumpuk kartu remi yang tiba-tiba hidup, dan seorang Joker yang nyaris tahu segala.

Misteri Soliter adalah bacaan yang ditulis khusus bagi mereka yang ingin belajar filsafat tanpa harus berkerut kening. Kisah di dalam kisah, karakter yang mungkin nyata, mungkin pula tidak, masa lalu dan masa depan. Sebuah kisah yang menyajikan teka-teki dan eksplorasi kehidupan yang memukau.

#### **Sumber Foto :**

Unsplash



*/'myoozɪk/*

# TEKNO LOGI & GAD GET

## Evolusi Gadget Pemutar Musik

Bangsa Indonesia memperingati Hari Musik Nasional setiap tanggal 9 Maret, bertepatan dengan tanggal lahir pencipta lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman. Peringatan ini pertama kali diperingati pada tahun 2013, dengan ditetapkannya Keppres Nomor 10 Tahun 2013 tentang Hari Musik Nasional. Dalam keppres tersebut, disebutkan bahwa musik merupakan ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional dan merepresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Tentunya, SobatKom semua sudah sangat familiar dengan yang namanya musik. Musik inilah yang biasanya menemani SobatKom semua ketika berolahraga, bekerja, berkumpul dengan teman, maupun memang sengaja meluangkan waktu untuk menikmati musik kesayangan SobatKom. Sejak awal abad pertengahan hingga zaman yang serba digital seperti sekarang ini, terjadi evolusi mengenai bagaimana cara manusia dalam menikmati musik. Pada edisi ini, rubrik Gadget dan Teknologi akan membahas mengenai perkembangan alat pemutar musik dari masa ke masa. Yuk kita simak bersama!

Sumber Foto :

Unsplash

## Fonograf



Alat perekam sekaligus pemutar musik ini dikembangkan oleh Thomas Alva Edison pada 21 November 1877. Alat ini memiliki besi yang akan menggores aluminium foil yang dibungkus dengan silinder besi, sehingga bisa merekam maupun menghasilkan suara musik.

Awalnya, alat ini digunakan sebagai mesin pendiktean. Namun dalam perjalanannya, ternyata fonograf menjadi alat yang populer untuk digunakan di dunia hiburan sebagai alat pemutar musik.

Sebagai alat perekam, **fonograf bertahan pada waktu yang cukup lama**. Tercatat sampai dengan tahun 1980, fonograf masih dipakai sebagai cara utama dalam merekam musik sebelum akhirnya digantikan oleh kaset dan CD.

## Gramofon



Seringkali, ketika kita menonton film-film *vintage*, kita akan menemukan sang aktor memutar musik dengan piringan hitam seperti piring raksasa yang dipasangkan ke suatu alat. Alat inilah yang dinamakan gramofon. Gramofon populer di tahun 1960-an, hingga saat ini, baik gramofon dan piringan hitam atau yang sering disebut dengan *vinyl*, banyak diburu masyarakat untuk dijadikan barang koleksi.

Untuk memutar musik, gramofon bekerja tanpa bantuan listrik. Alat ini bekerja dengan cara diputar engselnya, kemudian *stylus* yang berbentuk seperti jarum ditempelkan pada piringan hitam. *Stylus* bekerja dengan mencatat simpangan gelombang suara yang ada di piringan hitam dan kemudian meneruskannya ke alat penguat suara. Suara musik yang terekam di piringan hitam pun akan terbaca.

Kualitas suara piringan hitam **diklaim lebih jernih dibandingkan pita kaset**. Satu piringan hitam, biasanya hanya berisi satu lagu saja.

*Kawula muda, ada Bunga mau request nih lagunya Agnez Mo sebuah Rasa, Salam-salamnya "buat yang tadi siang lewat rumah aku, seneng deh. Besok mampir aja dulu, jangan cuma lewat. Siapa tau mama setuju. Special buat kamu ya, yang inisialnya D"*



Terkadang kejutan-kejutan inilah yang membuat musik yang diputar menjadi lebih spesial ketika tiba-tiba muncul di saat yang tidak kita duga. Bukan begitu SobatKom?

## Radio AM/FM

Tahun 1980 hingga 1990-an, radio menjadi sarana untuk mendengarkan musik paling populer di masyarakat. Alunan musik ditransmisikan melalui gelombang baik FM maupun AM oleh stasiun-stasiun radio penyiaran untuk disiarkan di wilayah jangkauan sinyal stasiun radio tersebut. Siaran radio tersebut bersifat umum sehingga siaran yang diterima orang satu dengan lainnya akan sama.

Kawula muda, saat itu terbiasa untuk me-request musik maupun lagu-lagu kesayangan mereka ke stasiun-stasiun radio untuk kemudian diputar dan diperdengarkan kepada khalayak. Sampai saat ini pun, radio masih sering didengarkan ke masyarakat, walaupun pendengarnya tidak sebanyak di tahun 90an lalu.

Kelemahan dari mendengarkan musik melalui radio yaitu kita memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan juga fleksibilitas dalam mendengarkan lagu. Kita tidak bisa mendengarkan musik yang kita inginkan sewaktu-waktu, bahkan tidak tahu kapan musik kita akan diputar setelah kita melakukan rikues.

## Tape Recorder

*Tape recorder* mengalami puncak penggunaannya pada tahun 1980-an hingga awal tahun 2000. Pada tahun-tahun tersebut, pita kaset sedang *booming* penggunaannya sebagai sarana untuk merekam dan memutar musik. *Tape recorder* inilah yang menjadi alat yang digunakan untuk bisa memutar rekaman musik yang ada di dalam pita kaset. Semakin panjang gulungan pita, semakin lama pula suatu musik bisa direkam di dalamnya.

Kualitas suara musik yang dihasilkan *tape recorder* ini terhitung bagus. Beberapa *tape recorder* premium bahkan sudah mengusung fitur stereo, fitur yang terhitung baru di masa tersebut.



***Tape recorder* memiliki rentang harga yang sangat lebar**, dari hanya yang beberapa ribu rupiah, hingga ratusan ribu rupiah di kala itu (kurs 1\$ = Rp. 2000), sehingga hampir semua masyarakat memiliki gadget ini di rumahnya.



## Walkman

Walkman merupakan versi *mobile*-nya *tape recorder*. Alat ini menghasilkan musik dengan memutar pita kaset dalam sebuah kotak mini yang biasanya berukuran satu genggam orang dewasa. Dengan menggunakan Walkman, masyarakat bisa mendengarkan musik di manapun dan kapanpun. Bentuknya yang kecil dan tanpa perlu disambungkan ke colokan listrik, membuat Walkman menjadi gadget yang revolusioner di masanya, terutama di kalangan anak muda tahun 90an.

Walkman dioperasikan dengan dua buah baterai ukuran A2 dan juga *earphone/headphone*. Lama tidaknya penggunaan Walkman ini sangat bergantung pada seberapa sering kita memutar musik dan melakukan *forward / rewind*.

**Dalam penggunaan Walkman, ada kebiasaan unik di masa itu**, yaitu untuk menghemat energi baterai, pengguna biasanya meminimalisir penggunaan fitur *forward/rewind* di Walkman. Sebagai gantinya, pengguna akan memutar pita kaset dengan bolpoin / pensil sebagai ganti fitur *forward/rewind* ini.

/myoozik/



## Compact Disc Player

Compact Disc (CD) merupakan media untuk memutar musik yang diproyeksikan akan menggantikan peran pita kaset di masyarakat di awal tahun 2000-an. Format ini, merupakan format transisi awal dari musik yang tadinya direkam dalam bentuk analog dalam bentuk pita kaset, menjadi bentuk digital dalam CD. Dari sisi kualitas musik, CD memiliki suara yang lebih high definition (HD) dibandingkan kaset. Namun, CD dinilai lebih rentan rusak dibandingkan pita kaset. Permukaan CD untuk menyimpan musik yang terbuka, lebih rawan terkena goresan dibandingkan pita kaset yang terlindungi selubung kotak plastik.

Bentuk CD Player, alat untuk memutar CD, lebih kecil dan tipis dibandingkan dengan *tape recorder*. Untuk beberapa jenis CD Player, terdapat dua atau tiga tempat untuk menampung CD di dalamnya. Sehingga, pengguna tidak perlu berulang-ulang membuka dan menutup CD tray untuk berganti dari CD satu ke yang lainnya. Pemanfaatan CD player untuk memutar musik tidak seheboh penggunaan *tape recorder* di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan selain harganya yang pada awal rilis terbilang cukup mahal, terdapat format musik lain yang muncul tidak lama setelah CD beredar di masyarakat, yaitu format Mp3 yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan CD.

## MP3 Player/iPod

Mp3 player menjadi alat yang ramai digunakan masyarakat di awal tahun 2000an, bebarengan dengan meluasnya penggunaan *personal computer* (PC) di masyarakat. Tentunya, populernya alat ini tidak terlepas dari format rekaman musik yang diusungnya, yaitu format Mp3. Format Mp3 selain memiliki kualitas musik yang bagus, juga tidak mudah rusak serta mudah untuk ditransmisikan. MP3 player memiliki rentang harga yang bervariasi, sesuai dengan kapasitas musik yang bisa ditampungnya, serta *brand* yang diusungnya.

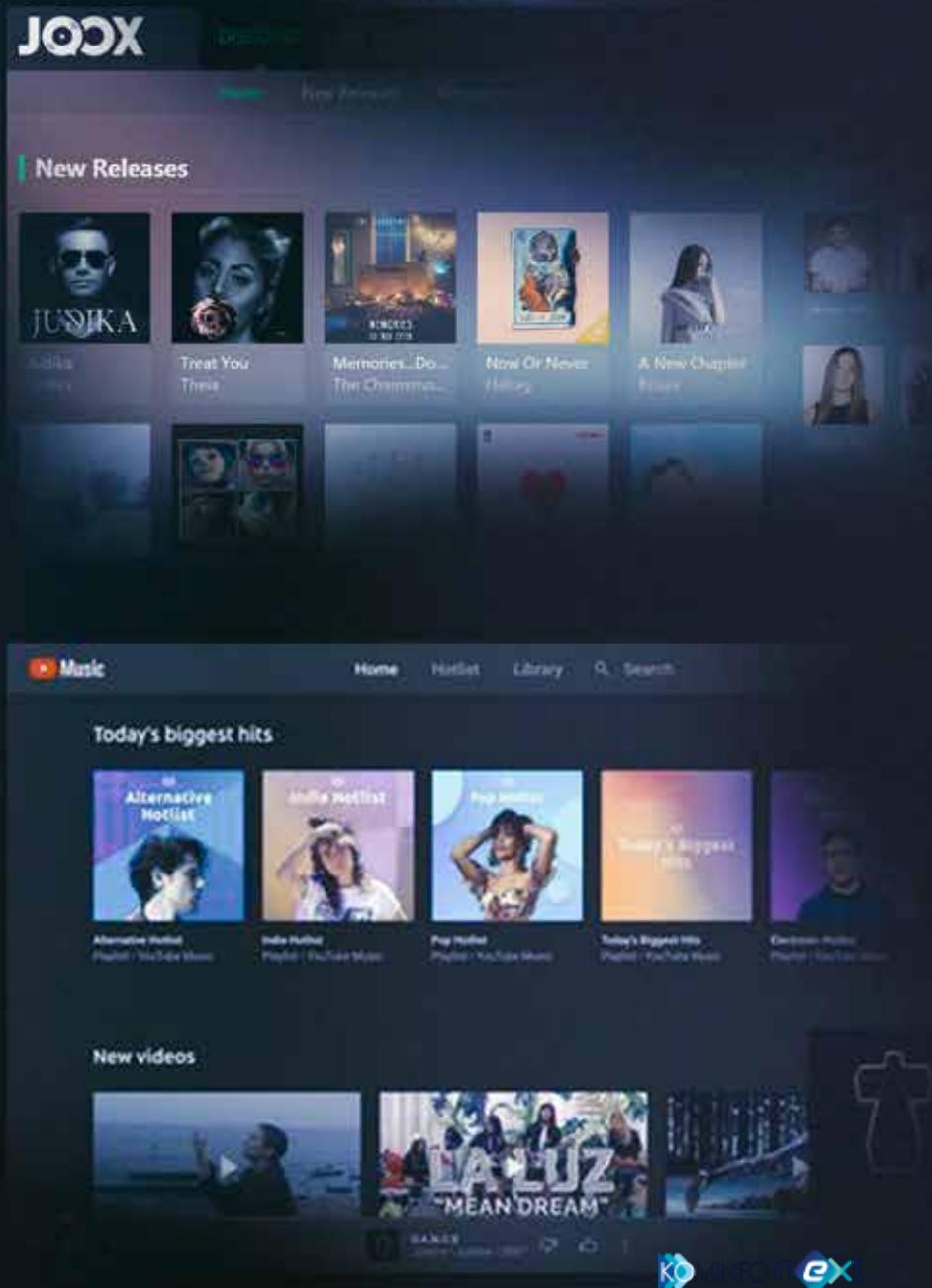
Bentuk Mp3 Player jauh lebih kecil dibandingkan Walkman. Sehingga, tidak hanya menggantikan peran CD Player, alat ini juga menggerus penggunaan Walkman secara signifikan. Sumber daya Mp3 player biasanya berasal dari baterai lithium yang bisa di isi ulang serta memiliki daya tahan dan kapasitas penyimpanan listrik yang lebih besar dibandingkan dengan batu baterai biasa.

Memasuki awal dasawarsa kedua abad 21, **penggunaan Mp3 player menurun seiring dengan hadirnya *handphone*** yang memasukkan fitur mp3 player di dalamnya.

## Aplikasi Streaming

Meningkatnya *bandwidth* internet secara signifikan di masyarakat, semakin murahnya paket data yang disediakan oleh operator telekomunikasi, serta perkembangan aplikasi berbasis *service* yang meningkat selama beberapa tahun terakhir, mempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat dalam menikmati musik. Ketika beberapa tahun lalu kita masih membeli musik dan mengoleksi musik-musik tersebut di *gadget* maupun disimpan di *harddisk* kita, saat ini musik-musik tersebut ditawarkan untuk bisa didengarkan secara *online*, tanpa perlu *men-download* terlebih dahulu di *gadget* kita.

Beberapa aplikasi seperti Spotify, YouTube Music, iTunes dan lainnya, menyediakan *repository online* musik-musik yang bisa dinikmati oleh penggunanya secara online. Pengguna tidak perlu meluangkan penyimpanan khusus, karena *file-file* digital musik tersebut ada di *server* penyedia aplikasi. Sehingga, jika suatu saat ingin menikmati musik yang diinginkan, tinggal *online*, pilih musik yang ingin dinikmati, dan *voilà!* Musik sudah langsung bisa dinikmati. Yup, syarat utama dari layanan ini adalah pengguna harus selalu terhubung di internet. Namun, beberapa aplikasi menawarkan untuk bisa menikmati musik di platform aplikasi mereka secara *offline* dengan keanggotaan tipe tertentu.



# KominfoPedia

---

Halo SobatKom!

Tahu kan, KominfoNext edisi ini sedang membahas seputar Digital Talent Scholarship (DTS)? Program beasiswa pelatihan pengembangan SDM yang ditujukan bagi talenta Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya (*upskilling*) di bidang digital. Nah, DTS memberikan beragam pelatihan di bidang penguasaan teknologi mutakhir untuk mempersiapkan para talenta digital kita menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Pelatihan tersebut di antaranya adalah pelatihan di bidang *artificial intelligence*, *Internet of Things (IoT)*, *machine learning*, *cybersecurity*, dan *cloud computing*. Kali ini, KominfoPedia akan mengemas penjelasan bidang-bidang teknologi terbaru yang diajarkan pada program DTS tersebut secara singkat dan sederhana.

## IoT

*Internet of things (IoT)* adalah segala aktivitas manusia dengan benda, ataupun benda dengan benda, seperti sensor, robot, *platform*, *cloud*, yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi. Mulai dari *smart home*, *smart city*, *smart farming*, sampai *smart factory*. Segala macam hal yang mempunyai sensor dan aktuator yang bisa dinyala-matikan dan dihubungkan ke sebuah jaringan internet, adalah *Internet of Things*.

Jakarta Smart City adalah salah satu contoh unit pengelola kota pintar yang telah mengaplikasikan teknologi IoT dalam pengelolaan kota. Mulai dari kamera pemantau

(CCTV) yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, pelacak lokasi truk sampah menggunakan sensor *Global Positioning Satellite (GPS)*, teknologi *CityTouch* untuk manajemen penerangan jalan umum berbasis web, hingga penggunaan *Automatic Water Level Recorder (AWLR)* untuk memonitor ketinggian permukaan air sungai di Jakarta.



## Cloud Computing

Komputasi awan (*cloud computing*) adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Jika diartikan secara sederhana, komputasi awan merupakan layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet di mana saja selama ada koneksi internet sebagai media penghubung.

Tentunya SobatKom familier dengan layanan komputasi awan seperti Google Drive, Docs, Slides, atau bahkan layanan milik Kominfo, [k-cloud.kominfo.go.id](http://k-cloud.kominfo.go.id)? Ini adalah beberapa contoh pemanfaatan komputasi awan yang memudahkan kita dalam pekerjaan sehari-hari. Mekanisme komputasi awan memungkinkan kita “menyewa” sumber daya teknologi informasi (*software*, *processing power*, *storage*, dan lainnya) melalui internet, memanfaatkannya sesuai kebutuhan kita, dan membayar sesuai penggunaannya.

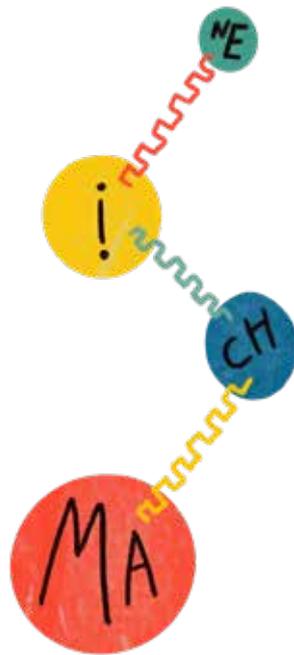




## AI

Dalam ilmu komputer, istilah kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mengacu pada kecerdasan yang mirip dengan manusia, yang ditampilkan oleh komputer, robot, ataupun mesin lainnya.

Sementara dalam penggunaan populer, AI mengacu pada kemampuan komputer atau mesin untuk meniru daya pikir manusia, mulai dari kemampuan memahami sesuatu, belajar dari contoh dan pengalaman, memahami dan merespons bahasa manusia, cara menyelesaikan masalah, hingga pengambilan keputusan. Seluruh kemampuan ini kemudian disatukan, menghasilkan mesin atau komputer yang dapat berfungsi layaknya manusia.



## Machine Learning

*Machine learning* merupakan cabang teknologi dari kecerdasan buatan (AI) yang berfokus pada pembangunan aplikasi berbasis data. Sederhananya, jika AI adalah alam semesta dari teknologi komputasi yang memiliki kemampuan menyerupai kecerdasan manusia, maka *machine learning* adalah bagian dari penerapan AI yang mampu belajar dengan sendirinya.

*Machine learning* dapat memprogram ulang dirinya sendiri karena ia mampu mencerna lebih banyak data, untuk kemudian digunakan untuk melakukan satu tugas spesifik yang dirancang untuk dilakukan dengan tingkat akurasi yang semakin tinggi. *Machine learning* didasarkan pada *neural network*, sebuah jaringan perhitungan algoritma yang mencoba meniru daya pemahaman dan proses berpikir otak manusia.



## Cybersecurity

Keamanan siber (*cyber security*) berkaitan dengan tindakan, baik secara aktif maupun pasif, untuk melindungi sistem, jaringan, program, atau aset-aset digital dari serangan siber baik yang berasal dari luar maupun dari dalam sistem tersebut. Ketergantungan masyarakat saat ini pada teknologi terus meningkat pesat dan sulit diimbangi oleh perusahaan yang paling cekatan sekalipun. Hingga saat ini, keamanan siber manajemen keamanan siber masih terus berkembang untuk menghasilkan metode melawan serangan siber yang semakin canggih.

Beberapa contoh serangan siber yang paling sering terjadi adalah (1) malware (*malicious software*), mengacu pada kumpulan varian perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem; (2) *botnets*, ketika jaringan sistem komputer disusupi untuk melakukan sejumlah tugas tanpa izin dan bahkan tanpa sepengetahuan pemilik perangkat; (3) rekayasa sosial (*social engineering*) yang merupakan bentuk manipulasi umum, menyerang psikologis korban untuk mendapatkan informasi data pribadi; (4) injeksi SQL yang biasa ditemukan di situs berbahaya atau *browser web* yang tidak aman, hingga (5) serangan *denial-of-service* yang menyerang server dengan membanjiri lalu lintas jaringan dan menyebabkan gangguan total pada sistem.

## Presiden Apresiasi Program DTS, Menkominfo Dorong Keterlibatan Aktif Pemda



Seiring percepatan akselerasi transformasi digital di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika meningkatkan kompetensi talenta digital anak-anak muda Indonesia lewat Program Digital Talent Scholarship (DTS). Program tersebut mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo, atas kerja sama semua pihak terutama Kementerian Kominfo yang telah bekerja keras dalam mewujudkan program DTS.

“

**Transformasi digital dapat menjadi solusi cepat dan strategis bagi Indonesia untuk menyongsong masa depan.** Namun, juga sangat penting menjaga kedaulatan dan kemandirian digital dengan mendorong penguatan produksi serta talenta dalam negeri.

**Presiden Jokowi,**  
*Jakarta, Jumat (26/02/2021).*

Kementerian Kominfo melanjutkan program pelatihan digital yang sudah dimulai sejak tahun 2018, dengan menyelenggarakan Program DTS di level *intermediate digital skills* bagi putra-putri Indonesia berijazah SMA sederajat dan sarjana untuk 100.000 peserta pada tahun 2021.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate merinci beberapa tema pelatihan dalam Program DTS antara lain *Artificial Intelligence, Internet of Things, Machine Learning, Big Data Analytics, Cloud Computing*, dan berbagai teknologi turunannya.

"Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi global dan lokal, 55 mitra universitas, 37 sekolah vokasi, serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di 34 provinsi di Indonesia," jelas Menteri Johnny.

## Informasi

# Pendaftaran DTS 2021

Pada 14 Februari sampai dengan 27 Maret 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo telah membuka kembali pendaftaran program Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Program Digital Talent Scholarship 2021. Program yang bertujuan mencetak talenta digital yang saat ini mempunyai aktivitas pada bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu digelar bekerja sama dengan Mitra Global Tech Company, termasuk Facebook dan Google, dan startup lokal.

Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy terdiri dari tiga jenis kelas pelatihan, yaitu kelas umum, kelas kuliner yang dikhususkan untuk pelaku/calon pelaku/peminat bidang UMKM kuliner, dan kelas ibu rumah tangga yang dikhususkan untuk wanita yang sudah atau pernah menikah.

Tema pelatihan yang dibuka dalam program DEA antara lain Digital Entrepreneurship Facebook, Digital Entrepreneurship Kelas Ibu Rumah Tangga dan Kelas Umum yang didukung oleh Google, Digital Entrepreneurship Kelas Kuliner dan Kelas Umum yang bekerjasama dengan Gojek.

Program Digital Talent Scholarship merupakan program stimulus pelatihan digital untuk menyiapkan talenta digital andal dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Bekerja sama dengan perusahaan teknologi global, startup lokal, politeknik serta universitas baik negeri maupun swasta, Kementerian Kominfo membuka peluang bagi 100 ribu warga negara untuk mempelajari dan meningkatkan kompetensi di bidang *data analysis*, *artificial intelligence* (AI), *cloud computing* dan *cybersecurity*, serta kompetensi lain di bidang digital.

Pada tahun 2021 ini, program Digital Talent Scholarship didesain untuk menciptakan ekosistem seimbang dalam memaksimalkan peran pentahelix (pemerintah, komunitas/

masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha, dan media) untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital.

DTS merupakan program yang diusung Kominfo untuk meningkatkan keterampilan, daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang teknologi informasi & komunikasi bagi angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan aparatur sipil negara.

Secara garis besar, Program DTS 2021 dibagi menjadi delapan akademi, yakni Fresh Graduate Academy (FGA), Vocational School Graduate Academy (VSGA), Thematic Academy (TA), Professional Academy (ProA), Government Transformation Academy (GTA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Digital Leadership Academy (DLA), serta *Talent Scouting Academy (TSA)*. Diharapkan program ini dapat memberi kebermanfaatan kepada angkatan kerja muda, masyarakat umum, dan PNS TNI-Polri serta memberikan nilai tambah berupa peningkatan sosialisasi dan edukasi terhadap industri dalam pengembangan SDM Digital.

DTS



2021

## Keterlibatan Pemerintah Daerah

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif mengembangkan talenta digital secara nasional. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan talenta digital melalui program Digital Talent Scholarship dengan kerja sama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Menteri Kominfo, fokus pemerintah dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital tidak hanya sebatas membangun infrastruktur digital. Pengembangan sumber daya manusia digital juga menjadi perhatian, agar terwujud SDM digital yang menjadi pelaku utama dalam transformasi digital di Indonesia.

"Pengembangan sumber daya manusia digital, sesuai arahan Presiden Joko Widodo merupakan pekerjaan utama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia digital ini, pekerjaan besar harus kita lakukan bersama-sama," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Akselerasi Transformasi Digital: Pengembangan SDM melalui Program Literasi Digital, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (24/02/2021).

Menteri Johnny menjelaskan, saat ini Kementerian Kominfo menyiapkan pengembangan SDM digital mulai dari tingkat *basic* hingga *advance*. "Yang kita sebut dengan tingkat paling dasar adalah Gerakan Nasional Literasi Digital," jelasnya.

Selain pengembangan SDM digital tingkat *basic*, Menteri Kominfo mendorong pemerintah daerah mendukung pelatihan di



tingkat *intermediate* dan *advance* dalam rangka menyukseskan *smart city* dan program digital lainnya. "Kami menyediakan program di tingkat *intermediate* yang disebut dengan *digital leadership*. Pada tahun 2021, akan tersedia 100 ribu seat Digital Talent Scholarship (DTS) bagi milenial kita, anak-anak muda kita yang berijazah, baik yang sekolah menengah atas apalagi yang berijazah sarjana," ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, program DTS sangat dibutuhkan generasi muda saat ini menyoal *intermediate skill* seperti *cloud computing*, *big data*, *artificial intelligence*, *augmented reality*, *virtual reality* untuk menghasilkan tenaga-tenaga dengan *skill* tingkat menengah. Dalam program DTS, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi global untuk melahirkan para profesional yang terampil menguasai bidang, memberikan tutorial, pendampingan serta pelatihan.

"Ini penting agar anak-anak kita dan milenial kita yang saat ini *work from home*, *study from home* juga mengisi waktunya dengan mengikuti gerakan *Digital Talent Scholarship*," jelas Menteri Kominfo.

Sedangkan di tingkat *advance*, Menteri Johnny menjelaskan, Kementerian Kominfo menghadirkan Program Digital Leadership Academy (DLA). Program tersebut menggandeng startup founder dalam bentuk pelatihan-pelatihan *offline*.

"Kami bekerja sama dengan perusahaan teknologi global bersama-sama dengan negara mitra seperti India, Tiongkok, Singapura. Pelatihan ini penting untuk pemerintah daerah, karena apa? Karena ini juga untuk mendukung program *smart cities* yang sedang kita kembangkan bersama," tandasnya.



## Literasi Digital

Pada November 2020, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi dan Katadata, merilis hasil Survei Literasi Digital Nasional di 34 provinsi. Survei menunjukkan responden menyatakan akses internet semakin cepat, terjangkau dan tersebar sampai ke pelosok. Masyarakat menggunakan internet untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, melakukan aktivitas di media sosial, serta menonton video secara online.

Survei Siberkreasi dan Katadata tersebut sejalan dengan hasil Survei APJII pada periode yang sama, dimana terdapat 196,71 juta pengguna internet di Indonesia atau sekitar 73,7% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan ada lompatan pengguna internet dan media sosial di Indonesia.

Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, yang juga berarti mengembangkan sumber daya manusia di tingkat *basic*, Menteri Kominfo mengajak pemerintah daerah mendukung GNLD Siberkreasi.

"Gerakan yang paling dasar menyoal pengembangan SDM Indonesia. Hal itu untuk memperkenalkan keahlian dasar kepada masyarakat agar siap bertransformasi dari aktivitas di ruang fisik ke ruang digital," jelasnya.



Menurut Menteri Johnny, GNLD Siberkreasi yang dimulai tahun 2017, hingga saat ini telah menjangkau 75 juta warganet dengan partisipan aktif sebanyak 200 ribu orang di 462 titik lokasi. "Atau dengan kata lain di 462 ibukota kabupaten dan kota," tandasnya.

Menteri Johnny mengharapkan gerakan literasi digital dapat menjangkau 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, GNLD Siberkreasi dapat menjangkau sekaligus mengajak masyarakat untuk memahami hal mendasar agar bersama-sama bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital. "Dalam rangka mendukung setidaknya kehidupan sosial dan kehidupan perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya UMKM dan ultra mikro on boarding," ujarnya.

Menurut Menteri Kominfo, pada tahun 2024 nanti, dari 64 juta UMKM dan ultra mikro di Indonesia, sekitar 30 juta diantaranya sudah menjadi UMKM dan ultra mikro digital.

"On boarding ini penting sekali dan untuk itu, gerakan nasional literasi digital berada pada posisi yang sangat strategis untuk melakukan literasi digital," jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan GNLD Siberkreasi perlu mendapat dukungan yang kuat dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Belum lagi GNLD Siberkreasi telah mengharumkan nama bangsa di Forum International Telecommunication Union (ITU) PBB. "Gerakan ini mendapat *recognize* dan *endorsement* dari PBB melalui International Telecommunication Union dengan menjadi Champion ITU PBB pada tahun 2018 dan Prize Winner tahun 2020. Itu berarti gerakan ini mendapat perhatian secara internasional, karena ini dilakukan secara masif," tandasnya.



# Transformasi Digital

## Solusi Strategis untuk Kompetitif

*Tak hanya konektivitas fisik, konektivitas digital juga diperlukan untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkokoh persatuan bangsa.*

Pembangunan infrastruktur peningkatan konektivitas fisik yang menjadi program utama pemerintah dalam beberapa tahun belakangan harus diiringi dengan pembangunan konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok nusantara. Tak hanya untuk kepentingan ekonomi semata, konektivitas baik fisik maupun digital tersebut juga sekaligus akan merangkai negara Indonesia yang amat besar.

Saat meluncurkan program Konektivitas Digital 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 26 Februari 2021, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konektivitas fisik dan digital tersebut juga sangat diperlukan untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkokoh persatuan bangsa.

“Semua ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Tetapi ini juga untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini, yang berpulau-pulau, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, kesehatan, mendukung sinergi budaya nusantara, dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar,” ujarnya.

Pembangunan konektivitas digital tersebut dan tentunya penyiapan talenta digital dalam rangka mewujudkan transformasi digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Di antaranya ialah penyediaan kapasitas satelit multifungsi milik pemerintah (SATRIA), pembangunan menara-menara telekomunikasi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, program beasiswa talenta digital, dan Gerakan Nasional Literasi Digital.

Atas hal tersebut, Kepala Negara mengapresiasi kerja keras seluruh pihak di mana manfaat yang akan dirasakan dari semua upaya tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di masa pandemi ini. Sebab, menurutnya, transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa kemajuan bagi Indonesia.

"Transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun, juga sangat penting untuk tetap menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital," kata Presiden.

Presiden menjelaskan, transformasi digital tersebut dalam implementasinya juga harus mewujudkan kedaulatan dan kemandirian digital yang merupakan prinsip penting transformasi digital Indonesia. Bentuk transformasi tersebut haruslah mendorong penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), meningkatkan pemakaian produk-produk dalam negeri, serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa.

Untuk diketahui, dalam kesempatan tersebut pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga meluncurkan prangko seri vaksinasi nasional COVID-19. Perangko tersebut, yang juga berfungsi sebagai salah satu media visualisasi peristiwa, mengangkat visual Presiden Joko Widodo yang tengah menerima suntikan dosis vaksin COVID-19.

"Ini merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang dengan cepat dan sigap memerangi pandemi COVID-19 melalui vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat agar dapat mencapai kekebalan kelompok," ucap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam laporannya kepada Presiden di acara yang sama.

Hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara yang tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

**"Saya berharap agar program Konektivitas Digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi, pola pikir, kesempatan bisnis global, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia Maju"**

Sumber : <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/transformasi-digital-solusi-strategis-untuk-kompetitif/>

Sumber Foto : [www.presidenri.go.id](http://www.presidenri.go.id)

# Presiden Apresiasi Program Digital Talent Scholarship Kemkominfo

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meningkatkan kompetensi talenta digital anak-anak muda Indonesia lewat Program Digital Talent Scholarship (DTS). Semua pihak yang terlibat dalam program ini, diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo, terutama Kemkominfo yang telah bekerja keras dalam mewujudkannya.

"Transformasi digital dapat menjadi solusi cepat dan strategis bagi Indonesia untuk menyongsong masa depan. Namun, juga sangat penting menjaga kedaulatan dan kemandirian digital dengan mendorong penguatan produksi serta talenta dalam negeri," tutur Presiden Jokowi dalam sambutan Peluncuran Konektivitas Digital Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 26 Februari 2021.

Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi global dan lokal, 55 mitra universitas, 37 sekolah vokasi, serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di 34 provinsi di Indonesia.

Kemkominfo menegaskan, program pelatihan digital ini, sudah dimulai sejak tahun 2018 dengan menyelenggarakan Program DTS di level *intermediate digital skills* bagi putra-putri Indonesia berijazah SMA sederajat dan sarjana untuk 100.000 peserta pada tahun 2021.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, beberapa tema pelatihan dalam Program DTS antara lain Artificial Intelligence, Internet of Things, Machine Learning, Big Data Analytics, Cloud Computing, dan berbagai teknologi turunannya.

"Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi global dan lokal, 55 mitra universitas, 37 sekolah vokasi, serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di 34 provinsi di Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo, pada 14 Februari sampai 27 Maret 2021 lalu, telah membuka kembali pendaftaran program Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Program Digital Talent Scholarship 2021.

Program yang bertujuan mencetak talenta digital ini, mempunyai aktivitas pada bidang UMKM dan digelar bekerja sama dengan Mitra Global Tech Company, termasuk Facebook dan Google, serta dan Start-up Lokal.

Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy ini terdiri dari tiga jenis kelas pelatihan, yaitu kelas umum, kelas kuliner yang dikhususkan untuk pelaku atau calon pelaku serta peminat Bidang UMKM Kuliner, dan kelas ibu rumah tangga yang dikhususkan untuk wanita yang sudah atau pernah menikah.

Tema pelatihan yang dibuka dalam program DEA antara lain Digital Entrepreneurship Facebook, Digital Entrepreneurship Kelas Ibu Rumah Tangga dan Kelas Umum yang didukung oleh Google, Digital Entrepreneurship Kelas Kuliner dan Kelas Umum yang bekerjasama dengan Gojek.

Program Digital Talent Scholarship merupakan program stimulus pelatihan digital untuk menyiapkan talenta digital andal dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Bekerja sama dengan perusahaan teknologi global, startup lokal, politeknik serta universitas baik negeri maupun swasta, Kementerian Kominfo membuka peluang bagi 100 ribu warga negara untuk mempelajari dan meningkatkan



kompetensi *data analysis*, *artificial intelligence (AI)*, *cloud computing* dan *cybersecurity*, serta kompetensi lain di bidang digital.

Program Digital Talent Scholarship pada tahun 2021, didesain untuk menciptakan ekosistem seimbang dalam memaksimalkan peran *pentahelix* (pemerintah, komunitas/masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha, dan media) untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital.

DTS, merupakan program yang diusung Kominfo untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan aparatur sipil negara.

Secara garis besar, Program DTS 2021 dibagi menjadi delapan akademi, yakni Fresh Graduate Academy (FGA), Vocational School Graduate Academy (VSGA), Thematic Academy (TA), Professional Academy (ProA), Government Transformation Academy (GTA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Digital Leadership Academy (DLA), serta Talent Scouting Academy (TSA).

Program ini, diharapkan dapat memberi kebermanfaatan kepada angkatan kerja muda, masyarakat umum, dan PNS TNI-Polri. Nilai tambah program DTS yaitu peningkatan sosialisasi dan edukasi terhadap industri dalam pengembangan SDM Digital.

<https://www.tagar.id/president-apresiasi-program-digital-talent-scholarship-kemkominfo>

# Seluk Beluk Digital Talent Scholarship

Berdasarkan Laporan Bank Dunia tahun 2018, Indonesia diprediksi akan mengalami kesenjangan talenta digital sebesar 9 juta tenaga kerja digital antara 2015 – 2030<sup>1</sup>. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menginisiasi program beasiswa Digital Talent Scholarship (DTS) yang pertama kali digelar sebagai *pilot projects* pada akhir tahun 2018 lalu.

Dalam wawancara dengan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, yang juga selaku Steering Committee DTS sejak tahun 2018, DTS diinisiasi karena ada kesenjangan antara penawaran dan permintaan dalam talenta digital, di mana sumber daya manusia yang sangat terbatas dihadapkan dengan permintaan pasar yang diperkirakan sebanyak 600 ribu tenaga kerja per tahun. Alasan tersebut membuat Kemkominfo perlu membuat suatu program untuk memperkecil kesenjangan tersebut

“Digital Talent Scholarship atau lebih dikenal dengan DTS pertama kali diadakan tahun 2018. Sebagai *pilot project*, DTS memberi 1.000 penerima beasiswa kerja sama dengan *technology company* dan ilmuwan atau akademisi lokal,” ujar Dedy saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Selasa (09/03/2021)

DTS 2018 memberikan empat pelatihan digital, yaitu Big Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, dan Internet of Thinking (IoT). Keempat pelatihan tersebut dipilih berdasarkan bidang pekerjaan yang saat itu paling dibutuhkan.

Tentunya dalam menciptakan sebuah program akan menghadapi tantangan, apalagi program yang sangat besar seperti DTS. Permasalahan utama adalah Lembaga Pendidikan formal di Indonesia yang masih minim dalam menyediakan program pendidikan digital. Selain itu, dengan rentang waktu yang sangat terbatas, jumlah pendaftar melebihi kuota mencapai 46.000 peserta dari kuota 1.000 penerima beasiswa.

“Dari obrolan bulan Agustus bersama Menteri Rudiantara (Menkominfo periode 2014 -



2019, red), DTS harus segera dieksekusi pada bulan November – Desember. Kita mengalami keterbatasan dalam perencanaan dikarenakan program tengah tahun. Kita juga mengalami tantangan dalam penyusunan kurikulum, meyakinkan peserta untuk mendaftar, hingga keterbatasan SDM,” lanjut Dedy.

Dengan keterbatasan anggaran dan SDM, tim DTS melakukan berbagai cara agar masyarakat yakin untuk mendaftar, seperti menggandeng komunitas digital, Perguruan Tinggi, hingga jaringan guru yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Dengan berbagai langkah yang dilakukan membuat pendaftar melebihi kuota yang tersedia.

*Pilot project* DTS 2018 ternyata mendapat sambutan yang sangat baik dari Presiden RI Joko Widodo, bahkan Presiden Jokowi meminta agar program tersebut diperbesar mencapai 100.000 peserta. DTS pun menambahkan pelatihan dari empat pelatihan tahun 2018 mencapai 7 *academy* dan 27 tema pelatihan di tahun 2021.

“Ketika Presiden Jokowi meminta *scale up* hingga 100.000 peserta, tim berusaha untuk memenuhi di tahun 2019. Hanya saja tim hanya mampu mengakomodir 25.000 peserta di tahun 2019, 58.000 peserta di tahun 2020, dan DTS menargetkan untuk mengakomodir 100.000 peserta pada tahun 2021,” tambah Dedy.

Program DTS sudah masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sehingga setidaknya DTS akan tetap berjalan hingga tahun 2024. Dedy berharap agar DTS dapat dimanfaatkan secara maksimal dan menjadi bekal agar Indonesia tetap kompetitif di era transformasi digital.



## Menuju Digital Talent Scholarship 2021

Dalam wawancara terpisah dengan tim KominfoNext, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM), Hary Budiarto, mengatakan bahwa Kementerian Kominfo kembali mengadakan DTS di tahun 2021. Program ini didasari oleh kebutuhan Indonesia terkait talenta digital dengan target 100.000 peserta.

Pelatihan yang disediakan yaitu Fresh Graduate Academy, Vocational School Graduate Academy, Professional Academy, Thematic Academy, Digital Entrepreneurship Academy, Government Transformation Academy, dan Talent Scouting Academy. DTS 2021 juga bekerja sama dengan perusahaan digital Indonesia seperti Gojek dan Tokopedia sebagai penyedia materi ajaran serta bekerja sama dengan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) daerah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

“DTS 2021 ini ingin menjangkau berbagai daerah Indonesia untuk melatih tenaga kerja yang memerlukan kemampuan digital, sehingga talenta digital dapat tercetak di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Kepala Balitbang SDM Hary Budiarto di Kantor Kementerian Kominfo (09/03/2021)

Menjalankan DTS 2021 di tengah pandemi memiliki tantangan tersendiri. DTS tidak memiliki perangkat yang memadai untuk melakukan praktikum sendiri. DTS 2021 pun akan dijalankan sebagian besar secara daring 70 persen dan luring 30 persen. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hary pun mengatakan bahwa program DTS 2021 bukanlah hanya program beasiswa tapi merupakan program yang komprehensif. Pasca pelatihan, DTS memiliki layanan Sistem Informasi Monitoring Alumni Sertifikasi (SIMONAS) yang ditujukan untuk menyalurkan talenta ke perusahaan



yang membutuhkan talenta digital. “Simonas adalah *platform* yang mempertemukan *talent* dengan perusahaan yang membutuhkan talent. Di Simonas juga terdapat sertifikasi juga sesuai jenjang pendidikan yang diambil,” tambah Hary.

Di waktu berbeda, Dedy menambahkan DTS tidak hanya berfokus pada Technical, akan tetapi juga soft skill 4C, yaitu Critical Thinking, Creativity, Complex Problem Solving, dan Communication yang dibutuhkan semua jenjang dan usia. Perpaduan Technical Skill dan Soft Skill sangat dibutuhkan pada era transformasi digital. Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan platform LinkedIn terkait *personal development* dan berupaya menghadirkan pelatihan bagaimana cara menggunakan LinkedIn dengan efektif.

Hary berharap agar masyarakat mendaftar dan mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan di DTS 2021. Dalam tahun keempat diadakan, Kementerian Kominfo telah melakukan banyak survei terkait kebutuhan masyarakat di Indonesia, sehingga DTS bukan hanya menjadi beasiswa untuk meningkatkan kompetensi, akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mencetak talenta digital bukan hanya tugas Kementerian Kominfo, tapi kominfo memiliki peran besar dalam mencetak talenta-talenta tersebut. Kementerian Kominfo juga bertugas meningkatkan literasi dan kemampuan masyarakat agar melek dengan digital. Saya berharap DTS 2021 dapat menjawab berbagai tantangan digital yang ada,” pungkas Hary.

# Berbagi Cerita Bersama Hary Budiarto Kabalitbang SDM Baru Kementerian Kominfo

Menjadi yang berbeda dari anak-anak seusianya, terpatri dalam benak Hary Budiarto, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika. Semasa kecil, sudah terobsesi untuk berkeinginan mencoba pekerjaan yang menurut orang lain mengalami kesulitan.

Ditemui dua pekan lalu di ruang kerjanya yang berada di Lantai 6, Gedung Depan Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (09/03/2021), ia bercerita banyak seputar impiannya saat masih kanak-kanak, masa kuliah, hingga perjalanan karir dan pekerjaannya.

Mewakili tim Majalah Kominfo Next, saya berkesempatan untuk berbincang dengannya. Obrolan pada pagi itu dibuka dengan topik mengenai bagaimana cara ia memberi motivasi kepada lingkup internal Balitbang SDM Kominfo





dan apa yang mendasarinya untuk mengabdikan kepada negara dengan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kabupaten Litbang SDM Hary mengisahkan, semasa duduk di bangku sekolah dulu, teman-teman sebayanya seringkali merasa takut jika berhadapan dengan mata pelajaran matematika. Namun, tidak demikian dengan dirinya. Ia justru terobsesi untuk berusaha menyenangkan matematika.

“Waktu masih SD banyak teman-teman kurang suka dengan mata pelajaran matematika teman-teman saya sering bilang pusinglah, sulitlah, namun saya berusaha untuk menyenangkan matematika, Akhirnya, saya betul-betul mempelajarinya dan sampai sekarang jadi pelajaran paling favorit, Artinya, apa yang dianggap orang itu sesuatu yang penting, dan kompleks, itu yang membuat saya terobsesi untuk berkeinginan masuk di situ”.

Hal ini pun terus berlanjut sampai Kabalibang SDM Hary beranjak remaja ke perguruan tinggi. Ia bercerita, pernah suatu ketika pada saat mengikuti ujian seleksi masuk ke universitas, dirinya mengaku hanya mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan rumus tambah kurang kali itu saja. Sementara, untuk soal-soal lain dikerjakannya dengan tidak serius.

“Bisa dibilang asal lah milihnya, tetapi kalau matematika saya selesaikan sampai tuntas sehingga betul semua hingga akhirnya saya diterima jadi mahasiswa,” celutuknya.

Kabalibang SDM Kominfo melanjutkan, pada zaman ia dulu, komputer dianggap sebagai barang yang termutakhir, sehingga kala itu bisa dibilang hanya segelintir orang yang menguasai bidang IT. “Yang mengerti coding

bisa dihitung, akhirnya saya memutuskan untuk masuk dan mempelajari dunia itu (komputer, red). Terus kemudian, teknologi berkembang lagi ke dunia *mobile communication*. Waktu itu, orang kan senangnya pakai HP, akhirnya saya menggeluti dunia ini. Nah, riset doktor (S3) saya itu ya bidangnya *mobile communication*, hobinya ya kayak gitu. Jadi, sesuatu yang dianggap mutakhir dan kompleks, itu saya terobsesi masuk ke sana untuk mendalami sampai bisa paham secara detil," paparnya.

Oleh karena itu, hal penting yang perlu diterapkan dalam bekerja menurut Kabalitbang SDM Hary ialah menciptakan terobosan dengan berinovasi. Dalam bekerja, ia memiliki prinsip untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya.

"Saat masih bekerja di BPPT, saya terobsesi untuk bekerja tidak biasa-biasa saja, dengan anggaran yang terbatas ingin menjadikan jaringan internet BPPT mempunyai *bandwith* yang besar agar pegawai nyaman, saat diserahkan tanggungjawab sebagai pengelola jaringan komputer di BPPT," tegasnya.

Kabalitbang SDM Hary menyontohkan, salah satu inovasi yang pernah dibuatnya adalah men-desain ruangan perpustakaan di BPPT dari konvensional menjadi perpustakaan dengan konsep *digital library*.

"Jadi, orang berdiri di depan layar TV untuk pilih menu informasi perpustakaan, hanya dengan menggerakkan tangan tidak perlu menyentuh *display*-nya. Jika di kondisi seperti COVID-19 saat ini, tentu hal ini sangat dibutuhkan. Nah, *digital library* saya dulu di BPPT sudah seperti itu sehingga orang melihatnya ini merupakan teknologi yang termutakhir dan unik. Saya melihat perpustakaan di BPPT mulai sepi pengunjung, kemudian saya memutuskan untuk membuat *digital library*. Perpustakaan Nasional saja sampai bertanya, *digital library* itu seperti apa? Kebetulan, unit kerja Perpustakaan di bawah saya. Saya buat suasananya serba digital, ada display untuk akses informasi buku digital sehingga orang enggak perlu mengetik. Dari jauh gerakan tangan, menggunakan teknologi *virtual reality* seperti main *game*," terangnya.

Kabandan Litbang Hary mengaku hal ini terinspirasi dari sebuah permainan *Game Kinect Xbox 360*. "Ini kan ada *game*, dengan sensor mekanik misalnya orang main *game golf*, hanya dengan menggerak tangan nanti tongkat golfinya akan bergerak di layar. Teknologi pada Kinect ini bisa dibedah, kebetulan saya punya mahasiswa, dia menginginkan saya jadi pembimbingnya. Lantas, saya tantang kepadanya "kamu bisa enggak membedah teknologi kinect kebetulan



saya punya development kit nya, agar tidak perlu gunakan mouse dan keyboard serta Computer, hanya TV display yg besar untuk akses *digital library*," jelas Kabandan Litbang Kominfo.

Konsistensi dan minat yang serius pada bidang teknologi mendorong Hary melakukan terobosan lain ketika bergabung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di sana, ia membuat suatu perubahan yang berbeda dengan sebelumnya. Dulu, kata dia, suatu progress penanganan perkara korupsi di KPK awalnya ditangani secara manual, namun kini sudah bisa diakses secara *online* lewat *dash board system*.

"Ketika pimpinan menanyakan perkara ini misalnya, tidak ada yang tahu. Kadang-kadang perkara itu berhenti tak ada seorang pun yang tahu, maka saya ubah dengan menggunakan sistem informasi penanganan perkara. Jadi, mulai orang lapor tindak pidana korupsi langsung pakai aplikasi, sehingga bisa dicek tindak lanjut dan progressnya, kemudian ketika masuk tahap penyelidikan dan penyidikan laporan Tipikor tadi, tervisualisasi dalam dashboard pimpinan. Misalnya, perkara ini sudah sampai mana, perkara ini sudah ditangani sekian bulan, maka pimpinan bisa mengetahuinya perkara mana yang berhenti sehingga bisa memanggil penyelidikannya untuk diinterogasi mengapa perkaranya bisa berhenti. Nah, saya rubah itu sehingga sekarang sudah digitalisasi semua," jelasnya.

Sebagai Deputy Data dan Informasi yang memiliki kewenangan membuat kebijakan tatakelola data dan informasi, perubahan lain yang dibawa Hary terhadap kemajuan KPK diantaranya dengan membuat aplikasi layanan elektronik untuk surat disposisi bagi internal KPK dengan gunakan aplikasi SIKD dari ANRI yang dimodifikasi. Hal ini dimaksudkan Hary guna mengikis kesenjangan

teknologi antar pegawai dan sekaligus sebagai bentuk efisiensi penghematan kertas.

“Jadi, sebelumnya pegawai di KPK itu agak gagap teknologi juga, karena mereka memiliki latar pekerjaan dari penegak hukum. Akhirnya, selaku Deputy Data dan Informasi punya kebijakan, saya minta semua pejabat KPK gunakan disposisi elektronik,” ujar Hary mengisahkan.

Namun begitu, upaya Hary tersebut tak berjalan mulus. Sejumlah kritikan dan rasa kesal dilontarkan kepadanya dari para pegawai yang kurang memahami teknologi. Meski demikian, hal itu tak menjadi penghalang baginya untuk menuangkan idenya berkreasi.

“Wah, yang gaptak, marah-marah ke saya tetapi kebetulan pimpinan saya (Pak Agus Rahardjo) sangat *concern* terhadap digital. Beliau yang menggagas sistem pengadaan elektronik, dan menginstruksikan kepada saya untuk meneruskan terobosan tersebut. Enggak apa-apa Pak Hary, orang marah biarkan saja. Saya yang bertanggung jawab, saya yang akan menegur. Jadi, teruskan saja inovasi itu,” ucap hary sembari mengingat kembali pesan pimpinannya.



## Perjalanan Karir

Bicara mengenai profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kabalitbang SDM Kominfo menceritakan tentang perjalanan kisahnya sebagai seorang abdi negara. Sebelum didapuk sebagai Kabadan Litbang SDM Kominfo, ia pernah menjabat sebagai CIO di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di sana Hary pernah menjadi peneliti dan perekayasa.

“Saya, kan lulus kuliah S1 tahun 1990, kemudian masuk ke BPPT itu pada tahun 1992. Kemudian, selama 4 tahun sampai 1996, saya mengerjakan proyek pemantauan lingkungan laut bekerja sama dengan Norwegia. Selanjutnya, pada tahun 1996 s.d 1998 saya memutuskan untuk menimba ilmu pasca sarjana di Universitas Indonesia (UI) melakukan penelitian tentang kecerdasan artifisial untuk pengenalan aroma agar bisa menambah kompetensi di bidang ilmu komputer. Lalu, di tahun 1999, lanjut ke program doctor di Tokyo Institute Technology (TIT), Jepang,” paparnya.

Hary menceritakan, perjalanan karirnya sebagai PNS bermula saat ditugaskan di Direktorat Teknologi Lingkungan.

“Background saya komputer, lantas ini apa hubungannya? Ternyata, teknologi lingkungan itu perlu banyak aplikasi komputer karena

## Ternyata, lingkungan itu perlu komputer karena waktu itu kita diminta untuk menganalisis pencemaran laut yang disebabkan adanya minyak tumpah...

waktu itu kita diminta untuk menganalisis pencemaran laut yang disebabkan adanya tumpahan minyak dan pertumbuhan Algae secara liar, sehingga menyebabkan adanya ribuan ikan mati diteluk Jakarta. Ini kenapa? Kan enggak mungkin kita nongkrong di laut selama 24 jam, makanya perlu teknologi informasi dan komunikasi,” tuturnya.

Dijelaskan Hary, penggunaan teknologi sensor lingkungan harus dikembangkan karena secara kebetulan ada bantuan dari Norwegia, salah satu negara maritim yang sudah terbiasa dengan penelitian dibidang kelautan.

“Jadi, dipasang sensor di laut, untuk memantau parameter lingkungan kondisi laut, kemudian dikirim ke satelit. Dari satelit kita terima datanya, lalu kita analisis. Itu awal mulanya saya melakukan riset untuk pemodelan lingkungan laut. Jadi, saya bisa juga memodelkan secara simulasi digital misalnya pemantauan polusi udara, ada jalan tol dibangun di sini, bisa kita simulasikan pencemaran sampai mana saja, rumah-rumah mana yang terdampak pencemaran udara ini, itu saya simulasikan dengan menggunakan data dari sensor termasuk tentang pencemaran laut tadi. Jadi saya bisa mendeteksi kapan terjadi ribuan ikan mati lagi, maka nelayan harus siap-siap, pemerintah harus segera melakukan pencegahan itu. Meskipun saya bukan ahli lingkungan maka dengan kompetensi bidang TIK, saya

berperan banyak di situ,” urai Kabalitbang SDM Kominfo.

Kabadan Litbang Hary mengisahkan, suatu ketika, saat dirinya melakukan riset tentang kecerdasan artifisial di fasikom UI, secara kebetulan kampus tersebut mendapatkan tawaran dari industri Martha Tilaar (minyak wangi). Di saat bersamaan, ucap Hary, dirinya mendapat tawaran dari dosen pembimbingnya untuk melakukan penelitian tentang pengenalan aroma dengan kecerdasan artifisial.

“Kala itu, industri minyak wangi mengeluh, Pak, saya itu kan harus menciptakan suatu minyak wangi yang betul-betul disukai sama orang supaya ini bisa dibeli dan khas, tester kami itu kadang-kadang sakit. Jadi, kalau sakit seperti pilek dia enggak bisa mencium aromanya. Terus, bagaimana penyelesaiannya? Dosen pembimbing saya bilang “kamu mau enggak meneliti bagaimana komputer itu bisa mengenali beragam aroma sehingga bisa diketahui jenis baunya seperti jeruk, mawar, bunga kenanga, dan sebagainya”. Saya ambil riset itu, ternyata riset itu harus pakai sensor juga,” ungkapny.

Berbekal pengalaman kerjanya di Direktorat Teknologi Lingkungan BPPT, membuat Hary memahami metodologi penelitian untuk menyelesaikan permasalahan industri minyak wangi itu.

“Bagaimana sensor ini mendapatkan data, maka minyak wanginya harus dibakar dulu, kemudian asapnya nempel di sensor akan menurunkan nilai frekuensinya. Sehingga saya dapat data penurunan frekuensinya, lalu datanya diinputkan pada model *machine learning* sehingga akhirnya komputer bisa mengenali aroma minyak wangi tadi. Akhirnya, saya berhasil menyelesaikan riset itu, saya kirim hasilnya ke jurnal ilmiah internasional dan diterima, dari penilaian reviewernya termasuk riset yang berkualitas,” tuturnya.

Kabandan Litbang Hary melanjutkan, setelah menamatkan kuliah S2 ia lantas dihubungi oleh seorang professor yang pernah saya mintain jurnal hasil risetnya yang temanya mirip tapi gunakan algoritma kecerdasan artifisial yang berbeda.

“Professor tersebut ada di Jepang, kemudian ia tertarik bahwa saya mendapatkan hasil yang lebih bagus tingkat pengenalan aromanya. Lalu, professor itu kontak saya, dan menawarkan untuk melanjutkan S3 di Tokyo Institute Technology. Kebetulan, perguruan itu sangat terkenal di negeri Sakura,” paparnya.

Mendapat tawaran demikian, Kabandan Litbang Hary lantas meminta pertimbangan dosen pembimbing dan atasannya. Keduanya memberikan surat rekomendasi, selanjutnya dirinya memutuskan menerima tawaran

professor itu untuk melanjutkan studi S3 ke Jepang.

Keputusan ini merupakan momen penting baginya, untuk pergi ke negara yang dikenal dengan kisah legendaris Ninja Samurai demi menggapai cita-cita yang diimpikannya sejak masa kanak-kanak untuk mendalami pengetahuan mengenai teknologi, tapi ia dihadapkan dengan kabar yang tak mengesankan. Menjelang hari-H keberangkatannya, Hary mendapat informasi bahwa profesor tersebut tidak bisa menjadi pembimbingnya dikarenakan adanya peraturan baru di sana.

“Saya tanya, kenapa? Ia jawab, peraturan baru itu, untuk professor yang menjelang pensiun tidak boleh menjadi pembimbing. Terus saya bagaimana nanti di sana? Bisa-bisa terlantar. “Oh, kamu jangan khawatir, karena saya punya kenalan professor muda hanya saja bidangnya telekomunikasi, bukan bidang yang kamu lakukan penelitian sebelumnya”. Lantas ia bertanya, bagaimana kamu? Ya, saya jawab namanya sudah pamitan dan syukuran dengan orang sekampung masa ditarik lagi. Akhirnya saya jawab, “oke enggak apa-apa, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan S3 tersebut, kemudian saya berangkat menghadap profesor itu, waktu itu bulan april 1999,” ucap Hary di sela-sela perbincangan, seraya mengulang ingatannya ketika hendak berangkat melanjutkan studi S3 ke negeri Sakura.

1 April 1999 untuk meraih gelar doktor. Di Jepang, saya lakukan riset di bidang *mobile communication* menggunakan perangkat *super computer* untuk mempercepat algoritma pengenalan sinyal di frekuensi 1 Giga pada MIMO antenna,” tuturnya.

Di zaman itu, lanjutnya, *handphone* saja belum ada di Indonesia. Sementara di Jepang waktu itu sudah maju karena perangkat HP sudah dipasarkan untuk *mobile communication*.

“Di Indonesia waktu itu belum dikenal tentang teknologi *mobile communication*, masih gunakan *teknologi fixed-line communication*. Kemudian, professor muda itu menawarkan penelitian pemodelan propagasi gelombang untuk *mobile communication* di laboraturimnya, dia bilang bahwa murid-muridnya itu jurusan telekomunikasi dan tidak ada yang jurusan komputer. Saya tanya, terus bagaimana? Ya, sudah tidak apa-apa belajar telekomunikasi kamu dan jadi asisten dosen, bantu saya ngajar, kata professor itu. Terus, akhirnya saya masuklah menjadi kandidat doktor di situ,” ungkap Kabandan Litbang Hary.

Kabandan Litbang Hary menuturkan, “ketika itu ada kasus di Stasiun Tokyo, di mana pada saat orang-orang keluar dari kereta api secara bersamaan dan sinyal ponsel seluruhnya ngedrop sehingga mengalami kendala dalam berkomunikasi, padahal daya untuk field strengthnya di transmitter sudah dinaikan. Orang-orang itu enggak akan bisa telepon, sinyalnya ngedrop semuanya, saya diminta untuk melakukan penelitian dengan memonitor perjalanan sinyal dari transmitter sampai diterima oleh HP. Saya disuruh nebak arah datangnya sinyalnya datang dari yang sini atau sana, sinyal itu tidak kelihatan. Kalau di S2 kan saya juga diminta nebak bau, yang ini juga enggak kelihatan. Waduh, dalam hati saya berkata ini risetnya selalu hal yang tidak kasat mata berarti “ahli ghaib”.

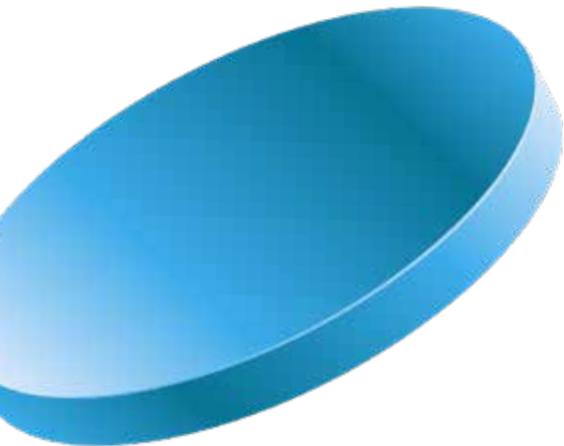
“Begitulah tema penelitiannya, akhirnya bisa lulus dan saya menjadi paham cara membuat microstrip array antenna dan teknologi MIMO. Teknologi ini sekarang dipakai diperangkat HP, sehingga HP bisa menerima sinyal dari manapun tanpa Hpnnya di bolak-balik,” tandasnya.

Waktunya tiba, setelah resmi menyandang gelar doktor, Hary memutuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan karirnya di BPPT lagi. “Biasanya kalau di BPPT kalau kita enggak sekolah ya tidak akan bisa kita naik karir, kita menjadi eselon III atau IV terus. Karena saya doktor akhirnya saya dipercaya untuk memimpin pusat penelitian dan pengembangan khusus di Bidang Teknologi



## Kembangkan Teknologi Mobile Communication

Kabalitbang SDM Hary menuturkan, “Saya lulus S2 sekitar September 1998, kemudian selama 6 bulan belajar bahasa Jepang dan berangkat ke Jepang itu persis



Informasi dan Komunikasi. “Di Jepang, saya menyelesaikan studi total 5 tahun jadi 1 tahun di Kenkyusei dan 4 tahun di program doktor, akhirnya september 2004 saya balik ke Indonesia,” ungkapnya.



### Bantu Beri Masukan Tentang Standar TV Digital Kepada Kominfo

Setibanya di Indonesia, Hary kembali melakukan riset. Kali ini, penelitiannya bertepatan dengan momentum migrasi ke penyiaran TV Digital pada tahun 2007. “Saya melakukan riset dan membuat buku serta membantu untuk menentukan standar teknologi penyiaran TV digital di Indonesia, saya juga lakukan riset untuk membuat Set Top Box (STB) nya yang dilengkapi dengan Early Warning System untuk kebencanaan, bekerja sama dengan ITS, dan Polytron sebagai industrinya, dan akhirnya di tahun 2010, saya diangkat menjadi eselon II di BPPT,” kata Hary.

“Jangan gunakan standar Jepang, karena dipakai hanya di Jepang dan sebagian negara Amerika Latin, dan juga jangan pakai standar Amerika yang pakai cuma negara Amerika dan Kanada. Begitu juga dengan standar China, hanya di negara China yang pakai. Ya, akhirnya Kementerian Kominfo mengeluarkan kebijakan standar teknologi penyiaran TV digital dari Eropa yaitu DVB-T yang digunakan di banyak negara,” ucap Hary.

Selanjutnya, Kabalitbang SDM Hary melakukan riset tentang Set Top Box untuk teknologi penyiaran TV Digital interaktif ada 2 standar waktu itu yang terkenal yaitu MHP

dan MHEG. “Akhirnya, saya bikin buku tentang teknologi penyiaran TV Digital lalu saya titipkan ke Gramedia untuk dijual agar semua orang bisa membaca dan mengerti tentang teknologi penyiaran TV Digital,” jelasnya.

Setelah selesai melakukan riset teknologi penyiaran TV Digital Terrestrial, lanjut Hary, di saat bersamaan Ketua KPK saat itu, Abraham Samad mengirimkan surat ke Kepala BPPT untuk meminta calon kandidat deputi bidang Data dan Informasi dari BPPT. Saya dikirim dari BPPT, di situ ada dua belas orang calon dari berbagai lembaga, di-test akhirnya saya yang dipilih. Akhirnya kegiatan riset saya untuk teknologi Informasi dan komunikasi di BPPT berhenti, jadi di sana saya menduduki jabatan eselon I sebagai Deputi Informasi dan Data,” ucap Hary.

Karena sudah bergabung dengan KPK, Hary memutuskan untuk melakukan riset yang lain. “Jadi, saya ingin melakukan riset tentang data analytic dengan BIG data dari sosial media dan laporan layanan publik dari Ombudsman, karena jeleknya layanan publik disuatu lembaga merupakan titik asal mulanya diduga adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara.



Maka hasil dari data analytic ini akan digunakan untuk membantu menentukan program pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan di daerah-daerah.

Dalam perbincangan, Hary menyampaikan selama 4 tahun merintis karir di KPK, baru kali ini tahun 2018, ia mendapat pemberitahuan dari bagian biro SDM BPPT. "Bagian SDM BPPT bilang, Pak ini ada aturan baru tentang fungsional perekayasa, apa yang kita lakukan selama 4 tahun ini bisa kita nilaikan. Ada peluang pak Hary bisa menjadi perekayasa ahli utama. Lalu saya berpikir, ini kesempatan untuk naik jabatan fungsional perekayasa dari madya ke utama, tidak semua orang bisa melakukan hal itu," terang Hary.

"Semua berkas persyaratan penilaian dan laporan hasil perekayasa teknologi informasi dan komunikasi selama di KPK saya kumpulkan, saya masukkan ke tim penilai fungsional yang ada di BPPT, akhirnya saya bisa masuk ke fungsional perekayasa ahli utama. Berdasarkan UU Sinas IPTEK No 11 tahun 2019, para peneliti, dan perekayasa usia pensiunnya disamakan dengan fungsional dosen untuk guru besar, pensiunnya 70 tahun. Saya dirayu sama orang bagian SDM-nya BPPT, sudah saja pindah ke fungsional dulu sementara pak, kan sudah lama di strukturalnya, balik saja dulu pak, cerita Hary.



## Susun Penulisan Buku Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial

Pada bulan Mei 2019, Hary dilantik sebagai perekayasa ahli utama maka secara resmi Hary bekerja kembali di BPPT, dan menjadi tenaga ahli bidang TIK untuk Kepala BPPT. "Selama tahun 2019 sampai dengan 2020 diberi tugas untuk menyusun dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial dan memimpin 100 orang pokja dari berbagai instansi pemerintah, akademi, industri dan komunitas di bidang kecerdasan artifisial", jelas Hary.

Kabandan Litbang Hary mengatakan, dalam menyusun stranas tersebut ia

diberi batas waktu pengerjaan sampai dengan bulan Agustus 2020, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Namun, karena kegigihannya, mandat yang diterimanya sejak Desember 2019 itu berhasil diselesaikannya tepat waktu.

"Waktu itu, sejak bulan pebruari 2020, Covid-19 melanda Indonesia yang membuat segala aktivitas dibatasi termasuk kegiatan rapat, tidak diperbolehkan dengan alasan untuk menghindari kerumunan. Akhirnya, saya menyusun penulisan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial dengan rapat secara online," ungkap Hary.

Menjawab pertanyaan tentang kendala apa yang dihadapi saat membuat penulisan stranas itu, Kabandan Litbang Hary menyampaikan tantangannya adalah dulu ketika mengadakan rapat secara offline untuk membahas Strategi Nasional, pesertanya sedikit yang datang untuk menghadiri rapat.

"Adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan rapatnya online dan ternyata membantu banget. Peserta yang tadinya enggak pernah datang di dalam rapat, itu datang semua sehingga membantu percepatan penyelesaiannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kabalitbang SDM Hary menjelaskan dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial yang disusunnya membahas tentang arah kebijakan nasional bagi lembaga pemerintahan dan swasta serta industri yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi Kecerdasan Artifisial.

Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial telah diserahkan pada bapak Wakil Presiden oleh Bapak Menteri Riset dan Teknologi pada 10 Agustus 2020 pada perayaan hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Dokumen stranas ini telah di-launching oleh Presiden Joko Widodo pada pelaksanaan AI Summit yang dilaksanakan secara Internasional pada

bulan Nopember 2020. "Saya membuatnya selama 6 bulan, kemudian saya perbaiki lagi dan berhasil mengelat AI Summit secara internasional. Jadi, akhir tahun lalu pada AI summit sudah di-launching oleh Pak Presiden," tuturnya.

Kemudian, pada Desember 2020 tepatnya tanggal 23, dirinya resmi dilantik menjadi Kepala Balitbang SDM Kominfo.

"Selama ini, saya juga sering berinteraktif dengan teman-teman di Kominfo, dengan Pak Ismail, dan Pak Semmy, saat di KPK berkomunikasi dengan pak Ramli untuk membahas UU Penyadapan, ya kenal baik karena memang ada hubungan kerjanya. Teman-teman dari Balitbang SDM pun, saya juga banyak yang kenal, karena sering berhubungan kerja dengan penelitian di bidang telekomunikasi, penyiaran TV digital dan Aptika, saya sering dipanggil sebagai narasumber. Di STMM Yogyakarta, zamannya penyusunan standar Penyiaran TV digital di 2007 juga begitu, waktu itu Pak Naryo yang jadi pimpinan di sana dan saya sering diundang ke sana dan saya sering diundang ke sana untuk membantu sosialisasi dalam penyusunan kurikulum pengajaran kalau migrasi ke penyiaran TV digital. Ya, sudah 10-12 tahun yang lalu dan pada saat dilantik ada sebagian orang yang mengenal "oh ini dulu bapak yang watu itu bla bla bla".

Istilahnya, situasi dan kondisi itu saya sudah mengenal sih Kominfo. Jadi, dalam melakukan aktivitas saat ini kendalanya enggak terlalu banyak,"Jadi, apa sebetulnya pekerjaan yang ada di Balitbang SDM, saya sudah mengerti, maka dari itu saya memberanikan diri melamar posisi tersebut," tutupnya.

# Mengenal Balitbang SDM Kominfo, Satker dengan Tupoksi di Bidang Penelitian dan Pengembangan Sektor Komunikasi Informatika



Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan satu dari delapan unit satuan kerja yang berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Balitbang SDM Kominfo mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.

Mengutip struktur organisasi pada laman resmi [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), saat ini Badan Litbang SDM Kominfo memiliki kepala baru yaitu Hary Budiarto yang resmi dilantik menjadi Kepala Badan Litbang SDM, menggantikan Basuki Yusuf Iskandar, pada Rabu (23/12/2020) di hadapan Menkominfo, Johnny G. Plate.

Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Hary sebagai Kabalitbang SDM Kominfo, dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 200/TBA Tahun 2020 Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan

informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika, serta pelaksanaan administrasi badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kominfo.



## Sekretariat Badan Litbang SDM

Mengutip dari Portal Civitas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dikomandoi Haryati yang telah bergabung di Kominfo sejak Maret 1989. Lahir pada tanggal 02 Mei 1963, Haryati yang bergelar S2 saat ini berpangkat sebagai Pembina Utama Madya IV/D.

Menyoal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat Badan Litbang sebagaimana tercantum pada PerMen Kominfo Nomor 6 Tahun 2018, mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan layanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan, pengendalian program dan anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi serta hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan



## Struktur Organisasi

Balitbang SDM Kominfo terdiri dari lima satuan kerja dan sepuluh unit pelaksana teknis. Satker Badan Litbang meliputi Sekretariat Balitbang SDM, Puslitbang SDPPI, Puslitbang Aptika dan IKP, Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Sebagai salah satu ujung tombak Kementerian Kominfo dalam menghubungkan ekosistem komunikasi dan informatika di daerah, Balitbang SDM memiliki dua Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP) yang berada di dua lokasi, Medan dan Makassar. Kemudian, adapula BPSDMP yang berada di enam kota yakni Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Manado, Surabaya, Yogyakarta. Lalu ada juga Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPTIK).

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dijabat oleh Haryati sebagai Sekretaris Balitbang. Kedua, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang saat ini diemban oleh Bonnie M. T. WAHID. Selain menjabat sebagai Kapuslitbang SDPPI, Bonnie

juga ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik. Jabatan yang dikenal dengan sebutan Plt ini diembannya mulai 01 Juli 2020 s.d 31 Desember 2021. Untuk posisi Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, diisi Hedi M. Idris. Untuk posisi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipercayakan kepada Usuluddin.

Noor Iza yang sebelumnya menjabat Plt. Kepala Biro Humas pada periode Agustus 2016 hingga agustus 2018, dipercaya mengisi posisi Ketua Sekolah Tinggi Multi Media, Badan Litbang SDM. Kepala Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika untuk wilayah Medan diamanatkan kepada Irbar Samekto. Djunaidy Aspan menjabat sebagai PLT. Kepala Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP) Makassar. Untuk BPSDMP Kominfo Jakarta dipimpin Parulian Sitompul, BPSDMP Bandung dipimpin Betty Djuliaty, Kepala BPSDMP Kominfo Banjarmasin kini diisi Pelaksana Tugas, Agus Budiman, Kassubag TU, hingga ada Kepala definitif yang ditentukan selanjutnya. BPSDMP Manado dikepalai Christiany Juditha, Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Surabaya dijabat Eka Handayani, dan untuk BPSDMP Yogyakarta dikepalai Zulkurnain.

kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia, komunikasi, dan informatika; pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; serta pengelolaan urusan tata usaha, kerumahtangaan dan perlengkapan, serta dokumentasi, publikasi dan perpustakaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia," tulis Pasal 638 pada permen tersebut.

Pada pasal 639, disebutkan bahwa Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas empat bagian yang meliputi Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian dan Organisasi, serta Bagian Umum.



### Puslitbang SDPPI & PPI

Bonnie M. T. Wahid yang menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika.

Dikutip dari Pasal 657 PerMen Kominfo 6/2018, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Puslitbang SDPPI) bertugas dalam menyelenggarakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di

bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika; penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika; serta pelaksanaan administrasi pusat.

"Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika terdiri atas tiga Sub Bidang, yakni Bidang Penyelenggaraan Penelitian; Bidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil; dan Subbagian Tata Usaha," bunyi Pasal 658 PerMen Kominfo 6/2018





## Puslitbang Aptika dan IKP

Selain menjabat sebagai Pulitbang SDPPI, Bonnie juga dipercaya menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik. Jabatan itu diamanatkan kepadanya sejak 01 Juli 2020 s/d 31 December 2021. Bonnie yang merupakan tamatan S2 dengan gelar Magister Teknik (M.T), bergabung di Kementerian Kominfo pada bulan Maret 1989. Lahir pada tanggal 12 Februari 1963, sebagai PNS Kominfo, Bonnie saat ini berpangkat Pembina Utama Madya Pembina Utama Madya IV/D.

Dalam memimpin Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik, Bonnie diberi tanggung jawab melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas: Bidang Penyelenggaraan Penelitian; Bidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil; dan Subbagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik; penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu.

“Serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik, dan pelaksanaan administrasi pusat,” jelas bunyi Pasal 659.



## Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi

Berkaitan dengan Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, dipimpin oleh Hedi M. Idris selaku KaPus Proserti. Melansir informasi yang tertera di laman Portal Civitas Kominfo, Hedi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di dalam Instansi. Lahir pada tanggal 22 Januari 1965, Hedi resmi menyandang status sebagai abdi negara terhitung sejak Maret 1990 dan saat ini berpangkat Pembina Utama Madya IV/D.

Sebagai KaPus Proserti, Hedi bertugas memimpin satuan kerjanya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan evaluasi, dan pelaporan pengembangan profesi dan sertifikasi bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 680 pada PerMen Kominfo 6/2018, Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sistem sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika; penyiapan pelaksanaan standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

“Selain itu, mengerjakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis di bidang komunikasi dan informatika; serta pelaksanaan administrasi pusat,” terang isi pasal 680 dalam permen itu.

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 682, Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi terdiri atas empat Sub Bidang, yakni Bidang Standardisasi Kompetensi; Bidang Pengembangan Profesi; Bidang Pengembangan Sertifikasi; dan Subbagian Tata Usaha.





## Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya, untuk jabatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kominfo dijabat Usuluddin. Selain sebagai lulusan Sarjana hukum, ia juga menyandang gelar Magister Manajemen. Lahir pada tanggal 10 Juni 1961, Kapusdiklat terhitung aktif sebagai PNS sejak Maret 1990 dan kini berpangkat Pembina Utama Madya IV/D.

Pusdiklat Kominfo adalah salah satu Unit Organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kemkominfo. Tugas dan Fungsi Pusdiklat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tanggal 19 Juli 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada pasal 696 disebutkan pusdiklat memiliki tugas dalam melaksanakan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional.

Berkaitan dengan fungsi, pada pasal 697, dikatakan bahwa Pusdiklat Kominfo diberikan kewenangan dalam hal Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan

fungsional; Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional; serta Pelaksanaan administrasi pusat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: Bagian Tata Usaha; Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajerial; Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Sertifikasi Teknis; dan Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Sertifikasi Fungsional.



## Sekolah Tinggi Multi Media

Tak hanya itu, Badan Litbang SDM juga memiliki Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta (STMM "MMTC" Yogyakarta) merupakan sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang berada di lingkungan Kementerian Kominfo.

Keberadaan STMM "MMTC" Yogyakarta diawali pada tahun 1985 dengan nama Diklat Ahli Multi Media yang berada di bawah Departemen Penerangan dan diresmikan oleh Presiden RI kala itu Soeharto, tepatnya pada tanggal 31 Juli 1985. Diklat Ahli Multi Media mendidik mahasiswa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil perwakilan dari RRI dan TVRI seluruh Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan zaman Diklat Ahli Multi Media mengepakkan sayapnya, dan pada tahun 2001 mulai membuka penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari PNS Pemerintah Daerah dan masyarakat umum lulusan SLTA.

Setelah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan, akhirnya pada tanggal 21 April 2014 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media. Mengingat Sekolah Tinggi Multi Media berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI maka sebagai tindak lanjut terbitnya Perpres tersebut, kemudian diterbitkanlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media dan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media sebagai dasar operasional penyelenggaraan pendidikan pada STMM.

Sampai saat ini Sekolah Tinggi Multi Media menyelenggarakan program pendidikan Diploma IV dan Starta I dengan 3 jurusan yaitu Penyiaran yang terdiri dari 3 program studi jenjang Diploma IV yakni Manajemen Produksi Siaran (Manaprodsi), Manajemen Produksi Pemberitaan (Manarita) dan Manajemen Teknik Studio Produksi (Matekstosi), jurusan Animasi dan Desain Teknologi Permainan, terdiri dari 2 program

studi jenjang Diploma IV yakni program studi Animasi dan program studi Desain Teknologi Permainan dan Jurusan Komunikasi Informatika Publik (KIP) dengan 1 program studi jenjang Strata I yakni Manajemen Informasi dan Komunikasi (MIK).

Selain menyelenggarakan pendidikan formal, STMM juga mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta, lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat umum. Kerjasama yang dijalankan adalah berupa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan tingkat lanjut (S2, S3), penyelenggaraan diklat-diklat teknis dan penyewaan fasilitas.

Sesuai dengan visi Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Multi Media terbaik di Indonesia dan bertaraf Internasional, STMM bertekad untuk mencetak tenaga-tenaga ahli dan profesional yang handal dan siap berkompetisi di bidang Komunikasi dan Informatika (Penyiaran dan Multimedia) dan mengembangkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dalam menjamin mutu pendidikannya, penyelenggaraan STMM juga melibatkan para tokoh masyarakat yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu yang diselenggarakan di STMM. Sebagaimana tertuang dalam statuta STMM, dimana penyelenggaraan Sekolah Tinggi ini dilengkapi dengan Dewan Penyantun yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Haryono Suyono sebagai Wakil Ketua. Sedangkan Anggota Dewan Penyantun STMM lainnya adalah Garin Nugroho, Ishadi, Hary Budiarto dan Wiendu Nuryanti.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, STMM diharapkan menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat mewujudkan visinya untuk menjadi pusat pendidikan tinggi terbaik di Indonesia dan bertaraf Internasional.

Diketuai Noor Iza, STMM Yogyakarta kini mengusung misi untuk menghasilkan tenaga profesional, inovatif, kreatif dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang penyiaran dan multi media, Melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan, Menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, Membangun dan mempertahankan etika dan moral akademik dalam semangat kebhinekaan

Sebagai Ketua STMM Yogyakarta, terhitung mulai Februari 1994, Noor Iza merintis sebagai PNS di Kominfo. Lahir di Kudus pada 08 Agustus 1968, ia menapaki karir pertama di Medan Merdeka Barat 9 sebagai Manager for Informatics Regulation di Direktorat Postal (kini SDPPI) pada April 2003 s.d Maret 2007. Selang dua tahun kemudian, dirinya menduduki posisi Manager for Telecommunications Network di Direktorat yang sama. Kemudian, pada April 2009 hingga Juni 2017 berpindah tugas ke Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Ditjen Aptika) Di sana, ia menjabat sebagai Deputy Director for e-Business Technology and Infrastructure, Director for Negative Internet Content Handling, Program Director for The Digital Energy of Asia Program, dan Program Director untuk 1000 Startup Digital.

Sebagai seorang PNS di Kominfo, kini Ketua STMM Yogyakarta Noor Iza berpangkat Pembina Utama Muda IV/C. Sementara itu, berkaitan dengan pendidikan formal, dirinya merupakan lulusan S2 Vanderbilt University dengan gelar Master of Science (M.Sc) dan sebelumnya berhasil menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah Prodi Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan menyandang gelar Sarjana Teknik (S.T).



## BBPSDMP dan BPSDMP

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika atau BPPKI tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/06/2008 Tanggal 4 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPPKI adalah Unit Pelaksana Teknis yang merupakan integrasi dari Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dan Lembaga Informasi Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara jo Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2008, status kelembagaan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika.



BPPKI yang berganti nama menjadi BBPSDMP, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian serta pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja.

Landasan Hukum kelembagaan BPPKI adalah sebagai berikut;

1. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI
3. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI Nomor 15 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M. KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/PER/M. KOMINFO/6/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17/PER/M. KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Melalui Peraturan Menkominfo Nomor 19/2017 tentang struktur organisasi dan tata kerja, BBPSDMP Kominfo memiliki cakupan wilayah kerja yang

tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Badan litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun tugas BBPSDMP Kominfo adalah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan.

Melansir laman [bbpsdmp-medan.kominfo.go.id](http://bbpsdmp-medan.kominfo.go.id), BBPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertuang dalam DRAFT II PM Kominfo No. 19 Tahun 2017, BBPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi

dalam penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran; menyiapkan pelaksanaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; menyiapkan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika; menyiapkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; menyiapkan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika; menyiapkan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian bidang komunikasi dan informatika; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, dokumentasi dan pengelolaan barang milik negara.





## Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK

Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) yang dahulu bernama Korea – Indonesia (Korina) ICT Training Center adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) adalah Unit Pelaksana Teknis Balitbang SDM yang berada dibawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pembangunan BPPTIK sendiri didasarkan pada Record of Discussions Between Koica Of The Republic of Korea And The Ministry of Communication and Information Technology of The Government of The Republic of Indonesia on The Project For The Establishment of A Korea-Indonesia ICT Training Center, yang ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2007 dan juga Persetujuan Menteri Keuangan tentang Grant dengan Register Nomor : 70751901 Tanggal 14 Juli 2008.

Berdasarkan pada dua keputusan tersebut, KOICA memberikan bantuan dalam bentuk grant US\$ 8.900.000 yang diimplementasikan pada proyek selama 2 tahun (2007 – 2009). Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 7 Mei 2007 oleh Muhammad Nuh (pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kominfo) dan Duta Besar Korea saat itu Mr. Kim Hoyoung. Pembangunan berlangsung selama 2 tahun dan serah terima gedung dari KOICA ke Pemerintah Indonesia/Balitbang SDM KemKominfo dilakukan pada Juli 2009. Pada tanggal 31 Mei 2011, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring meresmikan fasilitas negara ini untuk dipergunakan dan dimanfaatkan secara luas bagi industri dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan serta pelatihan dalam lingkup Teknologi Informasi dan Komunikasi. BPPTIK bertanggung jawab langsung dibawah satuan kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian

Kominfo yang dikepalai oleh Aizirman Djuan. Gedung beserta sebagian besar peralatan di BPPTIK merupakan hibah dari KOICA (Korean International Cooperation Agency) yang merupakan badan resmi dari Korea untuk misi bantuan dan kerjasama bagi negara-negara berkembang.

Adapun tujuan dan sasaran pelaksanaan dari BPPTIK, diantaranya membangun kapasitas SDM TIK Indonesia dan meningkatkan industri TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui pembangunan Korea – Indonesia ICT Training Center, berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan digital dan meningkatkan aksesibilitas Indonesia melalui transfer pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan TIK di Korea, serta memperkuat hubungan dan kerjasama TIK diantara dua negara melalui implementasi proyek yang sukses.

Sasaran:

1. Tersedianya fasilitas pusat pelatihan TIK untuk pekerja TIK (Vocational ICT Training Center for ICT workers).
2. Tersedianya model program pelatihan teknologi informasi sesuai standar Internasional.
3. Tersedianya SDM TIK yang tersertifikasi, dibutuhkan oleh dunia bisnis, pemerintahan dan organisasi non pemerintahan (NGO) dalam dan luar negeri.

BPPTIK mempunyai fokus pelaksanaan pelatihan serta uji kompetensi dan sertifikasi pada 9 lingkup bidang TIK; Information Technology Basic, Database,

Networking, Programming, Multimedia and Animation, Operating System, CAD, Software Engineering, serta Graphics Design.

Menutip laman bpptik.kominfo.go.id, selain 9 fokus pelatihan diatas, BPPTIK juga menerima permintaan pelatihan aplikasi/aplikasi lain disesuaikan dengan kebutuhan yang diminati perusahaan/instansi terkait. Program ini dinamakan Tailor-Made Training Program, dimana BPPTIK mengadakan program training sesuai dengan requirement/permintaan keahlian-keahlian yang ingin diajarkan guna mengembangkan kualitas pekerja instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPTIK Kominfo memiliki visi menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terbaik di tingkat nasional, regional, dan internasional. Sedangkan misi BPPTIK adalah melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di bidang TIK yang independen dan profesional; serta menjamin mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan standar yang berlaku.





# Lewat DEA-DTS 2021, Kominfo Latih Milenial Jadi Pengusaha Digital

Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pelatihan daring **Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Program Digital Talent Scholarship (DTS) 2021** untuk mendorong kewirausahaan digital. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Hary Budiarto menyatakan lewat pelatihan untuk Kementerian Kominfo menargetkan dapat mencetak pengusaha digital dari kalangan milenial.

"Ini akademi untuk kewirausahaan digital, kita menginginkan peserta akademi ini bisa menjadi pengusaha digital. Pengusaha yang mampu memanfaatkan secara optimal media digital dengan menggunakan teknologi mutakhir," jelasnya dalam Kumpul Talenta Digital: Jadi Wirausaha Online dari DTS, dari Jakarta, Selasa (16/03/2021).

Kepala Badan Litbang SDM mengungkap saat ini jumlah pengusaha di Indonesia masih di kisaran 3,47% jumlah penduduk. Padahal, jika dibandingkan

dengan negara maju, proporsi pengusaha bisa sampai 10% s.d. 14% dari jumlah penduduk. "(Indonesia) sangat sedikit sekali, hanya sekitar 3,5% dari jumlah penduduk sebanyak 266 juta. Kalau di negara maju bisa sampai 10% sampai 14%," jelasnya.

Oleh karena itu, Hary Budiarto mengharapkan melalui DEA dalam Program DTS 2021 ini akan muncul pengusaha digital, terutama dari kalangan milenial. **"Kita mengharapkan pengusaha baru terutama dari para milenial yang ada di Indonesia,"** harapnya.

Mengutip data Indeks Kewirausahaan Global dari Global Entrepreneurship Development Institute, Kepala Badan Litbang SDM menyebutkan saat ini Indonesia berada pada posisi 75 dari 137 negara dengan nilai yang bagus. "Harusnya kita naik lebih tinggi. Dan dibandingkan tahun 2018, posisi Indonesia saat ini sudah lebih bagus," tandasnya.

Peluang usaha digital, menurut Hary Budiarto akan makin meningkat di masa pandemi.

Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 masyarakat lebih banyak menggunakan perangkat digital. "Di masa pandemi, semua orang banyak diam di rumah, maka peluang untuk membangun usaha digital, karena tidak mengalami penurunan," jelasnya.

Menurut Kepala Badan Litbang SDM, Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan kewirausahaan digital. "Setelah kita teliti, usaha digital di Indonesia bisa meningkat sampai 50% di masa pandemi. Ini potensi yang bisa kita raih dan pertumbuhannya bagus. Dan untuk meningkatkan lebih besar lagi kita menyiapkan talenta digital," paparnya.

Apalagi, di tengah keragaman kearifan lokal masyarakat Indonesia, menurut Hary Budiarto banyak potensi yang bisa dikembangkan dengan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan. "Saya melihat dari daerah ada banyak kearifan lokal, banyak sekali potensi yang bisa menggunakan media digital," tegasnya.



Kepala Badan Litbang SDM menyontohkan kearifan lokal yang bisa dikembangkan mulai dari kuliner hingga pariwisata. "Banyak kuliner Indonesia yang bisa dikemas, contohnya kopi bagaimana dikemas agar bisa meningkatkan produksi dan penjualan. Belum lagi dunia pariwisata yang bisa dijalankan dengan media digital," ungkapnya.

Hary Budiarto mendorong pelatihan ini bisa diikuti oleh semua masyarakat agar bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui media digital. "Kita sekarang melihat, 90% produk di marketplace adalah produk impor. Nah, bagaimana caranya agar produk lokal bisa bersaing. Untuk kualitas produk Indonesia tidak kalah. Namun bagaimana memperkuat jaringan dan logistik, bagaimana mengemas produk dan bisa menguasai teknologi *marketplace* agar bisa menopang ekonomi digital," tuturnya.

Kepala Badan Litbang SDM mengharapkan pelatihan ini dapat mendorong produk Indonesia

makin mendunia. Oleh karena itu, ia mengharapkan agar peserta pelatihan agar menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan dalam DEA-DTS 2021. "Saya mengharapkan peserta pelatihan bisa menularkan ilmunya kepada saudara, tetangga, dan *networking* agar semua bisa menjadi lebih maju, bisa menularkan kepada saudara, tetangga dan *networking*-nya bisa menjadi yang diharapkan supaya bisa lebih maju. Saya berharap peserta bisa sukses dan bersama kita menguasai dunia digital," ungkapnya.

Dalam Kumpul Talenta Digital itu, Hary Budiarto menjelaskan lewat Program DTS 2021, Kementerian Kominfo menyiapkan pelatihan untuk beberapa akademi.

"Vocational Graduate Academy (VGA) dan Fresh Graduate Academy (FGA) untuk mencetak teman-teman lulusan lembaga pendidikan agar memiliki sertifikat kemampuan teknologi digital. Thematic Academy (TA) untuk masyarakat dan buruh migran. Ada pula Profesional Academy untuk para profesional agar

meningkatkan kompetensinya," jelasnya.

Peningkatan kompetensi SDM TIK yang sesuai dengan kebutuhan industri dalam Program DTS ini dilakukan melalui pelatihan dan/ atau sertifikasi dengan mitra penyelenggara termasuk global tech companies di antaranya Amazon, Cisco, Facebook, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Progate, Red Hat, serta mitra lokal di bidang *edutech*.

"Ada juga Talent Scouting Academy, itu untuk mereka yang punya bakat potensi sehingga mereka bisa menguasai dunia teknologi sebagaimana diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi," ungkap Kepala Badan Litbang SDM.

Dalam Program DTS 2021, juga terdapat akademi yang dapat diikuti oleh Aparatus Sipil Negara (ASN). "Ada pelatihan untuk meningkatkan pelayanan publik, Government Transformation Academy untuk ASN agar bisa menggunakan teknologi digital lebih baik," jelasnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya meningkatkan kompetensi para tenaga kerja Indonesia pada bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui penyelenggaraan Professional Academy Digital Talent Scholarship (DTS) 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM menyediakan beasiswa pelatihan bagi profesional untuk meningkatkan daya saing dan menyiapkan alih kompetensi di sektor ekonomi digital.

"Pada era industri 4.0 daya saing dan kemampuan profesional kita perlu untuk ditingkatkan. Tujuannya untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja terampil di bidang TIK yang lebih adaptif dan produktif sesuai dengan kebutuhan industri dan mampu bersaing baik di pasar domestik terlebih di internasional," ujar Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto dalam Pembukaan PRO Academy Batch 1 yang berlangsung daring dari Jakarta, Rabu (17/03/2021).

Secara keseluruhan, PRO Academy akan melatih 24.000 orang pada tahun ini. Untuk batch pertama ini yang mendaftar sebanyak 18.827 orang dan yang diterima sebanyak 12.100 orang. "Kami mengharapkan dari seluruh peserta yang diterima ini bisa memanfaatkan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan bisa seoptimal mungkin untuk mengikuti sertifikasi dan bisa lulus," ungkap Hari Budiarto.

Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo menyatakan penyelenggaraan program DTS 2021 merupakan upaya Kementerian Kominfo menjalankan arahan Presiden Joko Widodo agar Indonesia memiliki talenta digital dan mampu berkompetisi secara global. "Pak Jokowi waktu itu menyebutkan di Istana bahwa memasuki era digital, mari kita menguasai dunia dengan menggunakan talenta digital," ungkapnya.

# PRO Academy DTS 2021, Bekali Talenta Digital Profesional Agar Siap Bersaing



**DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP**

1. Kementerian Kominfo berperan sebagai fasilitator dan akselerator untuk pengembangan SDM di bidang TIK.
2. Digital Talent Scholarship dimaksudkan untuk mempersiapkan daya saing bangsa dan melindungi tenaga kerja dalam rangka menghadapi industri 4.0.
3. Program DTS berbentuk pelatihan dan/atau sertifikasi dengan mitra penyelenggara, global technology company, dan mitra lokal di bidang edutech.
4. Target tahun 2021 sebanyak 100.000 talenta digital.

The diagram shows a central circle 'Beasiswa Digital Talent Scholarship' connected to four surrounding circles: 'Mempersiapkan tenaga digital yang siap bersaing pada tingkat global', 'Meningkatkan kemampuan untuk menghadapi industri 4.0', 'Meningkatkan kemampuan untuk menghadapi industri 4.0', and 'Meningkatkan kemampuan untuk menghadapi industri 4.0'.



Menurut Hary Budiarto, saat ini Indonesia membutuhkan sekurangnya sembilan juta talenta digital. "Indonesia bisa menguasai dunia tapi jumlah tenaga profesionalnya harusnya 1% dari jumlah penduduk, atau 2,5 juta sampai 3 juta orang profesional," ungkapnya.

program penyediaan beasiswa untuk talenta digital di sini bukan kita memberikan beasiswa berupa uang tetapi tetap berikan pengetahuan kita memberikan pelatihan ya kemudian sertifikasi itu perlu biaya kita bantu biayanya dan sebagainya," jelasnya.

Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo menyatakan pelatihan untuk profesional sangat diperlukan, karena saat ini Indonesia tengah menjalani era industri 4.0 dan akan memasuki masyarakat 5.0. Dua tahapan itu akan membutuhkan talenta yang memiliki kemampuan untuk melakukan *data analysis*, menguasai *augmented reality*, *cyber security*, *artificial intelligence*, hingga *internet of things*.

Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo menjelaskan, perubahan nama Online Academy menjadi Profesional Academy ditujukan untuk menyesuaikan dengan target sasaran peserta pelatihan yakni masyarakat yang sedang bekerja dan yang pernah bekerja.

"Jika pelatihan ini bisa diikuti 4 ribu profesional, kita masih punya pekerjaan rumah untuk sekitar 800 kali lagi. Dan tahun ini kita menargetkan bisa mencetak 100 ribu talenta digital," jelasnya.

Menurut Hary Budiarto, Program DTS merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi talenta digital. "Jadi



## Optimasi Ekonomi Digital

Hary Budiarto mengungkap potensi dan peluang akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, kebutuhan talenta digital untuk industri 4.0 kini lebih dilipatgandakan dengan adanya pandemi. "Ini didorong lagi dengan adanya pandemi, untuk bisa memulihkan ekonomi hanya ada dua sektor yang bisa membantu, yang pertama adalah sektor digital maka kita namakan sebagai ekonomi digital dan sektor yang kedua adalah pariwisata," ungkapnya.

Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo menyatakan di sektor ekonomi digital, salah satu yang diupayakan Kementerian Kominfo dengan melatih pelaku UMKM agar bisa masuk ke pasar digital. Selain itu juga, mendorong pekerja yang mengalami PHK bisa berwirausaha digital.

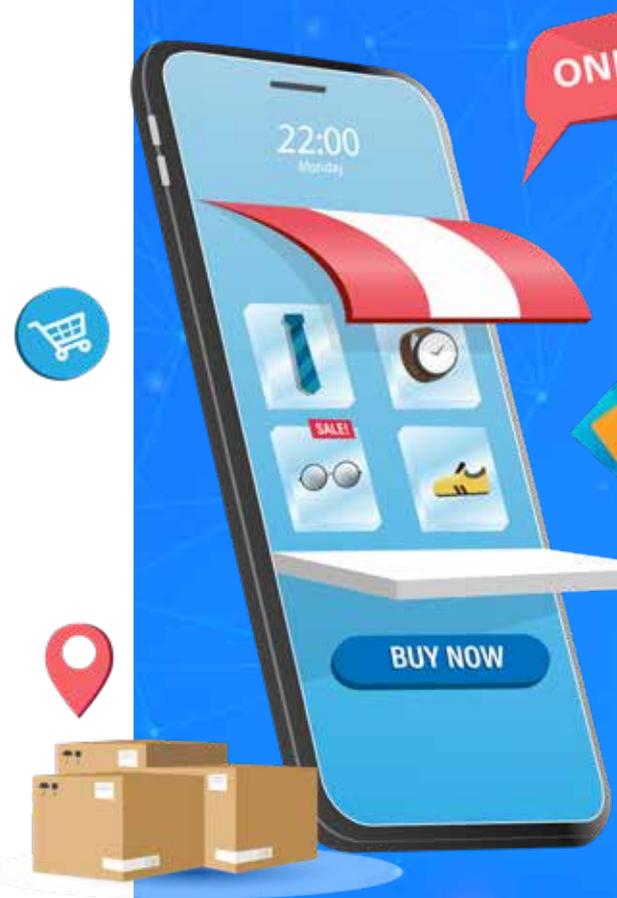
"Kalau sektor digital tadi tentunya adalah ekonomi harus segera disiapkan jadi para UMKM yang ada itu harus masuk segera kepada pasar. Kemudian kita mendapatkan data bulan Agustus 2020 ya, ada sekitar 29,2 juta penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, mereka itu bisa di-PHK karena industrinya tidak jalan. kemudian juga mereka bisa itu maksudnya gantian kerjanya kerjanya pergantian seminggu sekali kerja dan sebagainya atau pakan yang betul-betul hiburan atau atau betul-betul mereka tidak bisa bekerja jadi ini ada banyak sekali yang harus kita lakukan pe-er-nya," paparnya.

Menurut Hary Budiarto, sejalan dengan upaya Kementerian Kominfo untuk mempercepat transformasi digital, fokus yang dilakukan saat ini dengan meningkatkan kemampuan talenta digital.

**"Kita harus segera melakukan transformasi digital. Mari kita bersama-sama untuk bisa meningkatkan talentanya jadi kalau bisa meningkatkan talenta digital mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang berbasis ICT."**

Program DTS 2021 berlangsung dalam bentuk pelatihan dan/ atau sertifikasi dengan mitra penyelenggara termasuk *global tech companies* di antaranya Amazon, Cisco, Facebook, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Progate, Red Hat, serta mitra lokal di bidang *edutech*. DTS dipetakan dalam 7 (tujuh) akademi, yaitu: Fresh Graduate Academy, Vocational School Graduate Academy, Government Transformation Academy, Digital Entrepreneurship Academy, Thematic Academy, Talent Scouting Academy, dan Professional Academy (sebelumnya Online Academy) dengan target lebih dari 100.000 talenta yang akan diberikan fasilitas beasiswa pelatihan intensif dan program sertifikasi.

Selain Kepala Badan Litbang SDM, pembukaan Profesional Academy juga dihadiri oleh perwakilan mitra penyelenggara antara lain Adri Gautama (Cisco), Narenda Wicaksono (Dicoding), Norman Ganto (Progate), David Wijaya (Red Hat) dan Yovita Suriyanto (DQLab).





# Kumpul Talenta Digital: “Jadi Wirausaha Online Bareng DTS”

Keynote Speech

Pembicara

Alumni Peserta DEA DTS 2020



**Hary Budiarta**  
Kepala Balitbang SDM  
Kemkominfo



**Riza Azmi**  
Ketua Pojko DEA DTS 2021



**Lanny Wijaya**  
LinkedIn Talent &  
Learning Specialist



**Fastabiqul Khoirot**  
Owner Fasta Bakery



**Enno**  
Owner Ayam Suwir Endless

Moderator

Host

Live ▶ YouTube & Instagram



**Bobby Virgiladono**



**Renata Octaviani**

▶ **Selasa, 16 Maret 2021**  
Mulai 13.30 WIB

▶ Pendaftaran melalui  
[kominfo/daftarDEADTS2021](https://kominfo/daftarDEADTS2021)

**#JadiJagoanDigital**

**Giveaway Alert!**

Official Merchandise DTS 2021



@kemkominfo



@kemenkominfo



Kemkominfo TV



## Alumni DTS 2019

“

“Ngga nyesel ikut ini. Ilmu baru & teman baru, serta tantangan di akhir yang membuatku.. Wah ini *perfect* sih.. cara pembimbing ngajar juga bagus sekali. #garagaraDTS saya jadi bisa ngembangin web sendiri. *Thank you.*”

**Paulinus Lambert Subiantoro**

Vocational School Graduate Academy  
Tema pelatihan: Junior Web Programming

“

“Bela-belain *resign* kerja biar bisa ikut DTS *full time*, dan memang worth it! Ilmu baru dengan mentor yang super keren membawa saya membuka dunia IOT tanpa khawatir salah langkah. *Thank you* DTS, superb! #garagaraDTS.”

**Rayi**

Fresh Graduate Academy  
Tema pelatihan: Internet of Things (IOT)



“

“Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan DTS OA Python saya bisa lebih *fluent* dengan bahasa pemrograman Python. Dan pelatihan ini telah membantu saya dalam *project* penelitian bersama dosen saya, hingga dipercaya dosen untuk menulis *paper* jurnal internasional.. Terima kasih DTS #garagaraDTS.”

**Moch. Chamdani Mustaqim**

Online Academy (OA)  
Tema pelatihan: Python


 “Setelah mengikuti DEA Gojek, kesannya pikiran menjadi lebih terbuka mengenai arah dan strategi bisnis kedepannya. Pelatihan DEA bermanfaat, karena banyak informasi yang didapatkan yang sebelumnya tidak diketahui.”

**Maulyta**

Digital Entrepreneurship Academy (DEA)

“Kesan saya selama mengikuti Program DTS ini sangat menyenangkan dan berjalan dengan baik, materi yang disampaikan oleh instruktur mudah dipahami dan dapat dilakukan praktek secara langsung.”

**Alex Pranata**

Fresh Graduate Academy

“Kesan saya mengikuti program DTS 2020 ini banyak memberikan manfaat terutama untuk saya, yang dimana masih *beginner* tentang web. dengan mengikuti program DTS ini, saya mengasah keterampilan saya dan mendapatkan ilmu baru. Terimakasih DTS 2020.”

**Chafidhoturrochimah**

Vocational School Graduate Academy

★★★★★  
**Alumni DTS 2020**



## Alumni DTS 2020

“

“Sangat berkesan, bisa tetap berkegiatan positif di masa pandemi, gratis pula, dan dengan pemateri/mitra pelatihan yang *well-known*.”

**Vina**

Online Academy

“

“Ini tahun kedua saya mengikuti program DTS dan saya mendapat banyak pengalaman menarik selama mengikuti pelatihan DTS ini, Saya juga bisa membaginya dengan murid saya ketika mereka belajar secara daring.”

**Chintalya Magdalena**

Online Academy





## Alumni DTS 2019

## Kisah Ronald, Berburu Ilmu Sampai “Negeri DTS 2019”



**M**inat tanpa semangat ibarat kendaraan bermotor tanpa bensin. Tapi, bagi Johannes Ronald Gollop (35), bekal semangat saja tak cukup. Untuk mengembangkan aplikasi antrian pasien RSUD Merauke, Ronald membutuhkan ilmu dan penguatan kompetensi melalui Program Digital Talent Scholarship 2019.

“Selama ini saya belajar otodidak. Tapi, saya bangga bisa tembus menjadi peserta DTS dan ternyata saya dapat banyak ilmu. Mungkin kedepannya saya bisa kembangkan lagi aplikasi ini,” ujar Ronald, peserta *Online Academy* dari ujung Timur Indonesia, Kota Merauke.

Awalnya Johannes Ronald Gollop mendaftar sebagai peserta pelatihan pemrograman bagi aparatur sipil negara di salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Cikarang. Namun, status sebagai pegawai honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke membuatnya belum lolos seleksi. Sebab, prasyarat utama pelatihan adalah PNS di lingkungan lembaga pemerintah.

Tapi Ronald tidak patah semangat. Ia terus belajar secara otodidak mengenai ilmu pemrograman berbasis Android. Tekadnya bulat untuk menyelesaikan aplikasi yang akan mempermudah warga Kabupaten Merauke saat berobat ke RSUD.

Berulang kali mencoba, Ronald belum percaya diri merilis aplikasi besutannya. Ketika ada informasi pembukaan pendaftaran Digital Talent Scholarship 2019



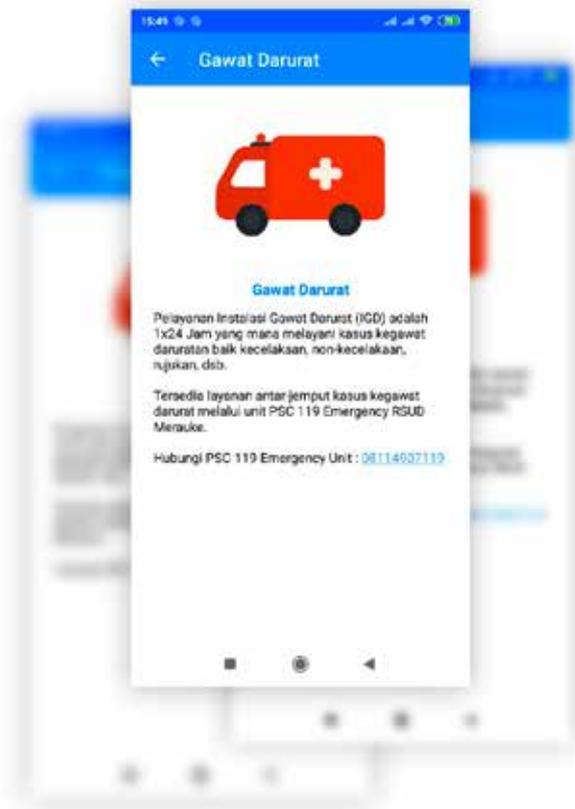
RONALD GOLLOP

untuk akademi kelas *online*, Ronald memantapkan diri menambah ilmu lagi soal pemrograman android. "Ketika jadi peserta DTS, saya bisa dapat ilmu sebagai programming-nya seperti gimana itu. Karena selama ini saya mungkin masih banyak salah, tidak sesuai teori yang sesuai, yang sebenarnya," tambah Ronald yang mengikuti kelas Android dengan mitra kerja Google.

## Terbiasa Belajar Online

Ronald adalah lulusan SMA Negeri 1 Merauke. Sejak tahun 2010 ia menjadi honorer di RSUD Merauke, dengan penempatan di bagian teknologi informasi spesialisasi jaringan dan perangkat keras. "Pernah coba daftar CPNS tapi kuota untuk lulusan SMA minim," kisahnya. Kadang, Ronald juga kerap diminta untuk membantu kawan dan kenalannya. "Paling kalau diminta bantuan benahi komputer teman atau kenalan, gitu aja," tuturnya.

Di sela waktu luang, Ronald menyempatkan diri untuk belajar mengenai pemrograman. "Saya belajar tentang IT itu otodidak. Saya biasanya belajar dari membaca referensi bacaan *online*," ungkapnya.



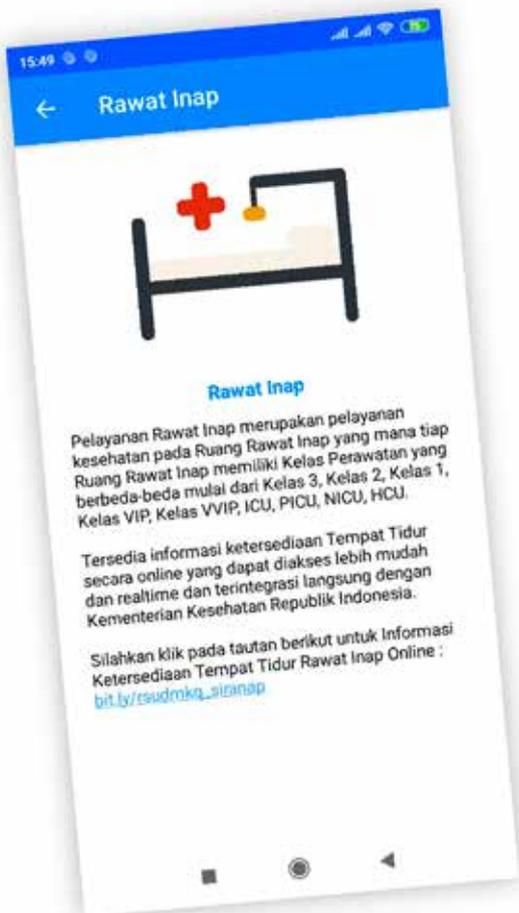
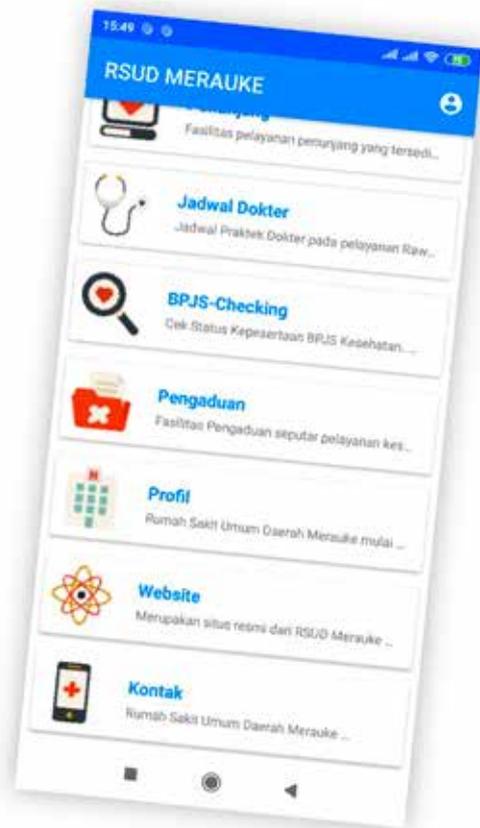
Yang menarik, Ronald selalu merasa tak cukup pengetahuan soal teknologi informasi. Pandangan itu membuatnya selalu ingin belajar dan belajar dari mana saja. Di tengah kesibukan kerja, Ronald meluangkan waktu untuk mengasah pengetahuan dan keahlian dalam Online Academy Digital Talent Scholarship 2019.

Program Online Academy ditargetkan untuk 13.000 peserta terpilih yang ingin meningkatkan keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo bekerja sama dengan perusahaan teknologi dunia seperti Amazon, Cisco, Google, dan Microsoft, serta Lembaga Administrasi Negara.

Ronald tercatat sebagai salah satu peserta keterampilan Android yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Dicoding, salah satu mitra Google di Indonesia. Ronald serius untuk menyelesaikan materi yang diakses secara *online* dengan tekun.

“Kelas pemula saya sudah lulus, saya dapat email dari DTS dikasih kelas *expert*. Nah kelas *expert*-nya juga sudah lulus, dikasih token Dicoding untuk menghadapi AAD-nya (Sertifikasi Google Associate Android Developer, red.). Sementara saya masih belajar bonus Android Jetpack Pro-nya,” kata Ronald yang sangat bersyukur atas kesempatan pelatihan gratis dari Kementerian Kominfo itu.

Selain materi wajib dari Google, Ronald juga mendapatkan bonus materi dari Dicoding sebagai mitra resmi Google. Sembari belajar, Ronald juga menyelesaikan konsep *prototype* aplikasi RSUD Merauke agar segera rampung dan dapat diluncurkan. “Waktu awal mulai pelatihan, saya mulai kembangkan *prototype*, konsep-konsep yang lama mau kembangkan lebih jauhnya kayak gimana. Dikit-dikit saya mulai cicil kembangkan kayak gitu. Jadi, sambil ngerjain tugas-tugas yang dikasih, saya juga kembangkan aplikasi,” tutur Ronald.



## Semangat Belajar

Bagi Ronald, saat ini tidak terpikir untuk pindah kerja dari RSUD Merauke. “Saya kelahiran Merauke. Kalau soal kepikiran pindah tugas jadi tim IT selain RSUD Merauke, belum pernah terpikirkan,” tegasnya.

Tampaknya dedikasi Ronald tidak diragukan lagi. Ia ingin menyelesaikan aplikasi yang digagas untuk memudahkan layanan RSUD Merauke itu. “Kalau ini yang *develop* saya, dan ini yang jadi *prototype* resmi dari RSUD Merauke dan belum dipublikasi di Play Store,” jelasnya mengenai target usai aplikasi ini tuntas dikembangkan.

Ronald mengakui kalau aplikasi yang dibuatnya masih butuh pengembangan. Bahkan Ronald menyatakan dirinya masih perlu menggali potensi dengan cara mengikuti program pelatihan dan *workshop* yang bisa diakses secara *online*.

“Saya berharap kedepannya saya masih bisa ikut pelatihan lagi. Saya itu mau mencari ilmunya saja. Kita kan di sini, jujur kalau saya itu jauh di sini, di Merauke jarang-jarang ada pelatihan seperti ini. Saya pengen belajar yang lebih jauh lagi gitu,” tuturnya. Harapan sederhana Ronald jadi bukti, bahwa semangat pun harus dilengkapi dengan kemauan untuk menambah ilmu dan mengembangkan diri agar bisa bermanfaat bagi sesama.\*

Alumni DTS 2020

# Usaha Tak Akan Mengkhianati Hasil

Setelah wisuda, Resy Annisa Dewi, lulusan strata-1 tahun 2019 mencari peruntungan demi mendapatkan pekerjaan tetap. Suatu ketika, ia mendapatkan panggilan *interview* dari sebuah perusahaan yang lokasinya cukup jauh dari domisili Resy, sehingga ia harus meminta orang tuanya menemaninya dalam perjalanan jauh tersebut.

Tak disangka ketika sudah hampir mencapai lokasi yang dituju, tiba-tiba ayah Resy mengalami sakit jantung. Namun ia tak bisa meninggalkan jadwal *interview* yang ditunggu-tunggu tersebut sehingga harus bergegas masuk ke ruang *interview*. Kehilangan fokus adalah satu hal yang dirasakan Resy saat itu. Dengan tanpa harapan, Resy keluar dari ruang *interview* penuh kekecewaan dan kekhawatiran.

Ternyata, setelah lebih dari seminggu Ayahanda Resy diduga terinfeksi virus corona. Semakin hari, keadaannya semakin memburuk. Hingga hari ketiga isolasi, Ayahanda Resy meninggal dunia dan seketika hidupnya terasa sangat hancur.

Namun, tiba-tiba nasib baik datang. Resy dinyatakan lolos ujian Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) CPNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan tahapan kedua dari rangkaian seleksi CPNS yang panjang.

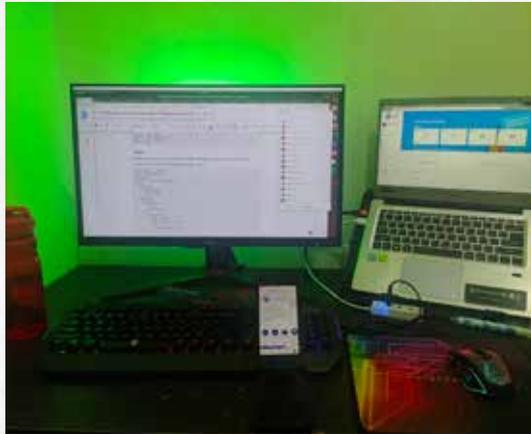
Situasi pandemi COVID-19 membuat tahapan seleksi yang panjang pun menjadi sedikit terhambat. Namun Resy tidak menyerah, ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan mempersiapkan diri menghadapi Seleksi Kemampuan Bidang (SKB). Hingga akhirnya, ia menemukan pelatihan Digital Talent Scholarship bagi lulusan S1 melalui *Fresh Graduate Academy*.

Sembari menunggu jadwal SKB, Resy pun tak mau berdiam diri saja, ia langsung mengikuti pelatihan *Fresh Graduate Academy (FGA)* dengan mengambil tema pelatihan *database engineer*, karena formasi yang ia ambil dalam seleksi CPNS adalah Analis Sistem Informasi. Selama 3 minggu berlatih secara intensif, Resy sangat yakin mengikuti ujian SKB yang akhirnya ia ikuti di akhir tahun 2020.

Resy pun tidak menyangka, apa yang ia pelajari selama mengikuti pelatihan di DTS masih terngiang di kepalanya, sehingga ia merasa percaya diri saat mengikuti ujian SKB.

Usaha memang tak bisa mengkhianati hasil. Resy akhirnya mendapatkan pengumuman bahwa ia lolos menjadi CPNS. Kebanggaan yang luar biasa ia rasakan terutama setelah harus menjalani hari-hari sedihnya setelah ditinggalkan Ayahanda. Setelah berhasil mendapatkan pekerjaan yang dinantikan, Resy pun mendapatkan kesempatan sertifikasi global dari Digital Talent Scholarship.

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”**  
**QS. Al-Insyirah ayat 5-6”**



### DTS 2019-2021 Online Academy

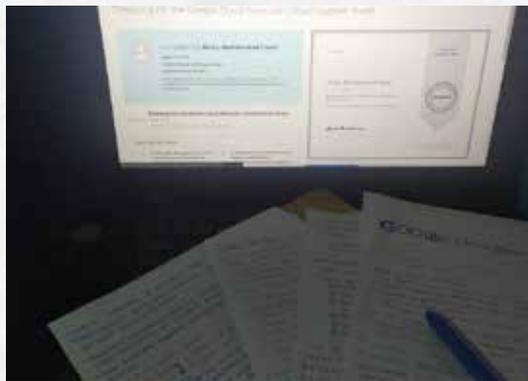
---

Salah satu peserta Online Academy tahun 2020 menangkap gambar saat melakukan pelatihan dengan tema OpenShift dari mitra pelatihan Redhat

### DTS 2019-2021 Mitra Pelatihan Google

---

Rizky Muhammad Fauzi, salah satu peserta Online Academy mengabadikan momen saat mempelajari tema pelatihan Associate Cloud Engineer dari mitra pelatihan Google.



### DTS 2019-2021 Gelar Wicara Virtual Ngorbit

---

Gelar Wicara Virtual Ngorbit, Ngobrol Digital Bareng Digital Talent Scholarship 2020 dari Aula Anantakupa, Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (06/10/2020).

**DTS 2019-2021  
Re-Launching SIMONAS**

Lathifa Al-Anshori Tenaga Ahli Menteri Kominfo sedang berbincang dengan salah satu narasumber dari mitra pasca pelatihan DTS 2020 dalam kegiatan Re-Launching Platform Job Portal SIMONAS, 15 Desember 2020 di Jakarta



**DTS 2019-2021  
Patuhi Protokol Kesehatan**

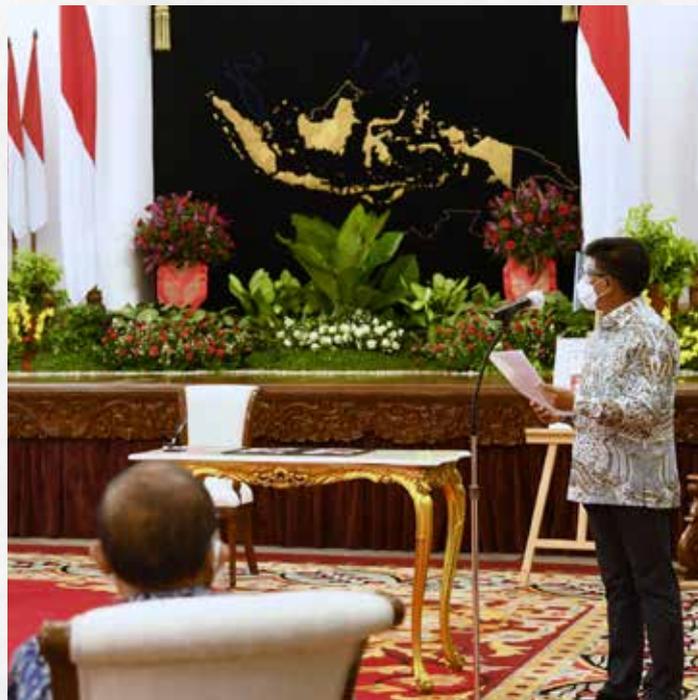
Meski di tengah pandemi COVID-19, BPPTIK tetap menggelar pelatihan Digital Talent Scholarship secara offline dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat

# Program Konektivitas Digital

## Laporan Menkominfo

---

Menteri Kominfo, Johnny G. Plate saat memberikan laporan dalam acara Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 Dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, di Istana Negara Jakarta



## Akselerator Transformasi Digital

---

Menteri Kominfo, Johnny G. Plate dalam laporannya menyatakan Program Strategis Konektivitas Digital ditujukan untuk menjadi akselerator transformasi dan reaktivator pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19



## Pulihkan Ekonomi Nasional

---

Menteri Koinfo mengatakan program-program ini tidak saja menjadi prasyarat bagi transformasi digital, tetapi juga menjadi akselerator bagi transformasi dan reaktivator untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi Covid-19



## Jalankan Program Strategis

---

Menteri Koinfo, Johnny G. Plate menyatakan sesuai arahan Presiden, Kementerian Koinfo menjalankan beberapa program strategis berupa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau talenta digital nasional



## Sambutan Presiden RI

---

Presiden RI, Joko Widodo memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, di Istana Negara Jakarta



## Konektivitas Fisik Hingga Digital

---

Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan untuk mewujudkan konektivitas nasional, Pemerintah tak hanya membangun konektivitas fisik tetapi juga konektivitas digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air

## Hubungkan Nusantara dengan Tol Langit

---

Pemerintah bekerja keras membangun konektivitas nasional selain melalui tol laut, jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit



## Apresiasi Presiden

---

Presiden RI saat Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, memberikan apresiasi kepada Kemkominfo yang telah menyelenggarakan berbagai program untuk membangun konektivitas & talenta digital

## Program Konektivitas Digital

---

Program-program untuk membangun konektivitas dan talenta digital di antaranya penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah SATRIA, pembangunan menara-menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital



## Prangko Seri Gerakan Vaksinasi COVID-19

---

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kominfo Johnny G. Plate melakukan penandatanganan Prangko Perdana Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19 dalam Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19

## Program Konektivitas Digital

---

Presiden Joko Widodo melakukan penandatanganan prangko Perdana Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19 dalam Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19





## Representasi Perangi COVID-19

---

Pembuatan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19 merupakan representasi Indonesia yang memerangi COVID-19 dengan vaksinasi secara nasional untuk mencapai kekebalan kelompok atau *herd imunity*



## Peluncuran Program Konektivitas Digital

---

Sekjen Kemkominfo, Mira Tayyiba (tengah depan) beserta jajarannya dan tamu/undangan turut menghadiri secara virtual acara Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 dari Ruang Anantakupa Kemkominfo, Jakarta



## Peluncuran Program Konektivitas Digital

---

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kominfo Johnny Plate beserta tamu/undangan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada acara Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 dari Istana Negara, Jakarta



### Program Konektivitas Digital

Tamu/undangan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada acara Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 yang diikuti secara virtual dari Ruang Anantakupa Kemkominfo, Jakarta



### Program Konektivitas Digital

Tamu/undangan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada acara Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 yang diikuti secara virtual dari Ruang Anantakupa Kemkominfo, Jakarta



## Program Konektivitas Digital

---

Suasana saat berlangsungnya acara Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 dari Istana Negara, Jakarta



## Program Konektivitas Digital

---

Suasana saat berlangsungnya acara Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 yang mengikuti secara virtual dari Ruang Anantakupa Kemkominfo, Jakarta. (AYH)



### Program Konektivitas Digital

Suasana saat berlangsungnya acara Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 yang mengikuti secara virtual dari Ruang Anantakupa Kemkominfo, Jakarta (AYH)

### Program Konektivitas Digital

Suasana saat berlangsungnya acara Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 yang mengikuti secara virtual dari Ruang Anantakupa Kemkominfo, Jakarta. (AYH)



# Jadi Wirausaha Online

*bersama*

## Digital Talent Scholarship

**K**ementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kembali mengadakan Digital Talent Scholarship (DTS) pada tahun 2021. DTS memberikan tujuh pelatihan *academy*, salah satunya adalah Digital Entrepreneurship Academy (DEA) yang memberikan pelatihan terkait seluk beluk dalam berwirausaha *online*.

Salah satu alumni peserta DEA yang juga pemilik usaha Fasta Bakery Fastabiqul Khoirot menceritakan bahwa beliau tertarik untuk mengikuti DTS 2020 karena ingin belajar terkait digital marketing. Fasta menjelaskan bahwa penjualan yang sepi dikarenakan pandemi COVID-19 membuat Fasta tertarik untuk mengikuti DTS 2020.

"Saya mengetahui informasi DTS 2020 melalui Instagram Kemenkominfo. Setelah mengikuti DTS 2020, saya langsung menerapkan ilmu yang diberikan dan tentunya saya sudah merasakan peningkatan omzet," jelas Fasta dalam Seminar Daring: Kumpul Talenta Digital "Jadi Wirausaha Online dari DTS," pada Selasa (21/03). Bisnis Fasta Bakery merupakan usaha keluarga yang sudah dijalankan sejak 2007 dengan sistem penjualan secara offline, sehingga terjadi banyak

penurunan omzet saat pandemi Covid-19. Maka dari itu, Fasta memutuskan untuk mulai mengadaptasi usaha secara digital

"Anak muda memiliki banyak kesempatan dan masih muda untuk mempelajari hal baru. Peluang usaha semakin banyak di depan mata, sehingga hal tersebut harus dimanfaatkan, serta tidak hanya belajar namun harus berani praktik," pungkask Fasta.

Dalam kesempatan yang sama, alumni peserta DEA lainnya yang juga merupakan pemilik usaha Ayam Suwir Endess, Enno menuturkan bahwa sebelumnya sudah sering melakukan pemasaran digital, akan tetapi berkeinginan belajar dari ahlinya untuk memvalidasi pemasaran digital yang dilakukan selama ini.

"Saya mengetahui informasi terkait DTS dari Instagram Kemenkominfo. Setelah mengikuti DTS 2020, saya melakukan penjualan melalui e-commerce dah hasilnya sangat baik. Konsumen dapat membeli barang walaupun pemasarannya hanya melalui foto," tutur Enno. Sejak awal membuka usaha, Enno melakukan berbagai survei pasar untuk melihat tren yang sedang berlangsung. Beberapa bulan setelah membuka usaha, mulai bermunculan kompetitor

yang menawarkan produk sejenis sehingga harus terus melakukan inovasi produk.

"Yang harus dilakukan adalah berpikir terbuka bahwa kompetitor pasti selalu ada di setiap melakukan usaha. Selain itu harus harus bisa bertahan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya dan terus melakukan inovasi produk," ujar Enno.

Awalnya, Enno memulai usaha dikarenakan sudah memiliki banyak ide sehingga ingin mengimplementasikan ide tersebut. Selain itu, Pandemi Covid-19 membuka peluang berwirausaha di bidang kuliner.

"Menjual ayam suwir juga memanfaatkan situasi pandemi di mana banyak masyarakat yang mobilitasnya terbatas sehingga tidak sempat berbelanja ke pasar. Ayam suwir juga menasar target mahasiswa dimana penjual makanan di Jogja banyak yang tutup sehingga dibutuhkan makanan yang tahan lama," tambah Enno.

Enno menambahkan wiraswasta harus memiliki pemikiran bahwa dalam berwirausaha produk yang kita jual wajib mudah dikenal dan mudah dijangkau orang banyak, sehingga sangat penting untuk melakukan pemasaran digital.



## Digital Entrepreneurship Academy DTS 2021

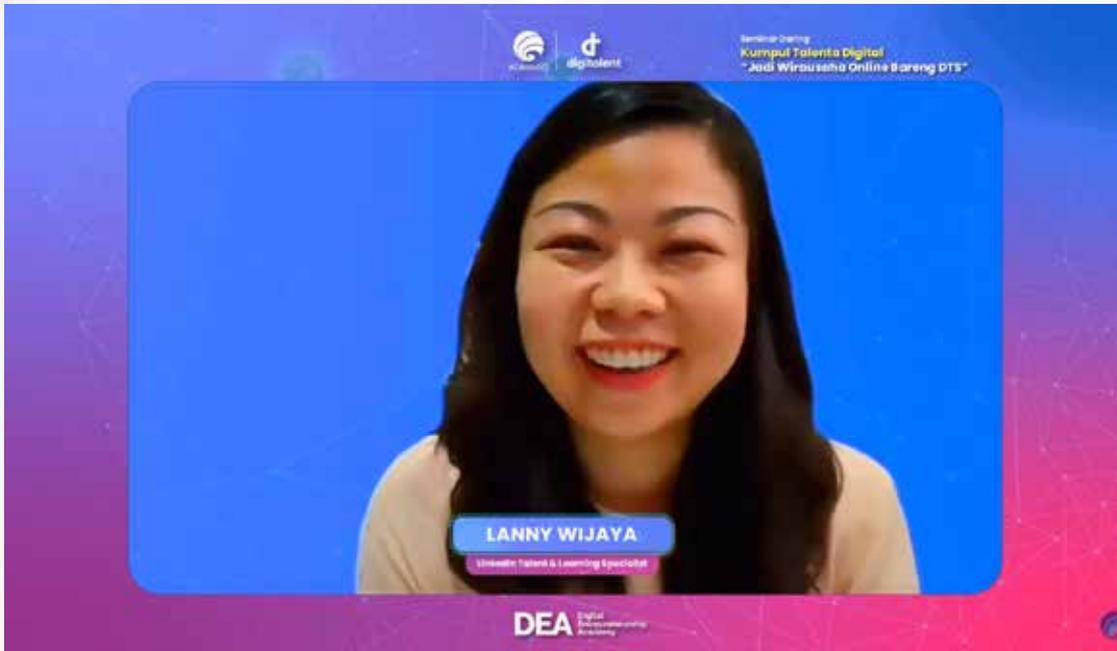
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) DEA 2021, Riza Azmi menuturkan bahwa DEA Academy memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan ekonomi digital Indonesia; membantu wirausaha menembus pasar luar negeri melalui platform digital; dan membuka lapangan pekerjaan karena pada saat pandemi sangat sedikit lowongan pekerjaan yang tersedia.

"Kementerian Kominfo membuka pelatihan digital untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara *offline* maupun *online*, sehingga diharapkan UMKM dapat mengelola usahanya dengan baik secara digital, mulai dari dari penjualan, pemasaran, maupun finansial," kata Riza.

DEA pada tahun ini menargetkan 22.000 peserta yang berasal dari wirausaha maupun masyarakat yang belum memiliki usaha. "Generasi milenial harus berani memulai melakukan inovasi dalam mengembangkan ekonomi digital. Generasi milenial juga harus mampu melakukan digitalisasi untuk menembus pasar global," ucap Riza.



**Masuk ke era digital kita harus buru-buru dalam mengubah pola penjualan, kalau tidak maka akan tergerus jaman. Apabila masih ragu, silahkan mencoba dulu untuk mendaftar DTS 2021."**



DEA pada tahun ini menargetkan 22.000 peserta yang berasal dari wirausaha maupun masyarakat yang belum memiliki usaha. "Generasi milenial harus berani memulai melakukan inovasi dalam mengembangkan ekonomi digital. Generasi milenial juga harus mampu melakukan digitalisasi untuk menembus pasar global," ucap Riza.

Kementerian Kominfo pun membentuk sebuah grup Facebook berisi alumni DEA yang memiliki kegiatan berjualan bersama setiap hari Jumat. Riza berharap dengan adanya kegiatan tersebut jejaring alumni akan lebih kuat dan bisa saling menguntungkan, baik dalam membagi ilmu maupun promosi produk

Dalam kesempatan Seminar Daring yang sama, salah satu narasumber lainnya yaitu Lanny Wijaya sebagai LinkedIn Talent & Learning Specialist mengatakan bahwa di situasi pandemi yang unik, wirausaha wajib untuk adaptasi dengan belajar pemasaran digital. Selain itu, dengan adanya digitalisasi maka wirausaha akan mudah meraih segmentasi pasar.

### Beberapa Langkah yang bisa dilakukan agar tetap update dengan pemasaran digital antara lain:

- Terbuka terhadap pengetahuan;
- Membuat konten agar orang tertarik membeli produk yang kita miliki;
- Memperlihatkan benefit dari produk yang kita hasilkan;
- Membangun jaringan distribusi melalui orang-orang terdekat yang tersebar di beberapa daerah.

"DTS merupakan sebuah kesempatan luar biasa di mana kita bisa berkembang Bersama. Sertifikasi dalam DTS pun dapat digunakan untuk mempromosikan diri lebih lagi," pungkas Lanny.

Seminar Daring "Kumpul Talenta Digital: Jadi Wirausaha Online Bareng DTS" diadakan pada Selasa, 16 Maret 2021 yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung di Youtube resmi Kemkominfo TV. Seminar Daring ini juga menghadirkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Harry Budiarto untuk memberikan sambutan.

The poster features a blue and purple background with a network of white lines. At the top left are the logos for KOMINFO and digitalent. At the top right is the logo for DEA Digital Entrepreneurship Academy. The main title is 'Seminar Daring Kumpul Talenta Digital: "Jadi Wirausaha Online Bareng DTS"'. Below the title, there are three categories of speakers: Keynote Speech, Pembicara, and Alumni Peserta DEA DTS 2020. Each category lists a speaker with a circular portrait and their name and title. At the bottom left, there are two hosts: Bobby Virgiandono and Renata Octaviani. At the bottom right, there is a red button for 'Live ▶ YouTube & Instagram', the date and time 'Selasa, 16 Maret 2021 Mulai 13.30 WIB', and the registration link 'Pendaftaran melalui komin.fo/daftarDEADTS2021'. At the very bottom, there is a blue banner with the hashtag '#JadiJagoanDigital' and a 'Giveaway Alert!' banner for 'Official Merchandise DTS 2021'.

**KOMINFO** | **digitalent** | **DEA** Digital Entrepreneurship Academy

Seminar Daring  
**Kumpul Talenta Digital:**  
**"Jadi Wirausaha Online Bareng DTS"**

**Keynote Speech**

**Pembicara**

**Alumni Peserta DEA DTS 2020**

**Moderator**

**Host**

**Live ▶ YouTube & Instagram**

**Selasa, 16 Maret 2021**  
**Mulai 13.30 WIB**

Pendaftaran melalui  
**komin.fo/daftarDEADTS2021**

**#JadiJagoanDigital**

**Giveaway Alert!**  
Official Merchandise DTS 2021

**Hary Budiarto**  
Kepala Balitbang SDM  
Kemkominfo

**Riza Azmi**  
Ketua Pokja DEA DTS 2021

**Lanny Wijaya**  
Linkedin Talent &  
Learning Specialist

**Fastabiqul Kholrot**  
Owner Fasta Bakery

**Enno Endang**  
Owner Ayam Suwir Endess

**Bobby Virgiandono**

**Renata Octaviani**



# Pengembangan Masyarakat Melalui DTS

Pertama kali dilaksanakan sebagai *pilot project* di tahun 2018, program beasiswa Digital Talent Scholarship telah berhasil menjaring ribuan talenta digital untuk meningkatkan kemampuan di bidang TIK dalam menghadapi tantangan industri 4.0. Kesuksesan ini tak lepas dari kerja keras dan kolaborasi tim DTS dalam memastikan pelatihan dapat berjalan dengan baik, termasuk kerja keras dalam menyosialisasikan program DTS ke berbagai lapisan masyarakat untuk menarik minat para talenta muda Indonesia. Adalah Eyla Alivia Maranny, Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Penelitian dan

Eyla |  
| Alivia  
Maranny

Pengembangan Aptika IKP, Balitbang SDM, yang memegang peran utama dalam Pokja Media dan Publikasi DTS. Selasa, 16 Februari 2021 lalu, tim KominfoNext berkesempatan berbincang dengan Eyla.

Awal keterlibatan Eyla dalam DTS dimulai sejak tahun 2019 sebagai Wakil Ketua Pokja Media dan Publikasi. "Dulu awalnya ditugaskan Pak Basuki yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Badan Litbang SDM. DTS dimulai akhir tahun 2018, tapi aku belum terlibat, belum ada pokja karena sifatnya masih *pilot project*. Tahun 2019, mulai dibuka untuk 25 ribu peserta yang dibagi ke dalam empat akademi, nah itu baru dibagi-bagi menjadi pokja. Kebetulan aku ditugaskan di pokja media dan publikasi sebagai wakil ketua pokja(wakapokja). Ketua pokjanya yaitu Pak Nando yang menjabat Plt Kepala Biro Humas yang memang kesehariannya bersinggungan dengan media dan publikasi," kata Eyla.

Selama menjabat sebagai wakapokja di tahun 2019, dan kemudian menjadi Ketua Pokja Media dan Publikasi di tahun 2020, Eyla bertanggung jawab untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan DTS ke masyarakat luas. "Tim di Pokja Media dan Publikasi ada 5-6 orang. Jadi benar-benar lebih ke bagaimana cara mencari peserta, cara menyosialisasikan kegiatan ini ke masyarakat baik *online* maupun *offline*, juga bagaimana caranya menjaring peserta sesuai dengan target pelatihan, membuat konferensi pers, bahan-bahan media sosial dan *website*, dan kebutuhan eksternal eksternal lainnya."

Eyla menambahkan bahwa sejak pandemi, sosialisasi sepenuhnya dilakukan secara *online*.

“

Sebelum pandemi, kami datang sosialisasi ke kampus-kampus, juga dengan pemerintah daerah dan sekolah setempat, namun saat pandemi ini, mostly semuanya *online*, ke media sosial, publikasi ke TV, wawancara, beriklan semua dilakukan secara *online*.



Dalam bincang santai siang itu, Eyla juga membagikan kisahnya selama tiga tahun bekerja dengan tim DTS. "Nano-nano lah, dari yang senang, berantem, stress, ngga tidur, kerja dikejar-kejar *deadline*. Karena ini memang banyak pihak yang terlibat, pasti kita nanti punya perbedaan pendapat. Kita (pokja media dan publikasi, red.) sampai bikin *behind the scene*, bener-bener di belakang layar, *hectic*-nya kaya gimana sih buat mewujudkan program DTS buat semua," terang Eyla.

Namun, menurut Eyla, kerja keras seluruh tim tersebut dilakukan dengan satu tujuan yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang program DTS di masyarakat seluruh Indonesia.



Karena kita juga pengennya ini kan bisa diterima oleh semua masyarakat, ngga cuma di daerah perkotaan aja, tapi sampai ke pelosok. Makanya kita sebanyak mungkin, bahkan bekerja sama dengan kampus sampai ke daerah. Kalau kemarin hampir sampai 90 (kerja sama dengan kampus, red.), 50 perguruan tinggi, 35-an politeknik.

## Ketua

### — Pokja FGA

Setelah dua tahun bertanggung jawab untuk bidang media dan publikasi, di tahun 2021 ini Eyla ditugaskan sebagai Ketua Pokja Fresh Graduate Academy. Secara singkat ia menjelaskan bahwa tujuan FGA yaitu untuk meningkatkan kemampuan para lulusan muda di bidang TIK.

"Fresh Graduate Academy ini diperuntukkan bagi fresh graduate yang benar-benar baru lulus belum bekerja, atau yang sudah bekerja 1-2 tahun trus dia berhenti lagi alias nganggur. Tujuannya untuk meningkatkan *skill/upskilling*. Mereka diberikan pelatihan TIK di bidang terbaru, dikasih juga sertifikasi yang sifatnya internasional atau global. Jadi mereka lebih siap lagi memasuki dunia kerja," papar Eyla.

Pelatihan-pelatihan TIK bidang terbaru yang disiapkan cukup beragam, mencakup kecerdasan artifisial, keamanan siber, hingga bahasa pemrograman. "Misalnya *data science*, AI, *machine learning*, IoT, *network engineer*, *cyber security*. Kemarin di tahun 2020 ada 7 tema pelatihan, di 2021 ini (kita, red.) sedang menginisiasi lebih dari 20 tema pelatihan, nanti ada *front end developer*, *cloud developer*. Kalau (pelatihan, red.) yang lama ada Java Programming, SQL, nanti ada C++, Phyton," jelasnya.

Terkait perkembangan FGA dari tahun ke tahun, Eyla menjelaskan bahwa penambahan signifikan terlihat jelas pada mitra kerja sama antara perguruan tinggi dan juga perusahaan teknologi global. Untuk perguruan tinggi, tahun 2018 DTS bekerja sama dengan 5 kampus, lalu meningkat di 2019 menjadi 25 kampus, dan di tahun 2020 meningkat dua kali lipat menjadi 50 kampus.

"*Global tech* pun begitu. Kita kerja sama dengan *global technology company*, seperti Microsoft, Google, Oracle, IBM, AWS (Amazon Web Services, red.), Red Hat. Nah, itu dulu hanya 5, sekarang jadi 10, kita sedang menginisiasi dengan 10 mitra *global tech*," jelasnya.

Tak hanya perusahaan global, DTS pun mulai menjajaki kerja sama dengan startup lokal di bidang pendidikan. "Sekarang kita juga membuka inisiasi dengan startup lokal di bidang *edutech*, jadi ngga hanya *global tech* tapi juga startup lokal yang kita dekati untuk pelatihan-pelatihan di 2021 ini," jelas Eyla.

Terkait materi kurikulum pelatihan dan silabus FGA, Eyla menjelaskan bahwa seluruhnya disusun oleh *global tech company* atau mitra *edutech* namun dengan penyesuaian tambahan dari Kominfo dan

perguruan tinggi, untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. "Misalnya dari *global technology company* dikasih tanpa *live session* atau tanpa panduan dan diajar secara langsung, nanti dengan perguruan tinggi, kita bikin lagi materi atau kurikulum baru untuk menjelaskan kepada peserta secara *live*," jelasnya.

Hal ini yang membedakan FGA dengan akademi DTS lainnya. "Ada beberapa akademi lain yang langsung diajar oleh *global technology company (glotech)*. FGA sedikit berbeda, banyak *live session*-nya, dengan harapan mereka lebih banyak latihan, bisa lebih banyak bertanya, *project* dan lain-lain, sehingga bisa membantu kelulusan mereka. Jadi semua kurikulum disusun bersama, tapi memang *base-nya* dari *glotech*."

Kerja sama dengan mitra perguruan tinggi juga ditujukan agar pemberian pelatihan dapat tepat sasaran. "Mungkin juga adanya perbedaan daya tangkap (antar daerah, red.). Di daerah tertentu, mereka belum *se-advance* di daerah perkotaan ibaratnya. Itulah gunanya kita kerja sama dengan kampus, mereka kan mempunyai karakteristik masing-masing, di kota A, kota B, kota C, pasti dosen-dosen di perguruan tinggi setempat lebih tahu, sehingga mereka bisa intens ke mahasiswa."

## Penuhi 4 Sasaran

### Strategis Kominfo

Pengembangan SDM menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo bersama dengan Kabinet Indonesia Maju. Eyla menilai bahwa program DTS menjadi salah satu upaya untuk bisa memenuhi target yang dicanangkan Presiden tersebut. DTS mampu memenuhi 4 sasaran strategis bidang Kominfo berkaitan dengan pengembangan SDM.

"Pertama, kita mengurangi pengangguran di bidang Kominfo. Jangan sampai ada lagi lulusan IT tapi ngga bekerja. Lalu, meningkatkan daya saing di dunia global juga pastinya, makanya kita berikan sertifikasi internasional biar bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana," jelasnya.

Pemenuhan sasaran strategis ketiga adalah alih kompetensi. "Kita juga memfasilitasi (para peserta, red.) untuk alih kompetensi. Misalkan ada yang *lay off*, atau kerjanya di bidang non-IT serta lulusan SMK. Melalui program ini, mereka dimungkinkan untuk bisa bekerja di bidang IT. Bisa di bidang *networking*, *programming*, atau sebagai *web developer*. Jadi *re-skilling* atau *upskilling* mereka bisa lebih terasah." Sasaran keempat yang terpenuhi melalui DTS adalah penguatan kelembagaan. "Satu lagi, penguatan kelembagaan melalui kerja sama dengan akademisi, perguruan tinggi, dan juga industri."

### Passion-nya pada Pengembangan SDM

Eyla merupakan lulusan S1 Sistem Informasi Universitas Gunadarma dan S2 Business Information Technology dari University of Twente, Belanda. Sejak awal masuk bergabung di Kementerian Kominfo, Eyla telah bergabung di Badan Penelitian dan Pengembangan SDM. Ia sempat menjadi Koordinator Program Beasiswa Dalam dan Luar Negeri, bertanggung jawab mulai dari penyusunan program kerja beasiswa, inisiasi kerja sama dengan universitas, hingga pelaksanaan monitoring progres mahasiswa penerima beasiswa.

"Dari dulu memang senang dunia SDM sebetulnya ya, ke pengembangan SDM. Dulu aku awal masuk di sekretariat, ditugaskan untuk ngurusin beasiswa. Jadi dari dulu memang ngurusin orang, memang senang sih. Waktu di beasiswa juga sama, gimana caranya mereka bisa disekolahkan di luar, trus kita pantau. Intinya pengembangan SDM," tutur Eyla.

Sejak Juli 2020 lalu, Eyla menjabat selaku Koordinator Bidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik, sekaligus sebagai JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) Analis Kebijakan Ahli Madya. Menurutnya, selama ini pekerjaan yang dihasilkan juga digunakan untuk mendukung kebijakan.

"Selama ini kita juga punya *policy brief*, telaahan staf, atau bahkan sampai ke *roadmap* yang bisa mendukung kebijakan. Telaahan staf atau *policy brief* ini lebih singkat, bisa dihasilkan dalam sebulan, jadi bisa lebih *up-to-date* walaupun secara keilmiah beda sifatnya dengan penelitian. Dulu dipimpin langsung oleh Kepala Badan, lalu ke Pak Menteri untuk nanti disebar lagi ke Dirjen lainnya untuk dilaksanakan. Dan karena sekarang yang diutamakan pengembangan SDM di bidang TIK, jadi memang kita lagi banyak menyusun hal-hal tersebut."

## Aktif

### — di Forum Internasional

Sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil Puslitbang Aptika IKP, Eyla bertugas di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (SDPPPI) sejak Februari 2013 hingga Juni 2020, di mana ia mendapat banyak pengalaman terlibat dalam sidang dan forum internasional bidang SDPPI.



Dulu sewaktu di Puslitbang SDPPPI sering banyak forum dari ITU, APG, AWG, WRC. Kebetulan jadi anggota tim, seperti kita ada pokja-pokja, di sana juga ada *working group*. Ada beberapa yang memang dari kajian, tapi ada juga beberapa yang dari *expertise*-nya. Tim itu kan terdiri dari akademisi juga, dari industri juga ada. Kita bantuin *paper* negara, berjuang di sidang misalkan posisi negara itu harus dipertahankan. Sama teman-teman lainnya juga terutama di satuan kerja. Kalau kita hanya pendukung.



Beberapa pengalamannya dalam forum internasional antara lain menjadi anggota pada Sidang APT Wireless Group 20 di Bangkok pada September 2016, anggota Sidang World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA) di Tunisia pada Oktober 2016, anggota Sidang The 3rd Meeting of the APG19-3 di Perth, Australia; hingga menjadi pembicara dalam the 16th APT Telecommunication / ICT Development Forum di Phnom Penh, Kamboja, pada September 2019 lalu.

Menariknya, setiap terlibat dalam forum internasional, tim harus membaca ratusan paper negara lain. "Nggak tidur itu, kita bacain paper negara lain kaya gimana, ratusan jumlahnya. Kita pelajari lagi nih, kira-kira negara mana yang bisa mendukung. Itu kan mempertahankan posisi ya, misalnya kita punya frekuensi harus dipertahankan, jadi harus cari dukungan negara lain. Tapi ya Litbang sih pendukung, sebetulnya itu kerjanya satuan kerja" terangnya.

## Tak Mau Kurang

Mengakhiri perbincangan, tim KoinfoNext menanyakan target maupun keinginannya yang belum tercapai saat ini dalam aspek pekerjaan. Namun dengan sederhana Eyla mengatakan, prinsip utamanya adalah ingin berguna bagi masyarakat. Program DTS, menurutnya menjadi jawabannya. "Program ini dirasa bisa langsung memberikan manfaat ke masyarakat luas," ungkapnya.

"Prinsipku dari pertama masuk itu gimana kita bisa berguna buat masyarakat kebanyakan. Kita

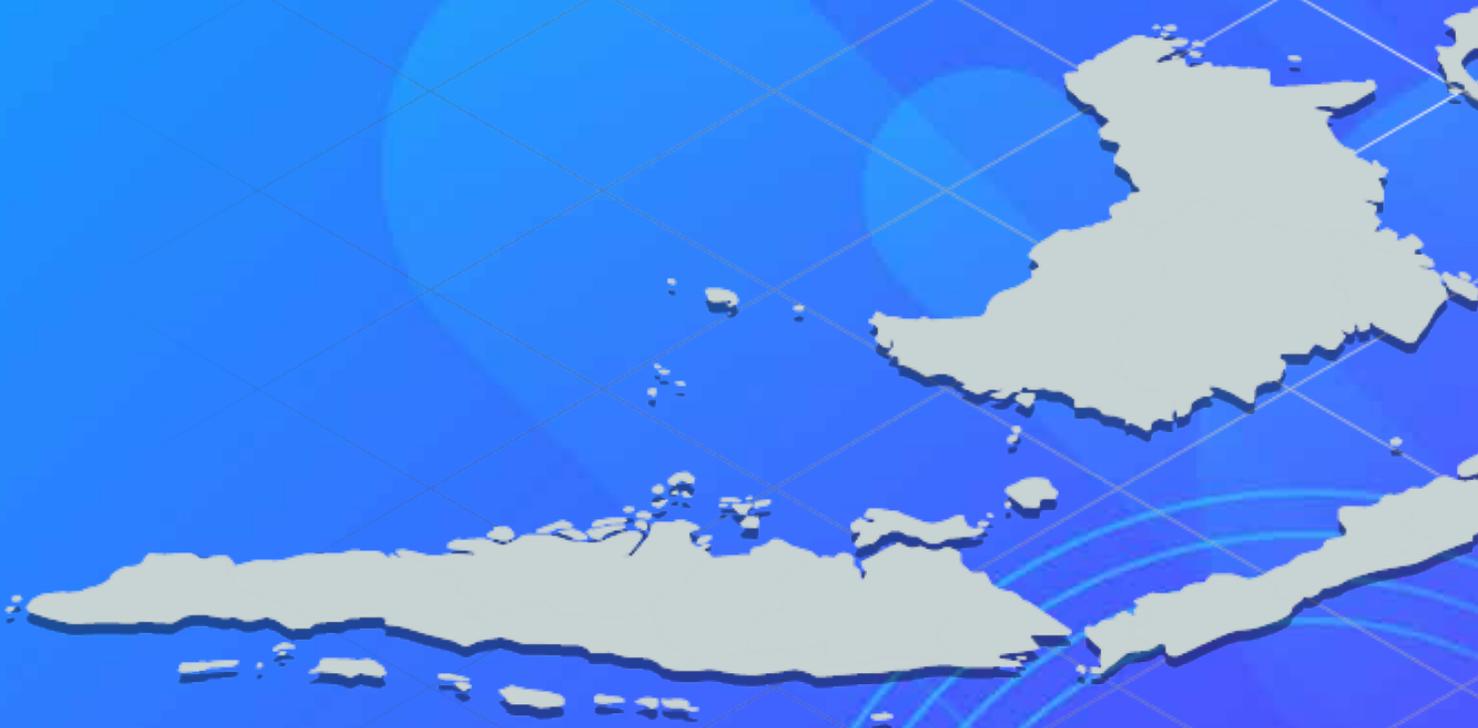
sebagai ASN kan memang buat melayani masyarakat. Litbang itu kan ngga langsung ya, ngga seperti di direktorat yang memang bisa langsung keluar, membantu atau melayani masyarakat. Tapi pas banget adanya program DTS ini, langsung ke masyarakat," tutur Eyla.

Hal itu pula yang membuatnya, bersama tim DTS lainnya rela bekerja lebih keras untuk mencapai hasil maksimal. "Aku ngerasain banget, gimana sih kita kalau jadi di posisi mereka itu seperti apa. Makanya itu sampai cape, ngga tidur, apapun, ya demi semua orang untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Walaupun mungkin belum maksimal, tapi kita kan tetap berusaha lebih baik," jelas Eyla.

Menutup obrolan siang itu, Eyla mengatakan bahwa dalam bekerja ia selalu berusaha semaksimal mungkin. "Intinya, prinsipku itu kita punya tugas kita kerjakan dengan baik, bahkan kalau bisa lebih. Jadi aku punya prinsip jangan sampai kurang dalam mengerjakan tugas, harus selesai dengan baik bahkan kalau bisa memberi lebih dari yang diminta untuk tugas-tugas yang diberikan," tutup Eyla mengakhiri obrolan kami.



# 8 UPT Daerah Dukung Pengembangan SDM Lewat DTS





**B**adan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Kominfo yang dilengkapi delapan Unit Pelaksana Teknis, dua Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) dan enam Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP), memiliki tugas dan fungsi mendorong pelaksanaan pengembangan SDM di wilayah kerja masing-masing, yang sejak

tahun 2018 dilaksanakan melalui program Digital Talent Scholarship (DTS). Kepada tim KominfoNext, ke-8 pimpinan UPT Balitbang SDM tersebut menceritakan proses pelaksanaan program DTS di daerah melalui beragam program turunan, di antaranya Vocational School Graduate Academy (VSGA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), peserta Thematic Academy (TA), Government Transformational Academy (GTA), hingga Regional Development Academy.

# BBPSDMP Medan

Dalam pelaksanaan program pelatihan intensif non-gelar Digital Talent Scholarship (DTS), BBPSDMP Kominfo Medan bersama dengan UPT lainnya di lingkungan Balitbang SDM, bekerja sama dengan mitra perguruan tinggi, global technology, dan Lembaga Sertifikasi Profesi.

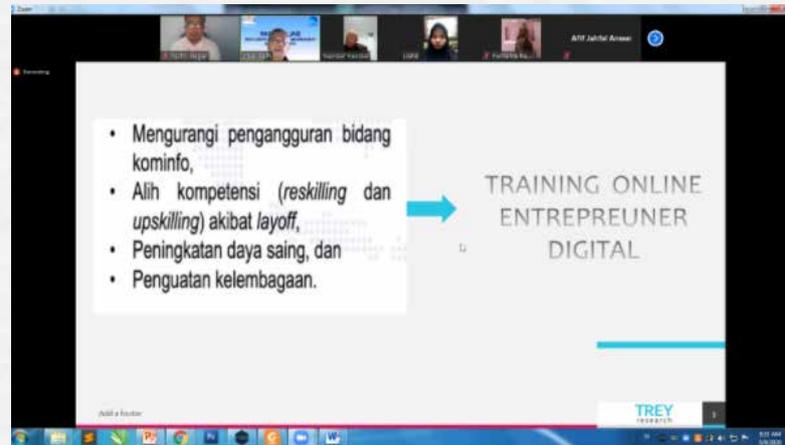
Kepala BBPSDMP Kominfo Medan, Drs. Irbar Samekto, M.Si. Ikbar Sakemento mengatakan, saat ini BBPSDMP Kominfo Medan dipercaya untuk melatih sekitar 8.500 peserta tambahan pada 4 tema pelatihan utama DTS, yakni Vocational School Graduate Academy (VSGA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Thematic Academy (TA) dan Government Transformational Academy (GTA).

VSGA dilaksanakan secara swakelola oleh BBPSDMP Kominfo Medan yang bermitra dengan 8 (delapan) Politeknik Negeri dan Swasta yang ada di wilayah kerja BBPSDMP Kominfo Medan, yakni Politeknik Aceh, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Caltex Riau, Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Negeri Batam dan Politeknik Negeri Pontianak.

Selain program VSGA upskilling yang bermitra dengan Politeknik, BBPSDMP Kominfo Medan juga menyelenggarakan pelatihan VSGA reskilling kepada masyarakat khususnya alumni SMK, D1, D2, dan D3 untuk tema pelatihan di bidang TIK. Pelatihan VSGA baik upskilling maupun reskilling akan didukung dengan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Sementara untuk DEA, BBPSDMP Kominfo Medan bekerja sama dengan perusahaan e-commerce lokal dan global, seperti Gojek, Tokopedia, Google dan Facebook. Kegiatan DEA juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan mitra Dinas Kominfo dan Dinas Koperasi UKM di daerah wilayah kerja.

Untuk Thematic Academy (TA), pelatihan melibatkan akademisi, industri, hingga beberapa komunitas sesuai masing-masing tema, di antaranya tema Big Data For Social Science, IT eks Pekerja Migran, Digital Marketing Specialist, IT for Difabel dan Digital Connectivity.



Pemaparan Materi Kepala BBPSDMP Kominfo Medan, Drs. Irbar Samekto, M.Si., dalam Webinar "Digital Marketing bagi Pelaku UMKM Melalui Aplikasi Video Conference"



Pemaparan Materi Oleh Instruktur Alex Siregar, S.Kom dalam Webinar "Digital Marketing bagi Pelaku UMKM Melalui Aplikasi Video Conference"

Terakhir, untuk pelaksanaan Government Transformation Academy (GTA), peserta adalah para ASN dan Non ASN yang bekerja pada bidang keahlian yang sesuai dengan tema pelatihan.

Mengenai aktivitas monitoring dan evaluasi (monev) peserta program DTS, Kepala Balai Ikbar Samekto menyatakan bahwa monev dilakukan melalui kegiatan tracer study, dengan mendata para peserta alumni DTS yang sudah memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja baru melalui grup jejaring sosial, seperti WhatsApp group.

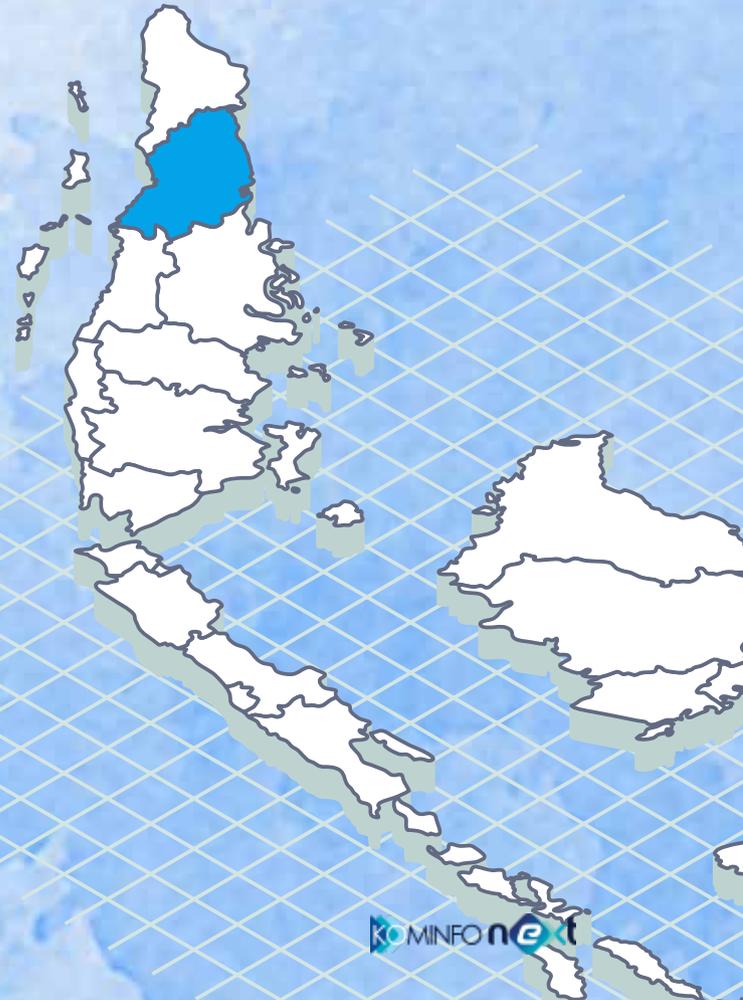
Selain itu, pemanfaatan platform aplikasi SIMONAS (Sistem Monitoring Alumni Sertifikasi) juga menjadi alternatif untuk mengukur keberhasilan program



Sambutan dan Arahan dari Kepala BBPSDMP Kominfo Medan, Drs. Irbar Samekto, M.Si., dalam pelaksanaan Bimtek DEA di Kabupaten Deli Serdang

DTS. Dalam platform tersebut, seluruh alumni akan didaftarkan dalam sistem Simonas dan akan dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kominfo.

Berdasarkan pantauan BBPSDMP Kominfo Medan, saat ini terdapat beberapa pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja balai telah menyampaikan apresiasinya terhadap program kegiatan DTS, dan telah merekrut beberapa alumni yang dianggap kompeten sebagai tenaga ahli pada dinas-dinas yang ada di pemerintah daerah tersebut, seperti Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kominfo Provinsi Aceh, Dinas Kominfo Kota Banda Aceh, Dinas Kominfo Kab. Mandailing Natal, Dinas Kominfo Kab. Padang Lawas Utara, hingga Dinas Kominfo Kota Batam.



# BBPSDMP Makassar

BBPSDMP Kominfo Makassar telah melaksanakan program DTS di wilayah kerja untuk skema VSGA dan DEA. Dijelaskan oleh Plt. Kepala BBPSDMP Makassar, Djunaedy Aspan S.Sos.Map., di tahun 2021 ini BBPSDMP Kominfo Makassar menargetkan pelaksanaan DTS sebanyak 11.000 peserta, terdiri dari 5.000 peserta Vocational School Graduate Academy (VSGA), 3000 Digital Entrepreneurship Academy (DEA), 2000 peserta Thematic Academy (TA), dan 1000 peserta Government Transformational Academy (GTA).

Program DTS pada skema VSGA diikuti oleh alumni sekolah vokasi yaitu alumni SMK, D1, D2, dan D3 bidang Kominfo. "Pelaksanaan pelatihan khususnya VSGA dilakukan Kerjasama dengan beberapa Politeknik Negeri di wilayah kerja dan pemerintah daerah di wilayah kerja. Selanjutnya disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diakui oleh BNSP," jelas Plt. Djunaedy.

Lebih lanjut ia mengatakan, khusus untuk VSGA, umumnya para alumni diberi kesempatan oleh pemerintah daerah setempat untuk menjadi tenaga IT dan membantu pemerintah daerah dalam operasional di bidang TIK. Materi yang diberikan dalam VSGA antara lain: Programming, Office Operator, Desain Grafis, hingga jaringan komputer. Sementara itu untuk Materi untuk DEA adalah Business Model Canvas, Copywriting, Foto produk Iklan melalui media social, SEO, serta Marketplace.

Sementara untuk DEA, menurut Plt. Djunaedy program tersebut diikuti oleh para pelaku UMKM yang pelaksanaannya dilakukan secara offline di beberapa daerah wilayah kerja, dengan sasaran pelaku UMKM yang telah terdaftar pada pemerintah daerah.

# BBPSDMP Manado

Kepada tim KominfoNext, Kepala BPSDMP Manado Christiany Juditha merinci pelaksanaan program DTS di wilayah kerjanya yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Untuk pelaksanaan di tahun 2021 ini, ia menjelaskan bahwa BPSDMP Manado akan melakukannya di 6 kota/kabupaten yang tersebar di 4 provinsi. Program VSGA ini memberikan beasiswa sertifikasi untuk anak-anak lulusan SMK di bidang TIK yang berada di Manado dan sekitarnya, terutama empat provinsi yang menjadi wilayah kerja BPSDMP Kominfo Manado.

"Tujuannya agar mereka dapat mengikuti sertifikasi bidang IT sesuai keterampilan yang mereka miliki. Sertifikasi ini penting agar alumni-alumni SMK dapat bersaing di dunia kerja," ungkapnya. Lalu untuk pelaksanaan Digital Entrepreneur Academy (DEA), Christiany menjelaskan bahwa

antusiasme masyarakat untuk program DEA ini sangat besar. "DEA adalah akademi yang diperuntukkan untuk para pelaku usaha (UMKM) yang berada empat lokasi wilayah kerja BPSDMP Kominfo Manado tadi. Sudah disiapkan satu kelas, terdiri dari 20 orang per kabupaten. Yang mendaftar sangat banyak jadi kami atur untuk seleksi secara ketat," ujarnya.

Para peserta yang ikut dalam program DEA di antaranya adalah pemilik usaha dari daerah

menengah ke bawah, serta beberapa peserta yang beralih membangun usaha di tengah masa pandemi sebagai penghasilan. "Jadi mereka pengusaha-pengusaha baru yang mau mencoba bidang tersebut, perlu dibantu skill-nya misalnya cara memasarkan produk melalui media sosial, yang sederhana akan tetapi bisa membantu para pengusaha-pengusaha itu," jelas Christiany. Untuk melakukan semua program tersebut, BPSDMP Manado turut bekerja sama dengan relawan TIK di daerah-daerah untuk menjangkau dari setiap peserta.



DTS VSGA Dgn Politeknik Negeri Manado

## BBPSDMP Bandung

Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, kegiatan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Digital Talent Scholarship 2020 bagi pelaku UMKM dilaksanakan di empat Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat yaitu; Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Subang, dan Kab. Bandung Barat.

Menurut Kepala BPSDMP Bandung Betty Djuliaty, program ini merupakan program pusat yang dilaksanakan oleh BPSDMP Kominfo Bandung selaku UPT yang terbagi ke dalam 4 kab/kota. Dalam realisasinya, program tersebut berhasil mencapai sesuai target yang ditentukan, bahkan peminat dari setiap daerah melebihi kuota yang sudah ditetapkan.

Untuk tahun 2021, program DTS-DEA menjadi program pengembangan SDM dan dianggarkan pada DIPA BPSDMP Kominfo Bandung dengan target jumlah peserta sebanyak 1.000 orang, yang menyasar UMKM yang telah memiliki produk agar dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam memanfaatkan/mengoptimalkan TIK untuk mengelola bisnis atau usahanya. Target tercapai sesuai dengan kuota yang ditentukan, yaitu 240 orang.

Kepala BPSDMP Kominfo Bandung membeberkan mengenai materi yang diberikan dalam pelatihan bidang informatika ini, yakni Business Model Canvas, Teknik Olah Foto Sederhana, Teknik Copywriting & Creative Content, Membuat Website/ Blog Berbasis Wordpress, SEO & Google Bisnisku, Facebook & Instagram Ads, dan E-Commerce.

Untuk menjaring peminat Program DEA dan DTS di Wilayah Bandung, Betty Djuliaty menjelaskan bahwa BPSDMP Bandung bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing lokasi pelaksanaan, melalui komunitas UMKM, melalui Instagram dan melalui website Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Koperasi dan UMKM.

## BBPSDMP Kominfo Surabaya

Pelaksanaan program DTS dan DEA oleh BPSDMP Surabaya saat ini tengah dalam tahap sosialisasi dan koordinasi secara intensif dengan beberapa stakeholder di daerah, khususnya di wilayah kerja BPSDMP di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu audiensi dan koordinasi dengan para kepala daerah dan kepala dinas di Jawa Timur serta wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kepala BPSDMP Kominfo Surabaya, Eka Handayani, mengatakan bahwa masyarakat Jawa Timur sangat antusias dan senang dengan adanya program DTS ini, karena selain gratis, program ini juga dapat memberikan ilmu tambahan bagi masyarakat terutama masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.

"Untuk tahun ini kami mendapatkan target 5.000 peserta DTS yang berasal dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Tentunya dengan beberapa terobosan-terobosan yang bisa kami lakukan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Politeknik Negeri dan Universitas yang ada di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat," jelas Eka.

Eka melanjutkan, sesuai dengan target khalayak program, pelaksanaan program DTS terbagi menjadi beberapa skema, yaitu Fresh Graduate Academy, program pelatihan peningkatan kompetensi bidang TIK yang berfokus pada tema pelatihan CCNA Network Engineer, CCNA Cyber Operation Specialist, Cloud Computing, Core System Administration, Java Computing, Core System Administration, Java Programming, Database Design and Programming with SQL, dan Data Science.

Lalu ada pula Vocational School Graduate Academy, dengan materi Junior Network Administrator, Junior Web Developer, Junior Mobile Programmer, Junior Graphic Designer, Intermediate Animator, Intermediate Multimedia Designer, Drive Tester,

“

**Potensi cipta kerja dari alumni DTS, selain telah diterima di berbagai instansi pemerintah dan swasta, juga telah berhasil menciptakan 17 startup yang berasal dari para alumni DTS. Beberapa startup yang sudah terbentuk yaitu D'Agries, D'Molta, D'Buang, dan D'Kriya,”**

Instalasi dan Aktivasi Fiber Optik, Video Editor, Staf Manajemen Data

Kemudian skema Thematic Academy, program pelatihan multisektor bagi pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan kepada peserta dari jenjang dan multidisiplin yang berbeda.

Menurut Eka, skema TA ini dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal di tiap daerah, dengan sasaran beberapa di antaranya ialah petani, nelayan, buruh migran (dalam dan luar negeri), dan disabilitas. Dalam skema ini, para produsen/UMKM diajarkan materi-materi seperti foto produk, copywriting, upload foto ke platform digital dan beberapa materi lain.

Sementara untuk pemasaran/promosi program DTS secara digital dilakukan oleh para anak muda di wilayah tersebut seperti karang taruna, kelompok informasi masyarakat, dan komunitas. Mereka akan diajarkan materi tentang digital marketing, customer experience. Tenaga pemasar/marketing juga akan mendapatkan persentase keuntungan dari tiap produk yang dia jual.

“Potensi cipta kerja dari alumni DTS, selain telah diterima di berbagai instansi pemerintah dan swasta, juga telah berhasil menciptakan 17 startup yang berasal dari para alumni DTS. Beberapa startup yang sudah terbentuk yaitu D'Agries, D'Molta, D'Buang, dan D'Kriya,” jelas Eka.

*Uji Kompetensi Peserta oleh Asesor LSP TIK Surabaya*



# BBPSDMP Kominfo Yogyakarta

BPSDMP Kominfo Yogyakarta selaku UPT Badan Litbang akan melaksanakan setidaknya 4 dari 7 Academy dalam program DTS, yakni Vocational School Graduate Academy dengan target 2.000 orang, Digital Entrepreneurship Academy target 1.000 orang, Thematic Academy (1.000 orang), dan Government Transformation Academy dengan target 1.000 orang.

Terkait program Vocational School Graduate Academy (VSGA), Kepala BPSDMP Zulkarnain menjelaskan bahwa ada dua pola pelaksanaan, yaitu daring dan luring. VSGA dengan pola daring bekerja sama dengan mitra kampus dalam wilayah kerja BPSDMP Yogyakarta yang meliputi DI Yogyakarta; Prop. Jawa Tengah dan Bali, di antaranya Sekolah Vokasi UGM, Politeknik Negeri Semarang. Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Cilacap; dan Universitas Amikom Yogyakarta.

Sedangkan secara luring (offline), pelatihan dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota yakni Kota Yogyakarta, Kab. Kulon Progo, Kota Semarang, Kab. Kudus, Kab. Klaten, Kota Pekalongan, Kab. Grobogan, Kab. Karang Asem, dan Kab. Buleleng.

Zulkarnain menjelaskan, beasiswa pelatihan ini akan memberikan tema-tema berdasar peta okupasi, yakni Staff Data Management, Junior Graphic Design, Junior Web Developer, Junior Network Administration; dan Junior Mobile Programmer. Di akhir pelatihan, akan dilakukan uji kompetensi berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Sementara itu terkait Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Zulkarnain menjelaskan bahwa sudah dilaksanakan oleh BPSDMP Kominfo Yogyakarta sejak tahun 2020 di Kabupaten Wonosobo; Kab. Banyumas dan Kabupaten Cilacap, dengan sasaran kegiatan para mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“**Berdasarkan hasil pelaksanaan VSGA, terdapat beberapa alumni siswa yang saat ini bekerja sebagai karyawan PPNPN pemerintha daerah, seperti di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kota Jambi,**”

Sedangkan untuk tahun 2021 ini rencananya akan dilaksanakan di wilayah Kab. Gunung Kidul, Kab. Magelang, Kota Tegal, Kab. Sragen, Kab. Kudus, Kab. Wonogiri, Kab. Blora, dan Kota Yogyakarta. Sasaran kegiatan DEA yakni Komunitas koperasi; Karang Taruna; Pelaku UMKM; BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan Pekerja Migran Indonesia di Hongkong.

Untuk menjaring minat masyarakat terhadap program DTS, BPSDMP Yogyakarta melakukan sosialisasi melalui media mainstream dan media sosial, melibatkan influencer, hingga pemanfaatan media luar ruang seperti flyer, banner, videotron. Juga dilakukan koordinasi dengan Lembaga/institusi/Dinas terkait.

# BBPSDMP Kominfo Jakarta

Sesuai dengan wilayah kerjanya yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi, BPSDMP Jakarta melakukan kerja sama dengan 6 mitra perguruan tinggi di wilayah kerja dalam penyelenggaraan program VSGA. Keenam perguruan tinggi tersebut ialah Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Manufaktur Astra, Politeknik Media Kreatif, Politeknik Jambi, dan Politeknik Bangka Belitung.

Kepala BPSDMP Jakarta, Drs. Parulian Sitompul, MA., menjelaskan, penyelenggaraan program VSGA di tahun 2020 berlangsung selama 102 jam pelajaran secara daring yang meliputi pelatihan technical skills, soft skills development dan uji kompetensi/sertifikasi. Pada akhir pelatihan, peserta pelatihan akan disertifikasi kompetensi berbasis SKKNI oleh LSP.

Parulian menuturkan, terselenggaranya program VSGA ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan vokasi yang akan berdampak dalam upaya pengurangan angka pengangguran serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi.

Untuk program Digital Entrepreneurship Academy (DEA), lanjut Parulian, telah dilaksanakan oleh BPSDMP Jakarta sejak tahun 2020 di Kota Bogor. Sementara di tahun 2021 ini, BPSDMP Jakarta akan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi berbagai universitas yang masuk dalam wilayah kerja BPSDMP Jakarta.

Terkait materi yang disajikan pada program pelatihan, Parulian menjelaskan bahwa untuk materi VSGA lebih bersifat teknis peralatan TIK, sedangkan DEA mencakup seputar aplikasi marketing penjualan suatu produk.

Dalam memonitoring keefektifan program terhadap para peserta BPSDMP Kominfo Jakarta, untuk saat ini dalam program VSGA, BPSDMP Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi bekerjasama dengan pihak kampus pelaksana. "Berdasarkan hasil pelaksanaan VSGA, terdapat beberapa alumni siswa yang saat ini bekerja sebagai karyawan PPNPN pemerintha daerah, seperti di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kota Jambi," pungkas Parulian Sitompul.

# BBPSDMP Kominfo Banjarmasin

Sebagai bagian dari program pengembangan SDM BPSDMP Kominfo Banjarmasin, Digital Entrepreneurship Academy (DEA) akan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 ini, dengan total peserta 750 yang terbagi ke dalam tiga provinsi yang masuk wilayah kerja BPSDMP Banjarmasin.

Diungkapkan Kepala BPSDMP Kominfo Banjarmasin, Rahman Harahap, setelah 2017 wilayah kerja yang termasuk dalam BPSDMP BANjarmasin mengalami perubahan, dari semula Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah, berubah menjadi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Sementara untuk program Vocational School Graduate Academy akan dilaksanakan mulai April untuk skema daring dan bulan Juni untuk skema tatap muka. Lalu untuk pelaksanaan program Thematics Academy, BPSDMP Banjarmasin memfokuskan pada pelatihan IT for Financial Services serta KIM Digital. Dan terakhir, untuk Program Government Transformation Academy, dikhususkan untuk ASN daerah agar transformasi digital di daerah berjalan dengan cepat.

Untuk program VSGA, BPSDMP Banjarmasin menargetkan 2000 peserta dengan 1250 peserta akan dilatih oleh mitra perguruan tinggi yang berada di wilayah kerja. Sementara untuk Thematics Academy (TA) dan Government Transformation Academy (GTA) masing-masing ditargetkan 1000 peserta.

Menyinggung kalangan mana saja yang bisa mengikuti program bersertifikasi ini, Rahman Harahap mengatakan, "Semua bisa ikut, mulai dari 17 tahun atau yang sudah lulus sekolah, semua bisa ikut. Tetapi ada syarat lain, seperti sudah memiliki atau baru akan memulai usaha, memiliki email dan media sosial, dan yang paling penting harus memiliki smartphone," jelasnya.

Terkait strategi menjangkit minat peserta, Kepala BPSDMP Kominfo Banjarmasin menuturkan bahwa publikasi dilakukan melalui saluran media sosial milik BPSDMP Banjarmasin, baik melalui Instagram maupun Facebook. "Selain itu kami juga menyebarkan ke alumni-alumni kegiatan-kegiatan kami agar menginfokan kepada keluarganya, komunitasnya, tetangganya, tentang adanya program DEA ataupun DTS," jelasnya.

Dalam wawancara tersebut, Rahman Harahap turut menjelaskan apresiasi dari dunia kerja terhadap lulusan peserta program ini. "Apresiasi banyak sekali datang dari dunia industri di mana kompetensi SDM mereka dapat diukur dengan adanya sertifikasi dari Program DTS. Program DTS ini juga sangat powerful, terbukti dengan adanya alumni dari Kalimantan Timur yang menggunakan sertifikatnya untuk bekerja di luar negeri, karena sertifikat ini terdiri dari dua bahasa, dan terdapat logo Garuda Indonesia," tandasnya.

“**Semua bisa ikut, mulai dari 17 tahun atau yang sudah lulus sekolah, semua bisa ikut. Tetapi ada syarat lain, seperti sudah memiliki atau baru akan memulai usaha, memiliki email dan media sosial, dan yang paling penting harus memiliki smartphone,**”

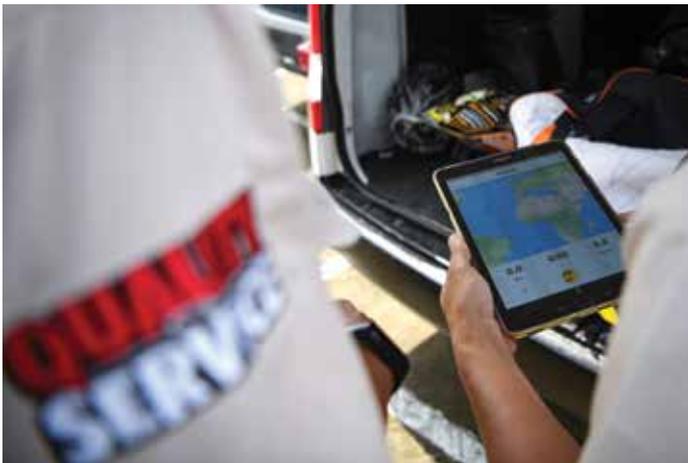


**K**eluhan yang seringkali disampaikan warga yang tinggal di wilayah pegunungan, yaitu tentang sulitnya warga dalam mendapatkan sinyal telekomunikasi. Sebagai bentuk tindak lanjut aduan yang diterima dari warga melalui Dinas Kominfo setempat, Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melaksanakan kegiatan QoS (Quality of Service). Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengukuran sinyal telekomunikasi, terutama jaringan bergerak seluler di lokasi-lokasi yang dikeluhkan oleh warga.





Foto dan Teks:  
Indra Kusuma



Dalam pelaksanaan QoS, medan yang dilalui tim untuk melakukan pengukuran, tidaklah mudah. Medan yang dilalui sebagian besar berupa jalan tanah dan berbatu. Ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi selama proses pengukuran, tugas tim menjadi semakin berat untuk bisa melalui medan ini. Motor trail dan mobil SUV menjadi andalan untuk bisa menaklukkan medan dan menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi target pengukuran sinyal. Tak jarang, pada satu titik dimana mobil tidak dapat maju lagi, maka alat untuk pengukuran akan dibawa oleh motor menggunakan tas punggung.

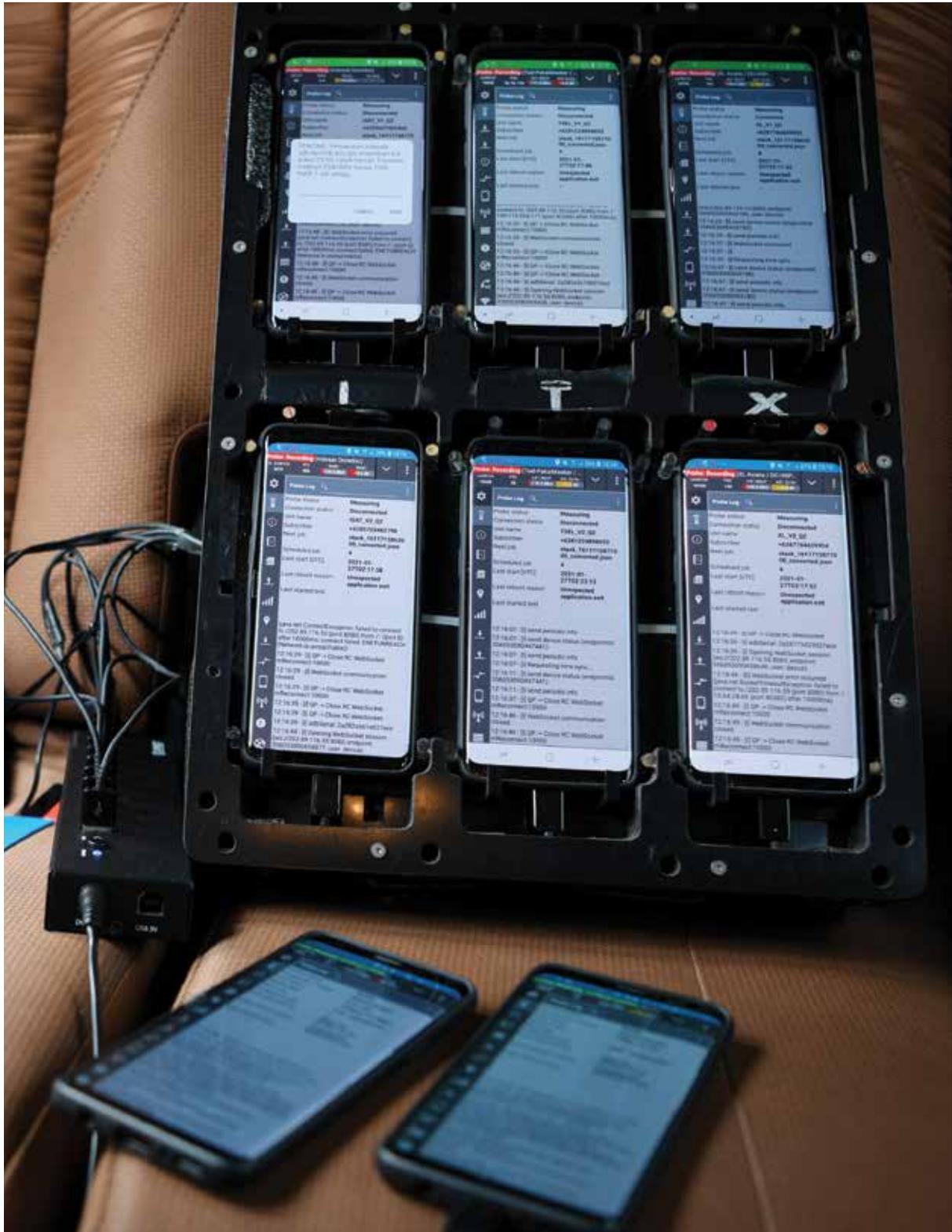




Siti Maryam, pengusaha Tiwul Instan dari Desa Lipursari, Wonosobo mengeluhkan sinyal telekomunikasi yang buruk di daerahnya. Buruknya kualitas sinyal berakibat pada sulitnya Siti dalam melakukan pemasaran produk usahanya. "Kebetulan aksesnya sangat sulit, kalau mau memasarkan dagangan, harus turun ke kota yang memakan waktu dan biaya sekitar 15.000 rupiah naik motor," ujarnya.



Prosedur pengukuran sinyal telekomunikasi, baik yang sifatnya aduan maupun kegiatan pengukuran reguler, dilaksanakan dengan mengukur kualitas sinyal titik lokasi tertentu. Petugas akan melakukan *capture* hasil sinyal *stream* dan lain-lain sesuai *parameter* yang diperlukan. Selanjutnya, akan dilakukan pengolahan data di *post processing*.



Proses pengukuran sinyal telekomunikasi menggunakan alat Qualipoc Freerider III dari RnS (Rohde and Schwarz) buatan Jerman. Alat tersebut dapat mengeluarkan parameter quality yang dibutuhkan selama pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran, didapatkan hasil bahwa ternyata kualitas layanan telekomunikasi masih banyak yang kurang bagus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena lokasi pengukuran berada di daerah perbukitan dan lembah. Kontur perbukitan merupakan salah satu penyebab terjadinya *blankspot* atau sinyal lemah di suatu wilayah.



Hasil pengukuran berupa penilaian minimum yang nantinya akan dikembalikan ke operator telekomunikasi, disertai surat dari Direktur Pengendalian. Apabila hasilnya dibawah standar minimal, maka akan disarankan untuk melakukan perbaikan di lokasi yang ada dalam hasil pengukuran tersebut.







# KONEKTIVITAS DIGITAL

## Utilisasi ‘Tol Langit’ Palapa Ring untuk Kemandirian Bangsa

**T**ol Langit merupakan istilah yang menjelaskan mengenai salah satu program infrastruktur pemerintah di sektor telekomunikasi, yakni pembangunan Palapa Ring. Tol Langit atau Palapa Ring merupakan jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh 34 Provinsi dan 440 kabupaten dan kota di Indonesia. Proyek Palapa Ring sendiri memiliki kabel laut dengan panjang 35.280 kilometer dan kabel daratan sepanjang 21.807 kilometer.

Penggelaran jaringan serat optik nasional tersebut mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo atas upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), dalam membangun konektivitas secara nasional. Presiden juga memberikan catatan mengenai perlunya peningkatan utilisasi atau pemanfaatan Palapa Ring yang saat ini dinilai masih rendah, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

“Saya minta kepada Menkominfo untuk memastikan agar Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai *backbone* saja, tidak hanya berhenti di situ. Tetapi, harus tersambung sampai ke rumah tangga agar investasi besar di Palapa Ring segera bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita. (Ini, red.) sangat dibutuhkan dalam masa pandemi seperti sekarang ini,” ujar Kepala Negara saat meluncurkan Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/02/2021).

Catatan Presiden tentu dapat dipahami, mengingat arahan mengenai transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis guna membawa Indonesia menuju masa depan. Transformasi juga harus mewujudkan kedaulatan dan kemandirian digital yang menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan transformasi digital di Indonesia. “Kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital kita. Kita harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar. Jangan hanya menambah impor. Ini yang selalu saya tekankan,” tegasnya.

**“..tahun 2021 ini fokus pada dua arahan Presiden, menerapkan prinsip *connecting the unconnected and leaving no-one behind*, serta kemandirian dan kedaulatan digital”**

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan bahwa pada tahun 2021 ini Kementerian Kominfo fokus pada dua arahan Presiden, dengan menerapkan prinsip *connecting the unconnected and leaving no-one behind* serta kemandirian dan kedaulatan digital. Dua fokus utama tersebut adalah peningkatan utilisasi Palapa Ring *backbone broadband* dan pemanfaatan ruang ekonomi digital.

Data dari BAKTI Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa utilisasi Palapa Ring dengan Service Level Agreement (SLA) berdasarkan target tahun 2020 sukses mencapai 99%. Pemenuhan target tersebut masing-masing terdiri dari Palapa Ring Barat 36,7% (Fiber Optik), Palapa Ring Tengah 20,17% (Fiber Optik), serta Palapa Ring Timur 16,50% untuk Fiber Optik dan 47,27% untuk MW. Sedangkan pada tahun 2021 sebagaimana arahan Presiden, utilisasi Palapa Ring dengan SLA ditargetkan 95 persen masing-masing untuk Palapa Ring Barat kapasitas 120 Gbps, Palapa Ring Tengah 180 Gbps dan Palapa Ring Timur 160 Gbps.

Hingga 28 Februari 2021, BAKTI Kementerian Kominfo merilis pemanfaatan atau utilisasi Palapa Ring yang merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur memenuhi kapasitas sebesar 371 Gbps. Adapun rinciannya yakni untuk Paket Barat 110 Gbps yang mencakup 12 kota dan kabupaten, Paket Tengah 122 Gbps di 24 kota dan kabupaten, serta Paket Timur 139 Gbps yang menjangkau 49 kota dan kabupaten. Upaya tersebut merupakan komitmen Kementerian Kominfo untuk terus membangun dan menghubungkan Indonesia melalui Tol Langit atau jaringan serat optik Palapa Ring.



## Enam Sinergi Program

Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa tahun 2021 yang merupakan momentum percepatan pelaksanaan agenda transformasi digital Indonesia, harus ditandai dengan kerja sama dan kerja nyata yang baik. Salah satu wujud dari momentum ini adalah bagaimana meningkatkan utilisasi Palapa Ring.

“Kominfo perlu berfokus pada peningkatan utilisasi Palapa Ring *backbone broadband*, juga pemanfaatan ruang digital ekonomi yang lebih berimbang. Kita negara yang bukan negara proteksionis, kita terbuka kerjasama internasional. Namun kita juga harus menjadi bangsa dan negara yang berdaulat, memanfaatkan semua kemampuan, keunggulan, SDM digital kita untuk negeri kita, untuk bangsa dan rakyat kita dan jika bisa untuk kepentingan umat manusia,” ujar Menteri Johnny.



Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Kominfo menyatakan momentum penting tersebut diharapkan dapat menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir dan *mindset* baru, dengan kesempatan kolaborasi global yang baru, serta dengan masa depan baru menuju Indonesia Maju.

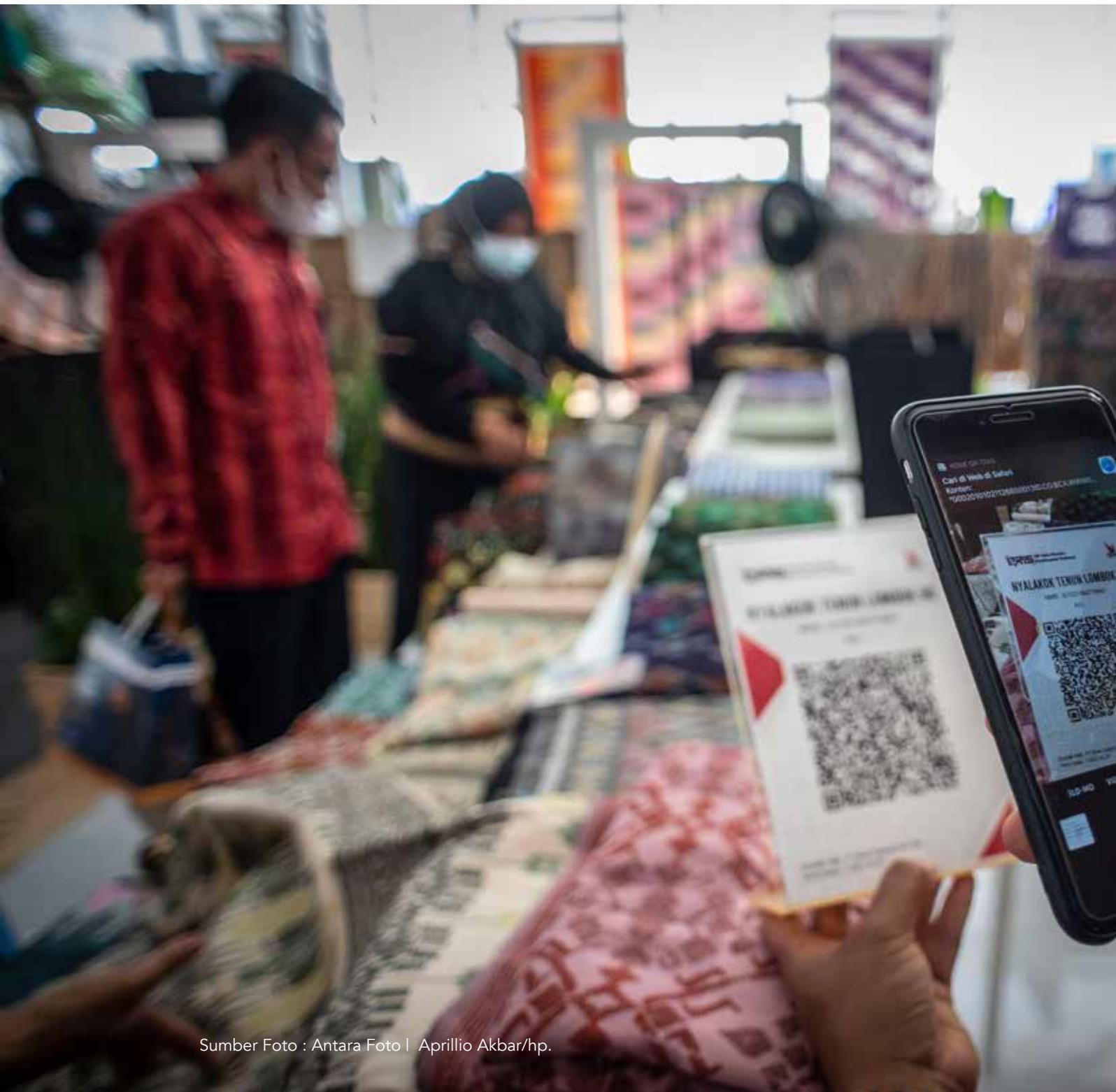
“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Kominfo memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam implementasi agenda transformasi digital ini. Sehingga transformasi digital Indonesia berjalan dengan prinsip *connecting the unconnected and leaving no-one behind*. Oleh karena itu, kemandirian dan kedaulatan digital harus menjadi kunci utama dalam perwujudan transformasi digital,” jelasnya.

Sebagai gambaran dan implementasi, BAKTI Kementerian Kominfo menyusun rencana strategis untuk mencapai pemanfaatan Palapa Ring KPBUs dengan target 1276 Gbps pada tahun 2024 nanti.

Adapun rencana strategis itu dibagi dalam enam sinergi program, yaitu yang **pertama**, Infrastruktur Akses 4G Seluler di 1682 + 7904 (123 Gbps), **kedua**, Infrastruktur Satelit Multifungsi (330 Gbps), **ketiga**, Ekosistem Digital, Monetisasi Digital atau Internet Desa Mandiri (184 Gbps), **keempat**, Infrastruktur Penyiaran, Kerjasama Aset Konsesi atau Data Centre (89 Gbps), **kelima**, Tenancy Palapa Ring KPBUs (450 Gbps), dan **keenam**, Infrastruktur Akses Internet Wi-Fi Publik di 11.568 + 7.904 (100 Gbps).

Berkaitan dengan utilisasi *backbone broadband* dan pemanfaatan ruang digital yang lebih baik bagi masyarakat, Menteri Johnny menegaskan adanya kebutuhan komunikasi publik dan juga tata kelola regulasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital.

“Hal ini penting untuk terus ditingkatkan agar masyarakat semakin teredukasi akan urgensi dan manfaat baik dari program-program Kementerian Kominfo, dan khususnya dan lebih luasnya tentu adalah manfaat dan program-program pemerintah dibawa *leadership* Presiden Joko Widodo, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan ketertiban di dalam ruang digital,” jelasnya.



Sumber Foto : Antara Foto | Aprillio Akbar/hp.

# KONEKTIVITAS DIGITAL



## Kesiapan Kominfo Jadikan Indonesia Pemenang Ekonomi Digital

Perekonomian nasional menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19 yang terus menyerang Indonesia dan dunia selama lebih dari setahun terakhir. Hampir semua negara fokus pada dua penanganan utama, yakni kesehatan dan ekonomi. Dua sektor tersebut dapat dikatakan menjadi penyelamat bagi sektor lain dalam menghadapi ganasnya pandemi.

Pemerintah Indonesia pun bersikap tegas menyoal hal tersebut. Lewat kampanye komunikasi publik “Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit”, optimisme dalam menghadapi pandemi tidak pernah berhenti untuk melawan rasa pesimisme. Upaya pemulihan kesehatan dan membangkitkan perekonomian nasional itu salah satunya dapat dilihat dari kebijakan dan program strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terus menggandeng mitra dan ekosistem terkait seperti pelaku startup digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, kehadiran *startup* digital menjadi salah satu kontribusi penting untuk mendorong Indonesia menjadi pemenang di dalam ekonomi digital. Bahkan, keberadaan sektor hilir ekonomi digital akan melengkapi upaya Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Kehadiran *startup* digital di hilir digital ekonomi akan mewarnai perjalanan bangsa ini untuk menjadi pemenang di digital ekonomi kita. Saya tentunya menyambut dengan baik ini dan pemerintah mengambil bagiannya secara sungguh-sungguh,” ujarnya dalam *Grand Opening Traveloka Campus*, di The Breeze BSD City, Tangerang, Kamis (18/03/2021).

Menkominfo menjelaskan, kehadiran *startup* digital seperti Traveloka Campus, memberikan gambaran pandemi COVID-19 tidak akan mampu hentikan semangat pemerintah untuk terus bekerja maju. “Tidak akan mampu untuk menyetop Traveloka dan lingkungan keluarga besarnya untuk bergerak maju,” tandasnya.

Menteri Johnny menilai, sektor ekonomi digital berpeluang menjadi salah satu andalan dalam pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Sebab, wabah virus Corona itu seperti diketahui memberikan dampak yang besar bagi dunia. Menjadi rahasia umum bahwa perekonomian global ikut terdampak, mengalami kontraksi sangat dalam, demikian halnya dengan kontraksi ekonomi di wilayah regional.

Selama melawan pandemi COVID-19, Menkominfo menegaskan bahwa kontraksi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 minus 2,07%. Menurutnya, jika dibanding dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis. Bahkan, di kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, maupun Filipina, kontraksi ekonomi yang dialami sangat dalam, dan Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan kontraksi ekonomi rendah.

"Dengan *leadership* yang kuat, kerja yang serius, selalu melakukan adaptasi dan *agility* terhadap COVID-19 di bawah *leadership* Presiden Joko Widodo, dan didukung oleh pemerintah daerah. Indonesia salah satu dari sedikit negara yang berhasil untuk menekan sehingga kontraksinya kita kategorikan sebagai rendah," ungkapnya.

Optimisme juga disampaikan Menteri Johnny akan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi dalam perekonomian nasional. "Kita (pemerintah dan komponen masyarakat, red.) dengan kerja serius, kerja sungguh-sungguh mampu mengatasi itu. Dan ini pertanda baik bahwa kita akan segera masuk ke satu era baru, era yang tidak pernah kita ramalkan sebelumnya, di mana migrasi kehidupan dunia fisik ke dunia digital tidak bisa kita hindari lagi," tandasnya.

## Pemerataan Infrastruktur

Selain mengapresiasi dan mendorong kemunculan startup digital beserta ekosistemnya, seperti lembaga pendidikan dan pengembangan, Menkominfo menyatakan Pemerintah juga mengambil bagian dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), agar meningkatkan rasio akses internet yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Menteri Kominfo menegaskan, Indonesia untuk pertama kalinya mengintervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiapkan dalam *blended financing*, untuk memastikan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) merata di seluruh Indonesia. "Kita berharap

internet *link ratio* Indonesia akan segera jauh lebih baik, pada saat penggelaran ICT infrastruktur itu selesai nanti di tahun 2022," ujarnya.

Mengutip data Kementerian Dalam Negeri, Menteri Johnny menyebutkan total jumlah desa dan kelurahan di seluruh Indonesia mencapai 83.218. Menurutnya, masih ada sebanyak 12.548 diantaranya yang masih *blank spot* atau tidak terjangkau akses internet 4G. Kementerian Kominfo dalam hal ini terus konsisten untuk menyatukan Indonesia melalui pembangunan infrastruktur TIK secara masif.

"Kita sudah siapkan itu dan sedang bekerja, 9.113 di wilayah 3T dan 3.435 desa dan kelurahan ada di wilayah non-3T yang juga harus disiapkan. Pemerintah mengambil bagian untuk menggelar pembangunan infrastruktur ICT ini," jelasnya.

Menurut Menkominfo, semangat yang sama juga dilakukan oleh mitra operator seluler yang akan menyelesaikan jaringan 4G di wilayah komersial yang menjadi wilayah kerjanya. Bahkan secara simultan, pemerintah berharap pada tahun 2022 nanti sinyal 4G sudah menjangkau seluruh Indonesia.

"Dengan demikian, digital ekonomi kita harapkan bertumbuh dan berkembang secara luar biasa, kalau saya harapkan dia tidak secara biasa-biasa saja. Kita berharap hilir dari digital ekonomi kita bertumbuh secara eksponensial," tandasnya.

Selain membangun infrastruktur TIK, Pemerintah juga mengambil kebijakan-kebijakan strategis guna menghantar masyarakat Indonesia mengisi dan bermigrasi ke ruang digital. "Diantaranya Kominfo sedang menyiapkan untuk memastikan tersedianya spektrum frekuensi yang memadai. Sampai dengan tahun 2024 kita membutuhkan setidaknya 2.047 frekuensi di semua *level band*," tutur Menkominfo.

Bahkan penataan spektrum frekuensi radio terus dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan frekuensi radio, guna memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. "Itu tentu akan membantu, untuk mengejar agar kita mampu sama dengan lingkungan dan kawasan kita menyiapkan ini semuanya, dan berharap dukungan dari ekosistem industri untuk mari bersama-sama kita mengisi. Saya bersama keluarga besar Kominfo sedang melakukan *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi untuk mengisi kebutuhan besar Indonesia," paparnya.

Melawan

**H O A K S**

dan

**F A K E**  
**N E W S**

bersama Tim AIS

---

Oleh: Fransiskus Emilus D. Kadju, M.Ikom

# // Pada tahun 2018 lalu, UNESCO telah menganjurkan pergantian terminologi fake news menjadi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi."

**D**isrupsi media komunikasi publik dan penemuan ruang virtual telah membawa arah dunia menuju transformasi digital dengan berbagai habitus baru di dalamnya. Mengutip pandangan Yuval Noah Harari dalam *Homo Deus (2018)*, digitalisasi dan algoritma telah menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari pola komunikasi jarak jauh yang *real time*, hingga memesan makanan tanpa harus antri di pusat kuliner. Namun sayang, sejak satu dekade lalu hingga saat ini, ketika masyarakat Indonesia mulai membiasakan diri dengan perkembangan teknologi dan bereuforia dengan berbagai kanal media sosial, apa yang kita sebut hoaks dan *fake news* pun berekspansi secara masif ke ruang-ruang virtual dan menciptakan gelombang *post truth*. Sebagai anak kandung *post truth*, fenomena hoaks dan *fake news* yang kian marak seyogyanya membawa keresahan warganet di dunia maya dan tentunya berimplikasi secara langsung bagi kehidupan masyarakat di realitas *offline*. Hal itu terjadi karena masyarakat dan warganet sulit memilah dan membedakan mana informasi yang benar, mana yang tidak benar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

**ho.aks**

merupakan berita bohong atau informasi yang tidak bersumber. Sementara itu *Oxford English Dictionary* mendefinisikan hoaks sebagai *malicious deception* atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat.

Lebih lanjut Allcott and Gentzkow (2017), membagi hoaks ke dalam beberapa klaster yang lebih kecil yaitu: berita satire, kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan pernyataan dari politisi dan tokoh publik lainnya, kabar burung, teori konspirasi, serta laporan yang salah dan menyesatkan.

Sementara itu pengertian umum dari *fake news* ialah berita bohong, berita buatan atau berita palsu yang sama sekali tidak dilandaskan dengan fakta, kenyataan atau kebenaran. Artinya berita tersebut mengada-ada dan tidak terbukti kebenarannya.

Secara umum, masyarakat sering menggunakan kata hoaks dan *fake news* untuk menjelaskan hal yang sama, yaitu berita dan informasi yang tidak benar atau palsu. Namun sejatinya, hoaks

dan *fake news* memiliki beberapa perbedaan mendasar, meskipun dari sisi kebenaran informasi keduanya merujuk pada hal yang tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran.

Perbedaan umum antara hoaks dan *fake news* ialah, bahwa hoaks merupakan informasi palsu, yang mana bisa saja berisi fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan tertentu. Sementara *fake news* merupakan berita bohong atau palsu yang tidak berdasarkan kenyataan. Selain itu, sumber dari hoaks ialah informasi yang belum jelas kebenarannya yang bersumber dari mulut ke mulut dan beredar di tengah masyarakat. Hoaks juga bisa bersumber dari berbagai postingan di media sosial yang tidak bersumber pada data yang valid. Sedangkan sumber dari *fake news* ialah media massa resmi.



Pada tahun 2018 lalu, UNESCO menerbitkan buku panduan (*handbook*) berjudul *Journalism, Fake News & Disinformation* yang dirangkum dari tulisan-tulisan oleh para ahli. Dalam buku yang diedit oleh Cherilyn Iretton and Julie Posetti tersebut, terdapat tulisan yang menjelaskan secara detail tentang anomali penggunaan kata *fake news*. Dijelaskan bahwa UNESCO menyarankan publik untuk tidak lagi menggunakan istilah *fake news* untuk disematkan pada sebuah berita maupun informasi palsu atau tidak benar. Alasannya logis, yaitu bahwa yang namanya berita haruslah harus akurat dan terpercaya. Bila tidak atau sebaliknya, maka yang rusak ialah profesi jurnalis dan kredibilitas jurnalisisme. Merujuk pada definisi ilmiah oleh UNESCO, Kementerian Kominfo secara nasional kemudian juga menganjurkan pergantian terminologi *fake news* menjadi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi untuk merujuk pada pemberitaan yang tidak benar atau palsu.

# Mengenal Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi

Dalam buku Morgan Marietta dan David C. Barker (2019) yang berjudul *One Nation, Two Realities: Dueling Facts in Americans Democracy*, istilah disinformasi, misinformasi, dan malinformasi diekspansi secara cukup mendalam. Dijelaskan bahwa misinformasi merupakan informasi yang salah, tetapi penyebarannya dipercaya bahwa informasi tersebut benar. Dalam kategori misinformasi, penyebaran informasi dilakukan untuk tujuan baik. Penyebar informasi tidak memiliki tendensi jahat atau mencari keuntungan dari penyebaran informasi tersebut. Sebagai contoh, akhir Agustus 2020 lalu, beredar informasi di jagad Maya bahwa campuran kelapa muda, jeruk nipis, dan garam dapur dapat mengobati COVID-19. Dengan tidak lebih dulu mengecek benar tidaknya informasi itu, penyebar langsung mengamplifikasi hal tersebut melalui kanal

media sosial pribadinya dengan tujuan baik, yaitu agar orang lain mengikuti anjuran tersebut dan tidak terinfeksi COVID-19. Berbeda dengan misinformasi, istilah disinformasi digunakan untuk merujuk pada situasi dimana penyebar informasi tahu kalau informasinya memang salah. Namun sengaja disebar untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan orang lain. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu beredar informasi tentang adanya chip dalam vaksin COVID-19 yang mana chip tersebut akan menyatu ke dalam darah dan orang-orang yang sudah divaksin akan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Tujuan disebarkannya informasi ini ialah agar masyarakat tidak percaya pada vaksin COVID-19. Sementara itu istilah malinformasi merujuk pada sebuah informasi yang sebetulnya benar, tetapi sengaja digunakan untuk mengancam eksistensi seseorang atau sekelompok orang dengan identitas tertentu. Target malinformasi umumnya merupakan orang dan masyarakat yang termasuk dalam kategori minoritas. Misalnya, pada tahun 2015 lalu terjadi peristiwa pembakaran Masjid di wilayah Papua. Informasi tersebut lantas diteruskan dengan tambahan provokasi SARA agar terjadi konflik horizontal di dalam masyarakat.



Merujuk pada buku *Panduan Melawan Hasutan Kebencian (2019)* terbitan Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia bekerja sama dengan *International Foundation for Electoral Systems*, terdapat 7 jenis misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang beredar dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

**Pertama, satire atau parodi.** Satire atau parodi merupakan sindiran yang bersifat konotatif, atau bukan yang sebenarnya. Konteksnya bisa untuk lucu-lucuan. Hal tersebut jadi misinformasi karena tidak semua orang memahami bahwa sebuah tulisan tersebut merupakan satire atau parodi.

**Kedua, koneksi yang salah.** Umumnya koneksi yang salah terjadi karena hubungan antar elemen dalam berita, seperti judul, badan berita, foto, maupun *caption*-nya tidak memiliki benang merah. Biasanya jenis ini ditemukan dalam berita dengan judul sensasional atau bombastis hanya untuk mendapatkan *clickbait*, padahal isinya berbeda. Hal ini seringkali ditemukan dalam aktivitas jurnalisme *online*.

**Ketiga, konten yang menyesatkan.** Konten yang menyesatkan terjadi dimana publik digiring melalui teknik framing untuk memiliki persepsi tertentu tentang suatu hal (orang, lembaga, isu, atau peristiwa). Konten seperti ini biasanya digunakan dalam iklan-iklan politik, dan propaganda. Konten dalam kategori ini bisa berupa kompilasi foto dengan tambahan potongan kata, ayat Kitab Suci, ataupun pendapat ahli dengan tujuan untuk menyerang atau mendelegitimasi pihak tertentu.

**Keempat, konten yang salah.** Hal ini terjadi ketika informasi benar disebarkan dengan konteks yang sama sekali berbeda untuk tujuan tertentu. Misalnya, berita tentang rencana Pemerintah Indonesia menjadikan beberapa daerah sebagai produsen miras, tetapi foto yang digunakan ialah Presiden Jokowi bersama beberapa Menteri melakukan *tes toast*, untuk menunjukkan kepada publik bahwa Presiden dan jajarannya. meneguk miras di acara resmi.

**Kelima, konten tiruan.** Informasi dalam konten tiruan biasanya dibuat seolah-olah berasal dari seseorang atau lembaga yang sah, padahal kenyataannya tidak. Contoh konten tiruan yang sempat beredar adalah informasi rekrutmen Pertamina yang disertai dengan logo dan email (palsu) Pertamina.

**Keenam, konten yang dimanipulasi.** Konten ini adalah hasil modifikasi dari gambar, video, dan tulisan tertentu sehingga konten itu memiliki makna yang berbeda dari konten aslinya. Terkadang konten yang dimanipulasi bermaksud sebagai hiburan (misinformasi), misalnya mengedit gambar sedang berfoto dengan artis terkenal atau di tempat tertentu. Namun konten seperti ini sering juga dipakai untuk memelintir kebenaran untuk mendelegitimasi orang, lembaga, maupun identitas kelompok lain (disinformasi).

**Ketujuh, konten palsu.** Konten palsu merupakan informasi yang sama sekali tidak benar, tetapi sengaja dibuat untuk menipu atau merugikan pihak lain (disinformasi). Salah satu contoh konten palsu ialah pemberitaan tentang orang yang terkena COVID-19 karena mengikuti vaksin dari pemerintah. Tujuannya agar masyarakat tidak percaya akan program vaksinasi Nasional Indonesia.

# Peran Tim AIS dalam Menghadapi Hoaks, Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi

MISINFORMASI



# MALINFORMASI

Dalam menghadapi konten-konten internet negatif termasuk di dalamnya Hoaks, Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi, tim AIS dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo menggunakan bantuan mesin Pengais Konten Negatif (AIS) untuk melakukan *crawling* otomatis guna menarik semua konten negatif berdasarkan kata kunci yang diberikan. Mesin yang sudah dioperasikan sejak tanggal 3 Januari 2018 tersebut dioperasikan oleh tim yang terdiri dari 100-an orang yang bekerja maksimal 24 jam sehari dan 7 hari seminggu non-stop dengan sistem pembagian 3 *shift*.

Hal penting yang harus diketahui ialah bahwa sebelum keberadaan sebuah situs atau konten di internet bisa dilenyapkan, ada proses berlapis yang dilakukan. Proses berlapis tersebut melibatkan mesin dan manusia.

Sistem kerja tim AIS ini ada tiga mekanisme. *Pertama*, tim AIS akan berpatroli secara rutin 24 jam sehari untuk mengawasi dan mencari konten-konten negatif yang ada di internet. *Kedua*, melakukan peninjauan berdasarkan laporan-laporan yang datang dari masyarakat melalui berbagai kanal seperti [adukan.konten.id](http://adukan.konten.id). *Ketiga*, menggunakan bantuan mesin AIS. Cara ketiga ini memiliki beberapa proses, yaitu: proses pertama dilakukan oleh mesin dengan memasukkan kata kunci pencarian. Mesin pemburu bisa menarik jutaan konten sesuai kata kunci dalam sekali kerja. Situs dan konten media sosial yang ditemukan ini lalu akan dilempar ke mesin pendamping yang mengurutkan hasil pencarian berdasarkan dampak, semakin viral atau populer suatu situs dan konten media sosial semakin tinggi ia dinilai berbahaya oleh mesin itu. Sementara itu proses kedua adalah sensor manusia. Setelah dampak dihitung selanjutnya mesin

akan menangkap layar situs dan media sosial yang didapat mesin. Hasil tangkapan layar itu akan dikirim ke tim verifikator yang sepenuhnya terdiri oleh manusia, dalam hal ini anggota tim AIS. Tim verifikator akan jadi gerbang terakhir yang menentukan apakah situs atau media sosial tersebut pantas untuk disensor oleh pemerintah. Apakah sebuah konten masuk kategori konten internet negatif atau tidak.

Bila ditemukan konten Hoaks, Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi, maka Tim AIS akan melakukan *labeling* mengatasnamakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo bahwa konten tersebut masuk kategori Hoaks, Misinformasi, Disinformasi, ataupun Malinformasi. Selain membuat *labeling*, Tim AIS juga menyertakan fakta sebaliknya dengan membagikan informasi yang kredibel sebagai *counter issue*.

---

**Hal penting yang harus diketahui ialah bahwa sebelum keberadaan sebuah situs atau konten di internet bisa dilenyapkan, ada proses berlapis yang dilakukan. Proses berlapis tersebut melibatkan mesin dan manusia.**

---

# SEFTAHUN PANDEMI



# Kilas Balik Dukungan Sektor Kominfo untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Tanggal 02 Maret 2021 lalu menandai tepat setahun sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak itu, pemerintah bersama dengan seluruh elemen bangsa saling bahu membahu dalam melakukan upaya penanganan COVID-19 dari berbagai sektor, yang diwujudkan melalui kolaborasi pentahelix, yaitu keterlibatan lima unsur mulai dari pemerintah, komunitas/masyarakat, akademisi, pengusaha, hingga media.

Kementerian Komunikasi dan Informatika turut melakukan berbagai upaya dan dukungan dari sisi teknologi informasi dan komunikasi dalam penanganan COVID-19. Salah satu dukungan awal dilakukan melalui dukungan pelaksanaan imbauan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

Dalam Konferensi Pers Dukungan Sektor Kominfo untuk Penanganan COVID-19 di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Senin (16/03/2020), Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Kominfo beserta Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyelenggara Platform Digital siap mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo agar masyarakat dapat bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah.

"Menindaklanjuti arahan Presiden kami sepakat mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk mendukung masyarakat agar bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah atau saat ini dikenal dengan *social distancing*," ujar Menteri Johnny.

//

Menindaklanjuti arahan Presiden kami sepakat mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk mendukung masyarakat agar bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah atau saat ini dikenal dengan

***social distancing.***"

Menurut Menkominfo, Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyelenggara Platform Digital secara bersama-sama memberikan dukungan dan komitmen dalam mendukung kebijakan Presiden dalam mengatasi Pandemi COVID-19.

"Di antaranya penyediaan *bandwidth* dan kualitas layanan yang baik; penangkalan berita hoaks, maupun insentif lainnya. Penyelenggara telekomunikasi sudah mengetahui kapasitas masing-masing yang tersedia, wilayahnya ada di mana saja, sampai ke *optimum use (high traffic)* sudah diketahui. Secara teknis mengaturnya akan dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang bersangkutan," ujar Menteri Johnny.

## Penanganan **Hoaks** dan **Literasi Digital**

**H**al lain yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo ialah penanganan berita hoaks. Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, informasi atau pemberitaan hoaks mengenai Vaksin COVID-19 kian banyak tersebar di berbagai platform digital. Temuan TIM AIS Kementerian Kominfo per 16 Maret 2021, terdapat 130 berita hoaks Vaksin COVID-19 yang tersebar di media sosial.

“Terlalu banyak hoaks dan itu tidak bermanfaat, mari kita jaga bersama-sama ruang digital kita yang sehat, ruang digital kita yang bersih, kita gunakan itu secara cerdas dan secara cermat,” ujarnya.

Menteri Johnny meminta kepada masyarakat agar memahami kondisi negara yang saat ini sedang memerangi COVID-19. Apabila Indonesia berhasil dengan cepat melawan pandemi, maka pemulihan kegiatan masyarakat bisa segera dilakukan. Salah satu cara yang efektif adalah masyarakat menghindarkan diri dari berita hoaks Vaksinasi.

“Hoaks di platform digital bisa kita atasi, yang pertama pasti setelah melakukan cek, ricek, konfirmasi dan verifikasi maka diberikan label; Itu hoaks, disinformasi dan malinformasi,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, potensi pergerakan penyebaran hoaks bisa dilakukan di media sosial lain yang bersifat terbatas dan tertutup, seperti di grup WhatsApp. Sehingga kedewasaan dan kecerdasan masyarakat penting untuk melakukan pencegahan.

Meskipun pelaku penyebar hoaks harus berhadapan dengan payung



hukum yang berlaku di Indonesia, akan tetapi sanksi sosial tentu juga akan dihadapi jika tidak menjaga etika dalam bersosial media.

Tim AIS Kementerian Kominfo merilis penanganan persebaran konten hoaks Vaksin COVID-19 per 16 Maret 2021 (Pukul 06.00 WIB). Sebanyak 130 hoaks tersebut masing-masing tersebar di platform digital dengan rincian Facebook 679, Instagram 9, Twitter 45, Youtube 41, dan Tiktok 15. Total sebaran hoaks Vaksin yang berjumlah 789 itu telah di-*takedown*.

Pembangunan konektivitas digital dan penyiapan talenta digital dalam rangka mewujudkan transformasi digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Diantaranya ialah penyediaan kapasitas satelit multifungsi milik pemerintah (SATRIA), pembangunan menara-menara telekomunikasi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, program beasiswa talenta digital, dan Gerakan Nasional Literasi Digital.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga meluncurkan prangko seri vaksinasi nasional COVID-19. Prangko tersebut, yang juga berfungsi sebagai salah satu media visualisasi peristiwa, mengangkat visual Presiden Joko Widodo yang tengah menerima suntikan dosis vaksin COVID-19.

“Ini merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang dengan cepat dan sigap memerangi pandemi COVID-19 melalui vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat agar dapat mencapai kekebalan kelompok,” ucap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam laporannya kepada Presiden di acara Peluncuran Program Konektivitas Digital di Istana Negara Jakarta, Jumat (26/02/2021).

## Penanganan **COVID-19** dan **Vaksinasi**



//

**Terlalu banyak hoaks dan itu tidak bermanfaat, mari kita jaga bersama-sama ruang digital kita yang sehat, ruang digital kita yang bersih, kita gunakan itu secara cerdas dan secara cermat."**

**D**alam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI yang berlangsung secara tatap muka dengan protokol kesehatan ketat dikombinasikan virtual melalui konferensi video Menteri Kominfo juga menjelaskan mengenai peran strategis Kementerian Kominfo dalam penanganan pandemi COVID-19.

"Di antaranya penambahan fitur registrasi Vaksin dan sertifikat Vaksin pada aplikasi PeduliLindungi, berupa registrasi penerima Vaksin dan akan memperoleh sertifikat Vaksin secara digital di dalam aplikasi," ungkapnya.

Menteri Johnny mencontohkan pada tanggal 20 Januari 2021 telah menjalani Vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Setelah divaksin kemudian menerima informasi vaksinasi melalui aplikasi PeduliLindungi.

Menteri Kominfo kembali melakukan vaksinasi tahap kedua. Dan secara digital sertifikat akan dikeluarkan di aplikasi yang saat ini dapat diunduh melalui App Store untuk iOS dan Google Play Store untuk android itu.

"Kami tentu berharap mengingat pentingnya aplikasi ini dan telah dilakukan beberapa kali peningkatan fitur-fitur untuk kepentingan dukungan penanganan Vaksin COVID-19, maka melalui forum yang terhormat ini saya tentu berharap kerja bersama-sama dengan Komisi I untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat sehingga bisa memanfaatkan dan menggunakan aplikasi ini untuk membantu

Indonesia dalam memutus rantai COVID-19, sekaligus membuka ruang bagi kita bersama untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional kita," ungkapnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyediakan akses pendaftaran vaksinasi berupa kanal Chatbot WhatsApp pada tautan [bit.ly/vaksinCOVIDRI](https://bit.ly/vaksinCOVIDRI) atau melalui nomor 081110500567. Kanal itu akan memudahkan tenaga kesehatan (nakes) untuk melakukan input data penerima Vaksinasi COVID-19 serta melakukan registrasi di mana saja.



“Jadi metode dalam rangka pendataan dilakukan dalam dua jalur, basis utamanya dilakukan secara digital. Namun demikian secara *offline* apabila masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran atau belum respon apa yang sudah terdata secara *online*, maka petugas lapangan di pemukiman masyarakat baik itu oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa, red.) maupun Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, red.), serta dibantu oleh pemerintah daerah untuk dilakukan pendekatan perorangan dalam rangka mensukseskan Vaksin COVID-19,” jelasnya.

Mengenai Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19, Menteri Johnny menjelaskan bahwa fleksibilitas SISD itu mengintegrasikan berbagai data dari sumber kementerian, lembaga maupun operator telekomunikasi untuk tahap pendaftaran, tahap distribusi dan tahap pelaksanaan hingga monitoring pelaksanaan Vaksinasi.

“Dan mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, diantaranya aplikasi PeduliLindungi Kominfo dan Kementerian BUMN untuk registrasi ulang, PrimaryCare dari BPJS Kesehatan untuk pencatatan dan pelaporan Vaksinasi, dan aplikasi SMILE dari Kemenkes untuk memonitoring distribusi Vaksinasi, ditambah aplikasi yang dimiliki oleh Bio Farma sendiri untuk mendukung dan menunjang distribusi,” tandasnya.

Menteri Johnny menegaskan bahwa Kementerian Kominfo terus mengupayakan perbaikan SISD Vaksinasi COVID-19 agar lebih efisien. “Salah satu evaluasi pelaksanaan Vaksinasi tahap pertama kemarin adalah masih

banyak nakes yang belum melakukan registrasi ulang,” ujarnya.

Menurut Menteri Kominfo saat ini sudah berlangsung pembaharuan data pada SISD Vaksinasi COVID-19 dan telah berhasil diterbitkan 980 ribu tiket vaksinasi tenaga kesehatan. Selain itu, Kementerian Kominfo juga melakukan peningkatan fleksibilitas SISD Vaksinasi COVID-19 melalui dua upaya.

“Yang pertama mengirimkan tiket Vaksinasi langsung ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota terkait, dan yang kedua mengembangkan aplikasi PrimaryCare agar jadwal Vaksinasi bisa disesuaikan sesuai situasi dan kondisi, tidak hanya terpaku pada satu fasyankes dengan jadwal tertentu saja,” imbuhnya.



# Perang Melawan COVID-19 Belum Berakhir

Tahun 2020 ditutup dengan kedatangan 3 juta vaksin COVID-19 ke Indonesia. Suntikan pertama kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu, 13 Januari 2021, menandai dimulainya Program Vaksinasi COVID-19 Nasional yang menjadi salah satu upaya utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di tanah air.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 Nasional tersebut, pemerintah memperkenalkan lima juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Langkah ini merupakan bagian dari strategi komunikasi publik vaksin COVID-19 yang telah dipersiapkan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo yang menekankan pentingnya mempersiapkan komunikasi publik vaksin COVID-19 dengan matang.

Pengenalan lima juru bicara pemerintah tersebut diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate pada Senin, 7 Desember 2020. Juru bicara pemerintah yang pertama dari Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid yang juga merupakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Dirjen P2PML). Kedua, juru bicara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Dr. dr. Lucia Rizka Andalusia, M.Pharm, Apt. yang juga menjabat sebagai Direktur Registrasi Obat Badan POM. Serta yang ketiga, juru bicara dari PT. Bio Farma, Bambang Herianto S.Si., Apt., yang merupakan Corporate Secretary perusahaan holding farmasi BUMN tersebut.

Adapun dr. Siti Nadia, Dr. Lucia Rizka, dan Bambang Herianto ditugaskan untuk membangun pemahaman yang tepat terkait kebijakan dan isu terkait, sekaligus untuk membangun partisipasi publik dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19 dan penanganan COVID-19.

Sementara, Prof. Wiku Adisasmito selaku juru bicara penanganan COVID-19 yang telah ditunjuk pemerintah sebelumnya akan menambah fokus pada aspek sains dari vaksin, serta dr. Reisa Broto Asmoro selaku juru bicara dan duta perubahan perilaku akan berfokus pada sosialisasi perilaku hidup sehat yang berbasis pencegahan termasuk vaksinasi.

Kelima juru bicara untuk vaksinasi COVID-19 tersebut akan saling melengkapi dalam upaya komunikasi publik dan sosialisasi, agar informasi tentang perkembangan vaksin dan vaksinasi COVID-19 dapat tersampaikan ke masyarakat secara terpadu, cepat, dan dapat merefleksikan dinamika yang terjadi di lapangan.

## Upaya **Protektif**

Kedatangan vaksin COVID-19 pada akhir Desember 2020 lalu menjadi kabar baik bagi upaya pencegahan pandemi COVID-19. Disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dr. Ede Surya Darmawan SKM., MDM., vaksin memang menjadi upaya protektif terhadap penyakit tertentu.

“Benar bahwa vaksin itu adalah upaya protektif terhadap penyakit spesifik. Beberapa virus dan bakteri di Indonesia memang sudah lama kita lawan dengan imunisasi, sehingga di Indonesia kita mengenal program imunisasi, kemudian beberapa penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi bisa tereliminasi. Vaksin COVID-19 ini juga diharapkan memiliki peran

seperti itu nantinya”, ujarnya dalam acara Dialog Produktif bertema “Vaksin Datang, Tetap Disiplin 3M” yang diselenggarakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (10/12/2020).

Menurutnya vaksinasi akan memberi keuntungan lebih banyak dibanding orang yang belum mendapatkan vaksinasi dan harus mengalami sakit. “Bukan hanya menelan biaya rata-rata Rp184 juta per orang, tapi juga kita rugi karena tidak bisa produktif bekerja. Sejauh ini vaksin sebagai intervensi kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular sudah terbukti efektif sejak lama,” jelas Dr. Ede.



## Amankan Ketersediaan **Vaksin**



Sebanyak 16 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac dalam bentuk bahan baku (*bulk*) kembali didatangkan ke Indonesia pada Kamis (25/3/2021). Kedatangan vaksin tahap ketujuh ini menjadikan total 53,5 juta vaksin Sinovac yang sudah diperoleh pemerintah. PT Bio Farma selaku penanggung jawab produksi dan distribusi vaksin pun langsung bergerak cepat dalam mengolah bahan baku ini menjadi vaksin jadi.

Dikutip dari situs covid19.go.id, Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heriyanto, menyampaikan bahwa Bio Farma akan terus melakukan dukungan untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan vaksin COVID-19 bagi 181 juta penduduk Indonesia.

“Dari total 53,5 juta dosis ini diperkirakan akan menjadi 43

juta dosis karena ada waste test. Sejak kedatangan vaksin bulk pertama, kita sudah memulai proses produksi dan sampai hari ini sudah menjadi 24 batch atau sekitar 24 juta dosis dan sudah didistribusikan sebanyak 17 juta dosis. Datangnya 16 juta dosis hari ini akan memperpanjang proses produksi vaksin COVID-19 ini nanti,” ujar Bambang dalam Dialog Produktif “Vaksin Datang Lagi, Pemerintah Percepat Vaksinasi” pada Kamis (25/03/2021).

Dalam kesempatan yang sama Dr. Lucia Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm, Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerangkan proses lanjutan yang dilakukan agar vaksin COVID-19 bisa didistribusikan. “Vaksin ini memang produk berisiko tinggi, karena sifatnya tidak stabil sehingga perlu kita



perlakukan sangat hati-hati. Perlu diketahui pula bahwa setiap batch vaksin mendapatkan sertifikat pelepasan (*certificate of release*), maknanya bahwa vaksin tersebut sudah dicek kembali oleh Badan POM untuk menjaga mutunya," tuturnya.

Jubir Bambang turut menambahkan, hingga saat ini pemerintah tidak mengalami kendala berarti pada proses pengujian hingga pemberian sertifikat pelepasan tersebut. "Sejak kedatangan vaksin COVID-19 pertama kali, Bio Farma sudah mendistribusikan vaksin ke 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Sebetulnya Indonesia sudah puluhan tahun menjalankan vaksinasi. Hanya saja untuk vaksinasi COVID-19 ini jumlahnya memang jauh lebih besar, tantangannya mungkin ada di kapasitas rantai pasokan dingin di fasilitas pelayanan Kesehatan," tambah Bambang Heriyanto.

Proses distribusi turut dikawal secara aktif oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pom di daerah. "Ada 34 UPT Badan POM di Provinsi dan 40 Loka POM di Kabupaten yang akan mengawal di sepanjang jalur distribusi vaksin COVID-19 agar kondisi vaksin tersebut tetap bermutu dan disimpan dengan baik," jelas Dr. Lucia Rizka.

## Analogi Keju Swiss

Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 Nasional menjadi salah satu tumpuan harapan masyarakat Indonesia dalam mengakhiri pandemi. Namun pemerintah berulang kali mengingatkan, meski telah mendapat vaksinasi, masyarakat diimbau untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan satu intervensi kesehatan saja, seperti vaksin. Menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat, menurut Prof Wiku, adalah upaya melengkapi intervensi kesehatan seperti analogi Swiss Cheese Model.

Analogi ini mengibaratkan berbagai intervensi penanganan COVID-19 sebagai celah pada lapisan keju yang saling menutupi satu dengan lainnya dan tidak dapat ditembus dari luar. Menurut Prof Wiku, lapisan keju itu bagaikan setiap jenis intervensi penanganan COVID-19 dengan celahnya masing-masing yang semakin signifikan, untuk mencegah infeksi jika dilakukan bersamaan.

Untuk itu, lanjut Prof Wiku, selama belum tercapai kekebalan komunitas (*herd immunity*), maka kepatuhan protokol kesehatan oleh seluruh individu adalah pencegahan paling efektif dalam penanganan COVID-19. "Ke depannya saya berharap setiap elemen masyarakat, baik pemerintah, akademisi, komunitas, penggiat usaha maupun media memiliki pola pikir yang lebih luas dan mendalam. Untuk menjalankan upaya penanganan COVID-19 secara lebih komprehensif demi penanganan kesehatan yang lebih signifikan ke arah yang lebih baik," kata Prof Wiku.

Sumber: covid19.go.id

# KOMINFO TALK

EDISI

## “ KUPAS PASAL KARET UU ITE ”



**Josua Sitompul**

Koordinator Hukum dan Kerja Sama,  
Sekretariat Ditjen Aptika



**Edmon Makarim**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia

**P**olemik mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali mengemuka di tengah masyarakat. Pasal karet UU ITE kerap dijadikan biang upaya kriminalisasi dan rawan akan multitafsir. Terkait hal ini Presiden Joko Widodo pun membuka peluang untuk dilakukan revisi terhadap undang-undang ini.

“

**Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ITE ini karena disinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,”**

*kata Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan TNI-POLRI di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021)*



Koordinator Hukum dan Kerjasama Sekretariat DItjen Aptika Josua Sitompul menilai bahwa dalam konteks kebebasan berekspresi sah-sah saja ketika ada pihak yang menyatakan bahwa terdapat banyak pasal karet pada UU ITE. "Dalam konteks kebebasan berekspresi sah saja, yang penting apa argumennya dalam menyatakan pendapat. Saat bicara hukum maka ada hukum secara norma dan praktik. Yang terpenting adalah bicara dengan data, pendekatan harus berdasar data dalam menjelaskan sesuatu sehingga menjadi argumen valid," tambahnya.

Menurutnya rencana revisi UU ITE merupakan langkah baik untuk merespon masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau kepentingan aparat penegak hukum secara fair, konstruktif dan objektif. Namin untuk menentukan arah keputusannya kita memerlukan data.



"Indikasinya sudah ada untuk rencana direvisi, tapi pertanyaan selanjutnya bagian mana yang perlu direvisi? kita memerlukan data, kita perlu lihat juga LSM yang mempunyai data putusan korban-korban yang mereka tangani. Kita perlu mengajak masyarakat untuk melihat lebih clear lagi. Jadi kita bisa melihat apakah pasal 27 ayat (3) ini cukup ditambahkan penjelasan, atau ada yang dikurangi dalam batang tubuh, atau dihilangkan sama sekali? Kita perlu membuat argumen kuat dengan berdasarkan data dan fakta," jelas Josua pada Acara KominfoTalk Edisi Kupas Pasal Karet UU ITE, Jumat (12/03/2021).

UU ITE seringkali selain disebut multitafsir juga memberangus kebebasan pers dan melanggar kebebasan berekspresi. Namun Josua mengungkapkan bahwa jika melihat dengan fair, bagaimana Indonesia tanpa pasal 27 ayat (3).

"Jika lihat secara *fair*, apakah Indonesia akan lebih baik tanpa pasal 27 ayat (3)? Karena banyak yang minta dihilangkan. Apakah ini akan lebih baik atau tidak, maka kita membutuhkan data. Kita perlu melihat dari dari putusan di MK terkait pasal 27 ayat (3), bisa tentang pencemaran nama baik, kesusilaan dan SARA. Misalnya dari 200 putusan, berapa banyak yang memang melanggar HAM, memberangus pers, melanggar kebebasan berekspresi dibandingkan dengan yang tidak? Karena ada banyak pihak juga yang hak dan harga dirinya terlindungi dengan pasal 27 ayat 3," ungkapnya.

Ditambahkan oleh Dosen Bidang Hukum Telematika Universitas Indonesia Edmon Makarim bahwa semua pasal pada dasarnya ada logika hukumnya, tapi tidak semua logika jadi hukumnya. “Kalau semua pasal dipersepsikan maka akan tergantung pada yang membuat persepsi. Pasal karet yang disangkakan multitafsir akan tergantung pada perspektif. Semua pasal pada dasarnya ada logika hukumnya. Tidak ada kepastian hukum jika dilihatnya dari variabel non-disiplin hukum,” tambahnya.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah beberapa kali dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi serta selalu dinyatakan konstitusional. “Putusan MK tahun 2008, pasal 27 ayat (3) adalah konstitusional karena fokus akhir dari pengaturan dan pembatasan hukum adalah untuk menjaga ketertiban umum dalam lalu lintas interaksi manusia pada media siber yang secara langsung atau tidak langsung berakibat dalam dunia nyata,” tambah Edmon.

Lebih lanjut Edmon mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) hal yang sangat penting untuk memahami pasal 27 ayat (3) dan konten ilegal yaitu konten, konteks, audiens dan *community*. “Empat hal ini penting dan bisa dijadikan prinsip dalam memahami pasal 27 ayat (3) dan konten ilegal. Keempat hal tersebut perlu diingat dalam penanganan suatu kasus. Sebelum memutuskan perlu dilakukan analisa atas empat hal tersebut,” ujarnya.

Di samping itu Edmon juga mengajak masyarakat saat melihat suatu kasus dari kontekstual pembuktian di pengadilan. “Kalau melihat satu keputusan, hendaknya tidak melihat dari pemberitaan saja, tapi lihat juga dari kontekstual pembuktian di pengadilan, adakah koneksitasnya. Jadi jika melihat suatu kasus amati dengan cermat dan tepat. Jika ada yang tidak tepat apakah semua pasal salah? Saya berharap masyarakat juga bisa menyikapi lebih dalam,” ajaknya.

## Gap antara Penyusun UU dan Aparat Penegak Hukum

Dalam penerapan UU ITE diungkapkan oleh Josua seringkali ditemui adanya gap antara penyusun undang-undang dan aparat penegak hukum. Pasal 27 ayat (3) diterapkan namun tidak semua aparat memahami maksud dan tujuannya dengan baik. “Persoalan gap akan terus ada, Ketika bicara penerapan UU ITE ada kepentingan kenapa aparat lakukan penafsiran-penafsiran” katanya.

Selain itu persoalan lain yang muncul adanya kemungkinan yang timbul bahwa orang-orang yang dulu menggagas UU ini di DPR tidak lagi berkecimpung di ranah *cybercrime*, begitu juga dengan para penyidik siber bukanlah orang-orang yang akan terus ada di struktur tersebut. Sehingga Kementerian Kominfo mengantisipasinya dengan membuat rangkaian bimbingan teknis (bimtek) bagi aparat hukum.

“Rangkaian bimtek bagi aparat penegak hukum ini supaya *transfer of knowledge*, sejarah dan konstruksi hukum bisa diberikan ke penegak hukum sehingga Ketika ada kasus mereka bisa melihat maksud dan tujuan perumusan pasal-pasal tersebut,” jelas Josua. Ketika bicara penyelesaian masalah hukum, maka tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukum. Kita memerlukan bantuan dari para ahli seperti ahli sosiologi dan komunikasi. Hal ini menjadi bagian yang membuat penerapan UU ITE menjadi kompleks, sehingga dalam penerapannya gap-gap tersebut tidak bisa selalu dihindari.

## Tim Kajian UU ITE

Undang-Undang ITE ini disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika bahkan produktif. Selain itu pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan UU ITE ini menerapkan prinsip keadilan.

Upaya Lembaga yudikatif dan Kementerian/ Lembaga terkait untuk memperjelas penafsiran atas beberapa pasal dalam bentuk pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE patut diapresiasi agar kita bisa lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir bisa diterjemahkan secara hati-hati.

Merespon arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengkajian kriteria implementatif dan rumusan substansi UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE, tiga kementerian yaitu Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan HAM mengambil Langkah strategis dengan membentuk tim pelaksana kajian, yang tertuang dalam Keputusan Menkopolkam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE.

Di dalam Tim Kajian UU ITE tersebut Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolkam Sugeng Purnomo diangkat sebagai ketua, sedangkan Sub Tim I dari Kementerian Kominfo dipimpin Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Kominfo Henri Subiako, dan Widodo Ekatjahjana selaku Ketua Sub Tim II Kemenkumham.



Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyampaikan bahwa terkait dengan arahan presiden, Kementerian Kominfo akan menangani kajian dan pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE khususnya pada pasal krusial seperti pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE.

“Pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE ini bukan norma hukum baru. Jangan sampai keliru ditafsirkan seolah-olah membuat satu tafsiran terhadap undang-undang karena sudah jelas penjelasan atas undang-undang sudah ada di bagian penjelasan undang-undang, dan penafsiran akhir dalam pelaksanaan *judicial* sistem keadilan adalah menjadi kewenangan hakim,” ujar Menteri Johnny.

Pedoman Pelaksanaan UU ITE yang dibuat dinilai sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE apabila disengketakan atau terjadi sengketa yang berkaitan dengan regulasi tersebut.



**K**ekuatan netizen Indonesia memang luar biasa. Dayana Asembayeva dari Kazakhstan yang tadinya merupakan *hero* (tepatnya heroin karena perempuan) bagi netizen Indonesia, dibikin mati kutu karena bikin masalah dengan *counterpart* kontennya di Indonesia Fiki Naki. Karena salah pengertian dalam bisnis *endorse-an*, keduanya sempat bersitegang dan permasalahannya pun dengan cepat menjadi konsumsi netizen. Dalam beberapa jam saja *follower*-nya di Instagram yang tadinya dua jutaan melorot menjadi sekitar separuhnya.

Master Internasional catur Levy Rozman (Gotham Chess) dan platform permainan catur online chess.com kewalahan menerima hujatan dari netizen Indonesia karena mem-ban akun Dadang Subur (Dewa Kipas) karena dianggap curang ketika mengalahkan Gotham Chess. Pak Dadang sendiri merupakan pecatur amatir

non-master, meskipun sudah kenyang asam garam berlatih bersama para master catur nasional. Bola terus bergulir karena lembaga dan komunitas pecatur master ikut menyerang Dewa Kipas sebagai mempermalukan dunia catur Indonesia di depan blangika catur dunia. Bola panas segera ditangkap oleh "master" yang bukan master catur melainkan master Deddy Corbuzier dengan menggelar duel antara Dewa Kipas dengan seorang master internasional, Irene Kharisma. Hadiyahnya fantastis, ratusan juta dan terus bertambah. (Demikian juga dengan sponsor untuk live Youtube gelaran ini, pasti nilainya miliaran.)

Ketika BWF (Badminton World Federation) menganulir kepesertaan Indonesia di ajang All England 2021 di Inggris "hanya" gara-gara ada satu penumpang pesawat yang terdeteksi positif COVID-19 dalam penerbangan yang sama dengan tim Indonesia,

maka netizen Indonesia langsung bergerak. Akun BWF dan akun resmi All England di media sosial menjadi sasaran empuk. Akun All England bahkan sempat beberapa kali berganti nama karena sukses di-report as spam oleh netizen.

Di dunia maya, netizen Indonesia bak balatentara baru yang berjuang di ranah maya mempertahankan harkat dan kedaulatan bangsa. Setiap kali kehormatan bangsa hendak direnggut dan dilecehkan oleh oknum dari bangsa lain, merekalah yang bereaksi terdepan dan tercepat. Ruang maya yang masih menjadi *terra nullius* dalam perspektif geopolitik sudah dicengkeram sejak awal oleh netizen yang berbendera Merah Putih. Sepanjang pengamatan, belum ada atau belum banyak netizen yang konsisten mengusung kepentingan negara bangsa di ranah digital, yang membela kepentingan nasional setiap kali isu ini mencubit rasa berbangsa mereka di media sosial.

Tak heran jika ada yang melihat peluang untuk memanfaatkan sentimen ini untuk monetisasi. Seorang netizen asal Korea Selatan, misalnya, memanfaatkan kerumunan penggemar K-Pop dan sekaligus netizen Indonesia dengan cara merendahkan warga +62 ini secara sosial-ekonomi. Segera berbondong-bondong netizen menyerangnya. Jika dia normal, maka sudah pasti sakitlah hatinya, setidaknya kena mentalnya. Namun besar kemungkinan dia menikmati eksposur yang diperolehnya. Tinggal tutup kuping dan merem.

Masih banyak catatan fantastis tentang daya serang netizen Indonesia di fora internasional (maya). Yah, meskipun netizen kita ini memang masih bermain dalam ranah yang mungkin akan disebut orang sebagai level "cemen" atau remah rengginang (di kaleng biskuit

\*\*\*\* \*\*): media sosial. Mereka bukan balatentara jagad maya yang kelas mainnya di level "tinggi" seperti pada isu peperangan cyber atau hegemoni data.

Mereka vokal. Sangat vokal. Akan tetapi...

Menurut survei Microsoft tentang "Indeks Keberadaban Digital" atau "Digital Civility Index" yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020, ternyata tingkat keberadaban (*civility*) netizen Indonesia sangat rendah. Laporan yang didasarkan atas survei pada 16.000 responden di 32 negara antara April-Mei 2020 itu menunjukkan Indonesia berada di peringkat 29. Netizen Indonesia bahkan menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di wilayah tersebut.

Menurut Microsoft, ada tiga faktor yang memengaruhi risiko kesopanan di Indonesia. Faktor tertinggi adalah hoaks dan penipuan, naik 13 poin menjadi 47%. Disusul faktor ujaran kebencian yang naik 5 poin, menjadi 27%. Faktor ketiga adalah diskriminasi sebesar 13%, lumayan turun sebanyak 2 poin dibanding tahun lalu.

Bagaimana reaksi netizen Indonesia terhadap paparan ini? Sebagian maklum, namun tak sedikit pula yang (seperti sudah diduga) menyerbu akun media sosial Microsoft dengan berbagai sumpah serapah dan (secara tak sengaja) menunjukkan bahwa survei tersebut adalah mutlak benar.

Lain ladang lain belalang. Lain lubuk lain ikannya.

Dalam ranah dunia nyata, sudah berabad-abad kita dikenal sebagai bangsa yang penuh dengan keramah-tamahan. Bahkan ada

meme yang menggambarkan bahwa andai kita tak seramah dan se-"gemoy" itu, mungkin saja kita tak terlalu lemah dan jatuh dalam kolonialisme selama berabad-abad.

Kini, begitu diberi kesempatan luas untuk bercengkerama dalam ranah maya, tiba-tiba "mak grembayang" wajah kita menjadi sangat berbeda. Kompak sih, jika sudah menyangkut nama baik bangsa, namun dalam soal keadabannya, ya ampun.

Jujur saja, etika berinternet (netiket) kita memang mengkhawatirkan dan terus tambah mengkhawatirkan. Sering kita temui dan jadikan bahan mengelus dada: meme yang memperlihatkan nir-etika dalam komunikasi dosen dan mahasiswa, karyawan dan atasan, kalangan muda dan orang tua. Seakan-akan internet adalah *terra-nullius*, tanah yang belum terjamah, akan nilai-nilai kesopanan dan etika, sehingga di sana kita boleh semaunya.

Terbayang, andai wajah ramah di dunia nyata ini bisa dibawa hingga ke dunia maya, dengan keadaban netizen yang membubung tinggi, maka pasti kita bisa bicara yang indah-indah tentang adiluhungnya peradaban bangsa kita di dunia maya.\*\*\*

**\*Opini bersifat pribadi.**



FX Bambang Irawan  
Redaktur KominfoNext

## Dukung Pariwisata dan UMKM NTB, Kominfo Tambahkan 3 BTS dan 78 Titik Akses Internet

Pemerintah memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan layanan di destinasi wisata serta pengembangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mandalika dan wilayah Nusa Tenggara Barat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan dukungan dari Kementerian Kominfo dibuktikan melalui penyediaan infrastruktur digital seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet gratis.

"Kominfo sendiri sudah bangun 3 BTS tambahan di sana (kawasan pariwisata Mandalika NTB), sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit," ujarnya dalam acara Karya Kreatif Indonesia 2021: Eksotisme Lombok Seri 1 yang berlangsung virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (03/03/2021).

Selain menghadirkan dukungan infrastruktur digital, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo terus menggerakkan hampir semua operator seluler yang telah beroperasi di daerah strategis kepariwisataan Provinsi NTB. Menurut Menteri



Kominfo, Indonesia telah mampu beradaptasi dengan ekosistem teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo hadir memberikan dukungan bagi pariwisata dan UMKM.

"Kegiatan virtual ini saja sudah memberikan gambaran bahwa Indonesia itu sangat adaptif dan sangat *agility* (adaptasi dengan teknologi komunikasi dan informatika), jelas sekali Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi digital dan khusus untuk Mandalika NTB dan sekitarnya," jelasnya.

## Layanan 112 Rebut Penghargaan CCW World Level Year 2020

Layanan panggilan darurat 112 merebut penghargaan dalam ajang ContactCenterWorld Top Ranking Performance Competition Tahun 2020 untuk tingkat dunia (CCW World Level Year 2020). Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli menyatakan penghargaan itu diperoleh dalam Kompetisi CCW 2020 yang diajukan dengan tema Layanan panggilan darurat 112 "Passing the COVID-19 Storm in Gaining Hope" (Menjaga Harapan Melewati Pandemi).

"Dalam kegiatan ini, Kominfo meraih penghargaan Gold Award untuk kategori Best Project Manager sektor Government," tuturnya di Jakarta, Rabu (03/03/2021). Dirjen Ramli menjelaskan Layanan Panggilan Darurat 112 (Call Center 112) merupakan inisiatif Kementerian Kominfo untuk membantu kemaslahatan orang banyak (*well being*). "Dengan menginisiasi dan memfasilitasi para *stakeholders* keadaan gawat darurat melalui panggilan darurat 112 yang bebas biaya (*free of charge*)," tuturnya.

Menurut Dirjen PPI, tujuan penyelenggaraan layanan 112 untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan dan mendapatkan akses bantuan dalam keadaan gawat darurat. "Seperti kebakaran, kebutuhan petugas medis atau ambulans, kecelakaan, bencana skala terbatas, kekerasan rumah tangga (KDRT) dan beragam masalah ketertiban dan keamanan," jelasnya.

## Jadi UPP Kategori Sangat Baik, MenPANRB Apresiasi Upaya Kominfo

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan apresiasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penerima penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) Kategori A- atau Sangat Baik. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyatakan penghargaan itu merupakan hasil evaluasi pelayanan publik di lingkup kementerian dan lembaga.

“Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan penilaian berdasarkan enam aspek. Aspek tersebut adalah kebijakan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi,” jelasnya dalam acara Penyampaian Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga dan Penghargaan Unit Pelayanan Percontohan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2020, Selasa (09/03/2021).

Penghargaan atas kategori itu langsung diterima oleh Sekretaris Ditjen PPI. Dalam acara itu, Menteri Tjahjo Kumolo meminta seluruh kementerian/lembaga untuk fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik.



## Digitalisasi Penyiaran, Komitmen Kominfo Sediakan Layanan Berkualitas dan Topang Pertumbuhan Ekonomi

Percepatan transformasi digital menjadi komitmen Pemerintah. Salah satu upaya yang ditempuh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan memperkuat sektor penyiaran digital agar layanan lebih berkualitas. Selain itu, pelaksanaan digitalisasi juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nah, disinilah kita memerlukan yang disebut dengan bagaimana kita harus melakukan transformasi ini, salah satunya melalui migrasi dari TV analog ke digital,” jelas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M. Ramli, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB): Membangun Ekosistem Penyiaran Televisi Digital yang diselenggarakan dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (10/03/2021).

Oleh karena itu, Dirjen Ramli menegaskan Pemerintah melalui Kementerian Kominfo berupaya agar pelaksanaan digitalisasi bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya akan menguntungkan bagi penyelenggara penyiaran dan menguntungkan bagi penonton, tetapi juga *multiplier effect*. Dirjen Ramli menyatakan tepat pada tanggal 2 November 2022 semua siaran TV analog akan berganti ke digital. Target itu menurutnya ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.



## Tinjau Vaksinasi COVID-19 Tahap Dua, Menkominfo Harapkan Awak Media Kerja Lebih Efektif di Garis Depan

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi awak media di DKI Jakarta. Menkominfo mengharapkan pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung lebih cepat akan membantu kecepatan pemulihan kesehatan nasional.

“Pemerintah berharap para awak media yang menjadi garis depan mendapatkan *herd immunity* guna memudahkan aktivitas kejournalistikannya. Kita harapkan rekan-rekan media yang saat ini melakukan vaksinasi yang kedua, setelah itu bisa menghasilkan imunitas tubuh yang lebih kuat, sehingga dengan demikian bisa bekerja di garis depan dengan lebih efektif lagi,” ujarnya dalam peninjauan di Hall Basket Senayan, Jakarta, Selasa (16/03/2021).

Menkominfo mengapresiasi kerja sama baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia yang telah menyiapkan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dengan baik, “Sehingga proses vaksinasi tahap pertama bisa berlangsung dengan baik, dan selanjutnya vaksinasi kepada rekan-rekan media di tahap kedua dan di daerah-daerah bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih lancar,” tandasnya.







## \*Versi Lambe Hoaks & Fact Boy!

---

---

# 1 [HOAKS] Bantuan BPJS Kesehatan dengan mengakses tautan yang dikirim melalui SMS

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan SMS berisi informasi terkait bantuan dari BPJS Kesehatan sebesar Rp 37 juta, dengan syarat penerima harus mentransfer biaya administrasi terlebih dahulu sebesar Rp 700.000. Pesan tersebut memuat narasi; "*Yth. anda menerima dana bantuan tahap ke-2 dari Kantor Pusat Untuk Info Klik:bit.ly/danabpjsku,*". Tautan singkat tersebut jika diakses, akan mengarahkan pada situs <https://programdanapusatbpjs.blogspot.com>.

Dilansir dari Kompas.com, informasi dalam pesan SMS tersebut tidak benar alias hoaks. Hal tersebut disampaikan oleh pihak BPJS melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @bpjskesehatan\_ri. Dalam keterangan BPJS Kesehatan disebutkan bahwa website resmi BPJS Kesehatan hanya [www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id), serta portal berita [www.jamkesnews.com](http://www.jamkesnews.com). Masyarakat diminta waspada jika menemukan situs lain yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan.

## 2

**[HOAKS] Surat Legalitas dan Perizinan VTube**

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan pada media sosial Facebook, beberapa tangkapan layar berupa surat-surat yang diklaim merupakan surat izin Vtube yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah. Surat-surat tersebut di antaranya adalah Surat Izin Operasional/ Komersial, Surat Izin INSW No NIB : 0220005141188, Surat dari Kementerian Kominfo dan Surat izin Usaha. Postingan tersebut juga memiliki narasi, *"Buat saudaraku semuanya yg belum gabung Di vtube ayooo gabung Karena saat ini Vtube telah dilindungi pemerintah Dan Surat izin sudah keluar"*.

Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa Pemerintah melindungi Vtube tidak benar. Berdasarkan informasi pada lampiran yang dirilis di situs resmi OJK yaitu ojk.go.id yang berjudul "Lampiran II Juni Daftar Entitas Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi", terdapat nama PT Future View Tech (Vtube) dengan keterangan "Investasi uang tanpa izin dengan menawarkan keuntungan Rp 200.000 - Rp 70.000.000 (dua ratus ribu rupiah hingga tujuh puluh juta rupiah) hanya dengan mengklik iklan". Hal ini membuktikan sampai saat ini Vtube masih termasuk investasi ilegal karena menerapkan skema ponzi sehingga masih diblokir oleh Kominfo sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan saat ini.

## 3

**[DISINFORMASI] Bantuan Rp3,5 Juta dari Pemerintah untuk Seluruh Pemilik E-KTP**

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang berisi artikel berjudul "Bantuan Uang Tunai Rp3,5 Juta Disalurkan Pemerintah, Syaratnya Cukup Siapkan KTP". Pada unggahan tersebut diiringi dengan narasi yang sama dengan judul artikel tersebut. Setelah ditelusuri, klaim pemerintah akan memberikan bantuan tunai sebesar Rp3,5 juta kepada semua masyarakat yang memiliki E-KTP adalah salah.

Faktanya, bantuan tersebut adalah bantuan modal kewirausahaan untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak semua pemilik E-KTP dapat menerima bantuan tersebut. Bantuan sebesar Rp3,5 juta itu ditujukan bagi para pengusaha Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengalami kesulitan selama pandemi COVID-19. Bantuan tersebut dapat diperoleh dengan mendaftar melalui dtks.kemensos.go.id, setelah itu para pendaftar diseleksi dan bagi yang lolos seleksi masuk dalam Kelompok Penerima Manfaat atau KPM PKH Graduasi. KPM PKH Graduasi yang terseleksi akan menerima pendampingan dan bantuan sosial insentif modal usaha sebesar Rp3,5 juta/KPM. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan modal kewirausahaan sosial KPM PKH, diantaranya merupakan warga miskin atau rentan miskin, anggota KPM PKH yang telah di graduasi dan memiliki usaha.

## 4

**[HOAKS] Ketua Satgas COVID-19 Sebut Hirup Uap Air Panas Bisa Membunuh Virus Corona**

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp sebuah narasi yang menyebutkan Ketua Satgas COVID-19 bernama Dwiyono menjelaskan terkait pencegahan penularan Covid-19 dapat melalui metode menghirup uap air panas. Menurut beliau uap dan air panas dapat membunuh virus corona.

Faktanya, klaim tentang terapi uap air panas dapat membunuh virus corona adalah tidak benar. Pesan berantai melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Ketua Satgas COVID-19 Dwiyono, adalah salah. Ketua Satgas Covid-19 saat ini bernama Doni Monardo, bukan Dwiyono seperti yang disebutkan di dalam pesan berantai tersebut. Lebih lanjut, dalam berbagai pernyataan dan penjelasan Doni Mordano sebagai Ketua Satgas COVID-19, tidak ada satupun informasi bahwa beliau menyebutkan uap air panas dapat menghilangkan virus corona.



## [HOAKS] Memakai Masker selama Setahun Bisa Memicu Kanker

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa memakai masker monoton selama setahun akan menyebabkan kanker, karena racun karbon dioksida yang dihisap terus menerus.

Dilansir dari liputan6.com, hoaks serupa disebarkan di AS sejak Juni 2020. Faktanya, CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS) dan juga Asosiasi Ahli Penyakit Paru-Paru AS menjelaskan bahwa masker tidak mengurangi kadar oksigen penggunaannya. Tidak ada bukti ilmiah yang menyebut pemakaian masker bisa memicu kanker. Adapun berdasarkan penelitian penggunaan masker justru dapat menurunkan risiko penularan hingga 70 persen.



## 6 [HOAKS] Satgas Waspada Investasi (SWI) Menyiapkan Vtube Legal 100%

Penjelasan :

Beredar sebuah informasi pada pesan berantai WhatsApp mengenai Satgas Waspada Investasi (SWI) yang sedang mempersiapkan aplikasi Vtube kembali legal 100% di Indonesia. Di dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa ada 13 lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi agar Vtube legal 100%, yang diantaranya yaitu OJK, Bank Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Setelah ditelusuri, dikutip dari Medcom.id, klaim SWI sedang menyiapkan agar Vtube kembali legal 100% adalah salah. Faktanya, SWI masih menetapkan Vtube dalam daftar investasi ilegal. Dilansir Liputan6.com, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L. Tobing menegaskan bahwa Vtube masih masuk dalam daftar investasi ilegal. Pihaknya pun sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memblokir aplikasi tersebut.



## [HOAKS] Lebih Mudah Terinfeksi COVID-19 Setelah Divaksin

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengatakan bahwa orang lebih mudah terinfeksi COVID-19 setelah divaksin.

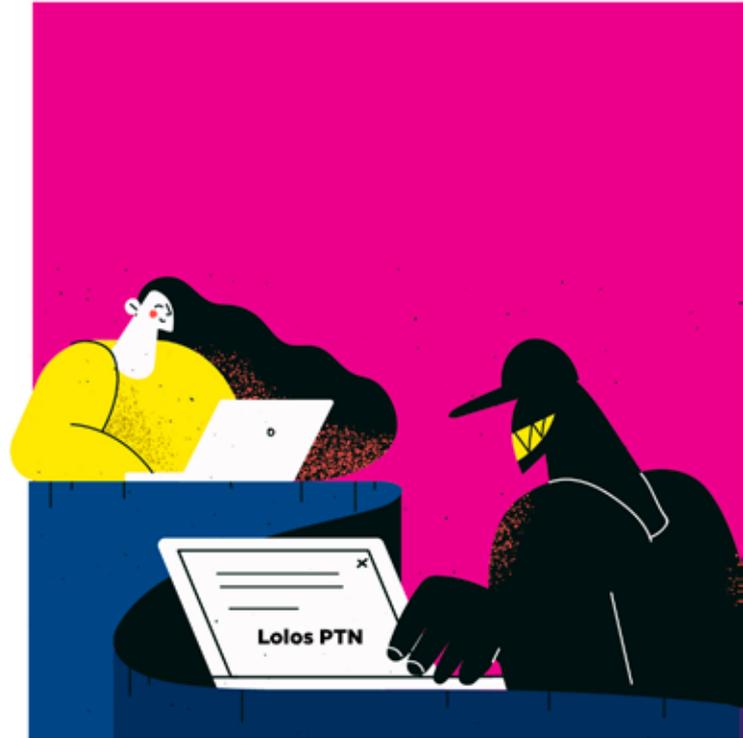
Faktanya, dilansir dari Kompas.com, klaim yang mengatakan bahwa penerima vaksin lebih mudah terinfeksi COVID-19 adalah salah. Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menjelaskan, seseorang yang sudah divaksin COVID-19 tetapi antibodinya belum terbentuk sempurna, memiliki risiko infeksi yang sama dengan orang yang belum divaksin. dr Nadia juga menegaskan, bahwa vaksin tidak mencegah penularan, tetapi mencegah seseorang jatuh sakit atau sakit berat. Selanjutnya menurut Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A (K), M.TropPaed dalam proses pembentukan antibodi setelah vaksinasi COVID-19, seseorang tidak lebih rentan terinfeksi virus corona. Akan tetapi, seseorang memang masih bisa terinfeksi COVID-19 karena kekebalan belum terbentuk sempurna.

## 8 [HOAKS] Tawaran Jasa Calo Masuk PTN

Penjelasan :

Beredar informasi di berbagai media sosial mengenai informasi jasa calo yang membantu meloloskan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2021.

Faktanya dilansir dari akun Instagram resmi @ltmptofficial, Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mohammad Nasih membantah informasi tersebut dengan mengeluarkan surat edaran No. 08/SE.LTMPT/2021 tentang tanggapan indikasi percaloan penerimaan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri oleh oknum. Terdapat 3 poin yang disampaikan dalam surat edaran tersebut, salah satu diantaranya yaitu penegasan bahwa LTMPT dan Perguruan Tinggi Negeri tidak bekerja sama dengan perorangan, kelompok atau instansi lain dalam penerimaan mahasiswa baru. Mohammad Nasih juga mengingatkan dan mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan tawaran-tawaran oknum yang menjanjikan dapat membantu diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), serta selalu waspada terhadap penipuan.



## 10 [HOAKS] Pesan Berantai WhatsApp Mengenai Informasi Ajakan Vaksinasi COVID-19 di Bio Farma

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di sosial media WhatsApp, mengenai informasi ajakan vaksinasi COVID-19 di Bio Farma. Pada pesan berantai tersebut, dituliskan vaksinasi dilaksanakan pada hari Jumat 12 Maret 2021, pada pukul 09:00 sampai dengan pukul 11:00 bertempat di Gedung Publik 2 Bio Farma.

Dikutip dari akun Instagram resmi milik Bio Farma @biofarmaid, bahwa informasi ajakan vaksinasi yang beredar pada pesan berantai WhatsApp tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Pihak Bio Farma meminta agar penerima vaksin dimohon untuk memastikan telah mendaftarkan diri melalui tautan resmi dari Pemerintah dan sudah mendapatkan konfirmasi resmi dari tempat fasilitas pelayanan vaksinasi COVID-19.

## 9 [HOAKS] Pesan Berantai Mengenai Informasi Tilang Elektronik Berlaku Mulai 14 Maret 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp terkait informasi tilang elektronik yang berlaku mulai 14 Maret 2021. Dalam pesan berantai disebutkan bahwa denda yang berlaku bisa mencapai 5 juta rupiah.

Dikutip dari cek fakta liputan6.com, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan pesan berantai tersebut adalah hoaks. Ia menegaskan bahwa informasi itu bukan dari kepolisian dan isinya salah serta informasi mengenai besaran denda juga tidak benar.



KOMITE PENANGANAN  
COVID-19 DAN PEMULIHAN  
EKONOMI NASIONAL



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

SAYA SUDAH  
DIVAKSINASI

SAYA SUDAH  
DIVAKSINASI



**SAYA SUDAH  
DIVAKSINASI**

**VAKSIN COVID-19  
AMAN & HALAL**



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9  
Jakarta Pusat, 10110  
(021)3452841  
majalahkominfo@kominfo.go.id